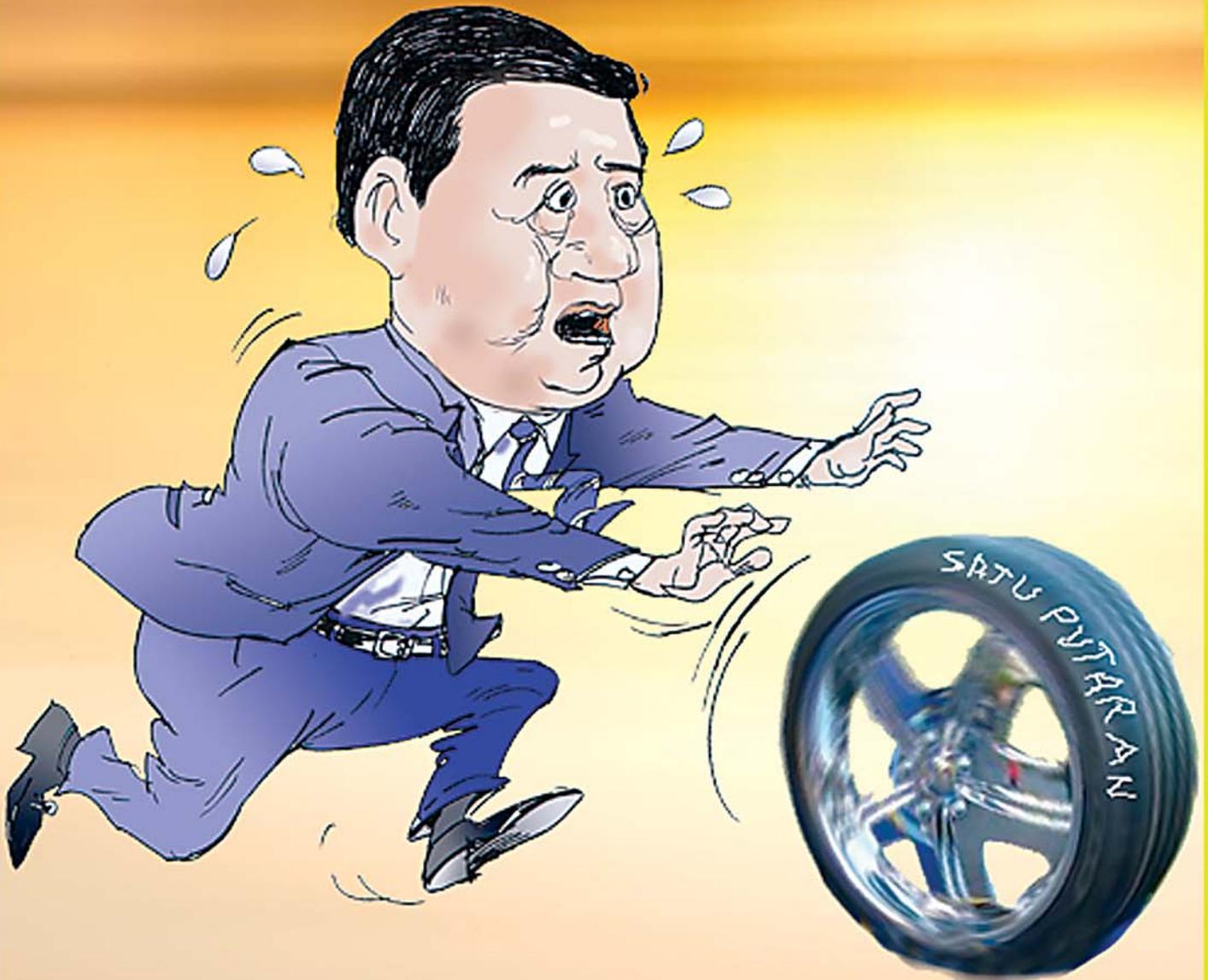


MANTAPKAN SISTEM PENDIDIKAN SATU PIPA

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 68 TAHUN IV ★ 16 JUNI - 20 JULI 2009

Rp 16.000 (Luar Jabodetabek Rp 17.500)



PILPRES SATU ATAU DUA PUTARAN?

Tersedia

BIBIT SORGUM VARIETAS NASIONAL DI AL-ZAYTUN

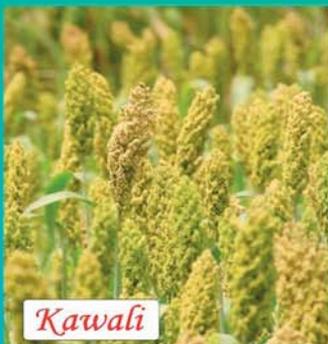


VARIETAS : NUMBU

Umur : 105 - 110 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000

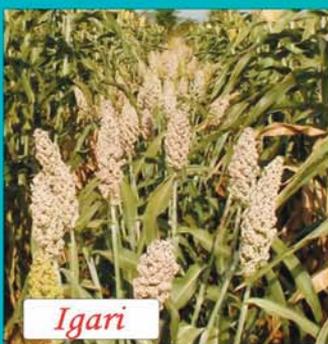


VARIETAS : KAWALI

Umur : 110 Hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



VARIETAS : IGARI

Umur : 75 - 80 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



Edisi No.68/Th.IV/16 Juni - 20 Juli 2009

DARI REDAKSI 4
 VISI BERITA 5
 SURAT PEMBACA 6
 BERITA TERDEPAN 8
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 9

BERITA UTAMA

PILPRES SATU ATAU DUA PUTARAN? | 12

Pemilu Presiden (Pilpres) yang diikuti tiga pasangan diperkirakan akan berlangsung ketat dalam dua putaran. Namun pasangan SBY-Boediono melakukan berbagai cara, termasuk membiayai lembaga survei, untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Memang, jika Pilpres berlangsung dua putaran, pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto berpeluang memenangkan Pilpres.



SBY Bisa Kalah di Putaran Kedua 19
 Semua Bicara Prorakyat 22
 Kontroversi BLT dan Utang 24
 Debat Capres Versi Indonesia 26

BERITA KHAS
 Prita Bukan yang Pertama 28

BERITA EKONOMI
 Goyah Setelah 100 Tahun 32

BERITA PUBLIK
 Memacu Revitalisasi dan Reaktivasi 47
BERITA POLITIK
 Parade Saling Serang 48
BERITA NASIONAL
 Komidi Putar Bernama Ambalat 50



BERITA TOKOH
 H. Probosutedjo 52



BERITA DAERAH
 Bandung Perhatikan Lansia 56



LENTERA



MANTAPKAN IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN SATU PIPA

Dari Sidang Tahunan Litbang Al-Zaytun 2009

Satu dasawarsa institusi pendidikan Al-Zaytun berkiprah. Sudah banyak inovasi pendidikan yang dilakukan dan banyak pula kemajuan yang diraih. Hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun, Al-Zaytun telah berhasil mengimplementasikan cita-cita One Pipe Education System, dari tingkat pendidikan usia dini (elementary) hingga universitas.....34

Mengolah Minyak Sumur Tua 58
 Ke Mana Daops itu Mengalir? 60
 Korupsi Pendidikan di Purwakarta 62
 Berkemas Menuju Kedigjayaan 62

BERITA IPTEK
 Beli Netbook Sekarang! 63



BERITA PEREMPUAN
 Karenina Sunny Halim 66
 Elly Anita 66
 Yuni Yunia Ismawati 66
 Riana Helmi 66



► Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

PEMIMPIN UMUM:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

PEMIMPIN REDAKSI:

Ch Robin Simanullang

REDAKTUR SENIOR:

MYR Agung Sidayu
Imam Prawoto
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (LIPUTAN, LITBANG & PUSDAT):

Mangatur Lorielcide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

REDAKTUR:

Samsuri, Marjuka Situmorang, Dian Gina Rahayu

SEKRETARIS REDAKSI

Bantu Hotsan

STAF REDAKSI:

Nawawi, Ikhwan Triatmo, Sarjiman,
Doan Adikara Pudan, Budi Rahardjo

WARTAWAN FOTO:

Wilson Edward

KARIKATURIS:

Dendy Hendrias

KONTRIBUTOR:

Syahbuddin Hamzah, Anis Fuadi, Chusnato,
Retno Handayani

DESAIN GRAFIS:

ESERO Design, Arief Maulana

BIRO REDAKSI:

Medan: Bontor Simanullang, Palembang: Sri Wahyuni, Jawa Barat: Ade Wiharyana (Kepala), Bernard Sihite, Prana Citra, Herman Efendy, Tarakan: Sudirman Leonard Pohan, Amerika Serikat: Mibsam Bahanan (Maryland), Rukyhal Basri (Philadelphia)

PENERBIT:

PT Berita Satria Wiratama

Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira

KOMISARIS:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

DIREKTUR/PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ch Robin Simanullang

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Samsuri

IKLAN DAN PROMOSI:

Imam Prawoto, Dian Gina Rahayu, Budi Rahardjo

KEUANGAN DAN UMUM:

Mangatur Lorielcide Paniroy

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI:

Abdul Halim, Marjuka Situmorang, Bantu Hotsan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

Jl. Bukit Duri Tanjung IX No. 8A Jakarta Selatan.
Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474
Fax. (021) 83787235

IKLAN: Gedung Dewan Pers Lt.1, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Telp. (021) 34830840 - 32195353

E-MAIL:

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

WEBSITE:

www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X

MEREK: Ditjen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028

PERCETAKAN:

PT Gramedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)



Dosen Bahasa Ibrani SM. Siahaan didampingi Pemred Berita Indonesia Robin Simanullang bercengkerama dengan Syaykh AS Panji Gumilang yang didampingi Abdul Halim di Wisma Tamu Al-Islah.

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera

Sidang Pembaca,

Tanggal 8 Juli 2009, bangsa kita melakukan pemilihan umum presiden (Pilpres). Semua rakyat Indonesia mengharapkan pilpres ini dapat berjalan dengan damai dan melahirkan pemimpin bangsa yang lebih baik lagi.

Sebulan masa kampanye, tiga pasangan capres-cawapres berlomba memaparkan visi, misi dan program kerja mereka. Namun, beberapa pekan menjelang pilpres, berkembang sebuah isu yang diduga sengaja dihembuskan tim sukses salah satu pasangan. Isu itu menyebutkan bahwa pilpres kali ini kemungkinan besar hanya satu putaran saja dan dimenangkan oleh pasangan SBY-Boediono. Berangkat dari isu ini, Berita Indonesia mengulas lebih jauh bagaimana peta pilpres yang mungkin akan terjadi dalam Berita Utama Edisi 68 kali ini.

Dalam rubrik *Lentera*, kami mengangkat topik tentang inovasi yang terus dilakukan Al-Zaytun dengan rencananya membuka pembelajaran bahasa Ibrani dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Demi mendukung program pembelajaran bahasa Ibrani tersebut, Al-Zaytun telah meminta doktor teologi (*cum laude*) lulusan Universitas Hamburg, Jerman, Bapak Pdt. Dr. S.M. Siahaan sebagai pengajar. Sementara tentang program membuka Sekolah Menengah Kejuruan, Syaykh Al-Zaytun mengatakan pendidikan ini diperuntukkan bagi pelajar-pelajar yang berencana mempersiapkan diri dulu menjadi tenaga-tenaga kerja siap pakai sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Sementara dalam rubrik *Berita Khas*, kami menulis kasus yang banyak mendapat sorotan antara Prita dan RS Omni International. Dalam rubrik Berita Ekonomi kami angkat mengenai goyahnya raksasa otomotif AS, General Motor (GM), setelah kurang lebih 100 tahun merajai pasar otomotif dunia.

Di rubrik *Berita Politik*, kami masih menampilkan sekitar kampanye presiden/wapres dengan segala cerita yang mewarnainya. Sedangkan dalam rubrik *Berita Nasional*, kami menurunkan topik mengenai pulau Ambalat dan kaitannya dengan negara tetangga Malaysia.

Di rubrik Berita Tokoh, kali ini kami menampilkan Bapak Probosutedjo yang menanggapi berbagai visi dan misi serta program para capres-cawapres dalam pilpres 2009 ini. Dan tidak lupa, seperti biasa, kami tetap menurunkan *Berita Daerah* dari beberapa daerah di Tanah Air, *Berita Iptek (netbook)* dan sebagainya.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rakyat yang Menentukan

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) putaran pertama akan berlangsung Rabu 8 Juli 2009. Kontesannya tiga pasang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Yakni pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (Mega-Prabowo) bernomor urut 1, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (SBY-Boediono) bernomor urut 2, serta pasangan Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Wiranto) bernomor urut 3.

Ketiga pasangan ini bersaing ketat. Siapa di antara ketiga pasangan ini yang akan terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (2009-2014) dan apakah Pilpres akan berlangsung satu putaran atau dua putaran? Tentu rakyatlah yang akan menentukan.

Namun, sebelum rakyat (kita) menentukan dan menjatuhkan pilihan, lima menit di TPS, kita perlu menimbang dengan cermat, karena pilihan kita (rakyat) akan sangat menentukan dinamika perjalanan bangsa dan negara ini, paling tidak dalam lima tahun ke depan. Selain menimbang dengan pertimbangan-pertimbangan obyektif (kepentingan) kita sendiri, kita juga perlu menimbang secara subyektif, siapa ketiga pasangan itu yang terbaik memimpin Indonesia, menjawab tantangan dan menyejahterakan Indonesia lima tahun ke depan.

Dalam kesempatan ini, tentu kita berasumsi bahwa ketiga pasangan itu adalah putra-putri terbaik bangsa. Sebab, paling tidak secara formal (konstitusi dan undang-undang), mereka telah memenuhi persyaratan sebagai Capres-Cawapres. Selain, juga tentu mereka telah memiliki jejak rekam perjuangan masing-masing.

Megawati Soekarnoputri, adalah puteri proklamator dan Presiden RI pertama, Bung Karno. Sebagai puteri proklamator, tentulah punya pengalaman tersendiri, apalagi pada era Orde Baru selalu mendapat tekanan. Namun, di tengah tekanan itu, Megawati masih mampu berjuang sehingga terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, yang kemudian menjadi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP), partainya wong cilik dan memenangkan Pemilu pertama pada era reformasi. Lalu, terpilih menjadi Wakil Presiden 1999 - 2001 dan Presiden 2001-2004.

Begitu pula pasangannya (cawapres) Prabowo Subianto adalah putra begawan ekonomi Prof Sumitro Djojohadikusumo dan mantan menantu Presiden Soeharto. Dia seorang jenderal lapangan (komando) yang dibesarkan dalam lingkungan cendekiawan. Pernah memimpin pasukan elit TNI AD, Kopassus dan Kostrad, sebelum akhirnya dipensiunkan dini dan menjadi pengusaha sukses. Kemudian ingin mengabdikan dengan tekad mewujudkan ekonomi kerakyatan, dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Ge-

rindra). Partai ini meraih suara signifikan dalam Pemilu Legislatif yang mengantarkannya menjadi Cawapres.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seorang putra prajurit yang menjadi lulusan terbaik Akademi Militer 1973. Karir militernya ditapaki hingga meraih pangkat jenderal. Ia dikenal dengan julukan jenderal yang berpikir. Karirnya sukses sebagai staf pemikir dalam TNI. Reformasi membawa angin segar kepadanya setelah dipercaya Abdurrahman dan Megawati menjadi menteri. Sambil memelihara popularitas sebagai menteri, ia pun diam-diam mendirikan Partai

Demokrat. Hanya beberapa hari menjelang Pemilu 2004, ia mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan akhirnya terpilih sebagai Presiden RI 2004-2009 berpasangan dengan Jusuf Kalla.

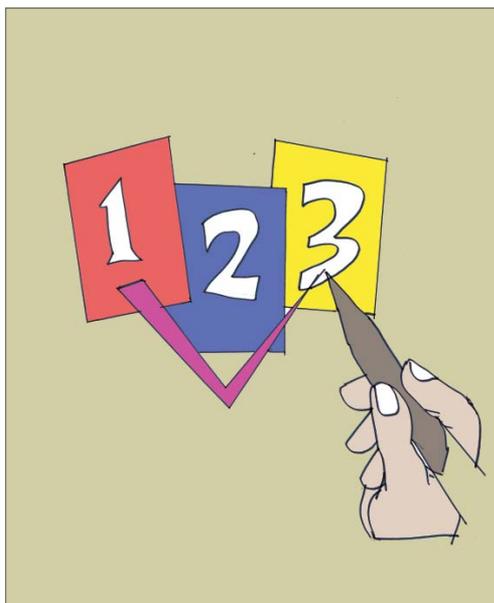
Sedangkan pasangannya, Prof Dr Boediono adalah seorang ekonom, birokrat profesional. Ekonom bertangan dingin ini juga berkibar di era reformasi, menjadi menteri keuangan di era pemerintahan Megawati. Kemudian dibujuk SBY menjadi Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu sampai kemudian terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia. Ia amat sedih diisukan beraliran neoliberal, karena menurutnya ia berjuang demi rakyat.

Jusuf Kalla, putera pengusaha terkenal dari Makasar, Haji Kalla. Dibesarkan dalam lingkungan pengusaha, dia sangat gusar melihat gerak lambat, biar lambat asal

selamat. Ia terlatih menghadapi tantangan dan kesulitan serta memanfaatkan peluang dengan cepat dan tepat. Ia pun menjadi pengusaha sukses. Karir politiknya berkibar pada era reformasi, setelah diangkat Gus Dur menjadi Menteri Perdagangan dan oleh Megawati sebagai Menko Kesra. Sebagai Menko Kesra ia berhasil menangani perdamaian Poso. Kemudian, kader Golkar ini terpilih menjadi Wakil Presiden 2004-2009 bersama SBY.

Wiranto, seorang militer yang karirnya mencapai puncak sebagai Panglima ABRI/TNI dan Menko Polkam. Ia adalah mantan ajudan Presiden Soeharto. Menapaki karir militer sebagai pemegang kendali komando. Karir politiknya diwarnai dengan menjadi Calon Presiden Pemilu 2004 setelah memenangkan konvensi Capres Partai Golkar. Setelah itu, ia mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang berhasil meraih suara signifikan Pemilu 2009, yang mengusungnya menjadi Cawapres.

Demikianlah, ketiga pasangan ini memiliki kelebihan masing-masing. Mega-Prabowo mengedepankan ekonomi kerakyatan, SBY-Boediono pemerintahan yang bersih dan JK-Wiranto kemandirian bangsa. Ketiganya bertujuan menyejahterakan rakyat. Ketiga pasangan adalah yang terbaik. Dan, siapakah yang lebih terbaik dari yang terbaik, kitalah yang menentukan, apakah itu dalam Pilpres satu putaran atau dua putaran. *Redaksi*





Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

• email : redaksi@berindo.com
 • surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan 12840
 Telp. (021) 8292735, 8293113, 83701736, 70930474 Fax. (021) 83787235

Banyak Aparat Negara Meninggal Sia-sia

Pada 20 Mei lalu merupakan hari kelabu bagi TNI, terutama angkatan udara. Sebanyak 101 orang meninggal dengan sia-sia dan 11 orang luka-luka. Sampai pertengahan Juni 2009 sudah enam kali pesawat jatuh dan ratusan korban tewas. Rentetan kecelakaan pesawat, baik pesawat militer maupun pesawat komersial, adalah bukti nyata buruknya kualitas penerbangan di Indonesia. Sangat disayangkan banyak aparat negara yang meninggal bukan karena berjuang di medan perang, melainkan karena faktor X yang kita juga tidak tahu, apakah itu karena kualitas pilotnya atau pesawat yang tidak laik terbang. Saya berharap kepada Panglima TNI agar dapat memikirkan hal ini karena sangat tidak adil jika aparat negara yang sudah bersusah payah

masuk TNI dan berjuang di dalamnya hanya berakhir dengan mati sia-sia, tidak dengan terhormat seperti yang diharapkan ketika menjalankan tugas negara.

RYCHE PRANITA
ryche_alwaysrainbi@yahoo.com

Ambalat, Manohara, dan Nasionalisme

Medio 2009, dua kasus yang berkaitan dengan Malaysia muncul hampir bersamaan, yaitu Blok Ambalat dan kekerasan terhadap Manohara. Yang satu berurusan dengan wilayah kedaulatan NKRI, dan yang satu terkait dengan nasib anak negeri ini yang diperlakukan tidak adil oleh putra mahkota kerajaan. Keduanya bermuara pada satu sebab, yaitu kesombongan berlebihan Malaysia, dan di sisi lain karena kurang cerdasnya kita mengelola nasionalisme bangsa ini. Urusan dengan negeri jiran Malaysia seakan tak pernah berkesudahan. Mulai dari persoalan Ambalat, masalah TKI yang sering 'dikhianati', *illegal logging*, bahkan kini permaisurinya sendiri pun disiksa hanya karena ia orang Indonesia. Negeri yang teramat luas, kaya raya, *gemah ripah loh jinawi* ini ternyata 'kecil' di mata bangsa lain. Itu terjadi lantaran kita salah mengelola nasionalisme kita.

IR SARJITO
sarjito_aceh@plasa.com

Etika Politik Santun

Beberapa minggu belakangan ini gerah

juga rasanya melihat, mendengar, dan membaca berita tentang kampanye pilpres di media massa. Bagaimana tidak, semuanya saling mengolok, menyindir, bahkan secara terang-terangan menjatuhkan lawan politiknya dengan mengesampingkan etika. Ada yang bergaya humoris, ada juga yang berpola anggun dan sok elegan. Mereka bilang itu demokrasi dan aplaus dari para pendukung yang disebut tim sukses (TS) terus memeriahkan acara sindir-menyindir itu. Begitukah tingkah para politisi kita yang akan menjadi pemimpin bangsa ini kelak? Tingkah pola mereka sungguh sangat tidak mencerminkan kultur budaya kita yang santun dan saling menghormati satu sama lain. Budaya malu juga sudah hilang, yang ada justru budaya malu-maluin. Padahal betapa indahnya ketika sesama insan bisa saling menghargai, memberikan kesempatan berpendapat, dan juga mendengarkan.

LIDYA AMARALIA SIREGAR
lidiamara@yahoo.com

Usul Gila Anggota DPR

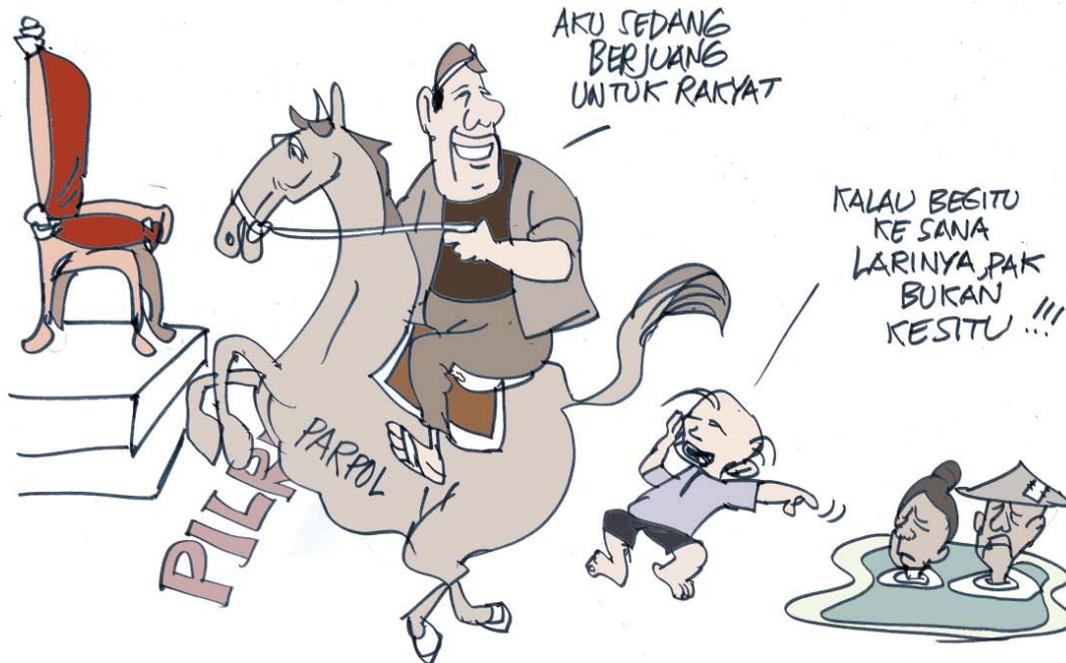
Usulan pemberian cendera mata bagi anggota DPR berupa cincin emas senilai Rp 5 miliar di akhir masa jabatan mereka, merupakan usul gila dan sangat tidak masuk akal. Bukan hanya bentuk korupsi, tapi sudah merupakan bentuk perampokan uang negara dalam modus baru. Persis apa yang disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bahwa pemberian cendera mata kepada anggota DPR dapat dikategorikan sebagai korupsi dan penyalahgunaan anggaran karena dalam Undang-Undang Susunan Kedudukan dan Tata Tertib DPR tidak ada aturannya. Padahal banyak masyarakat yang kecewa dengan kinerja anggota DPR dan perilaku menyimpang mereka seperti korupsi, selingkuh, tidur saat rapat, dan sebagainya. Hendaknya anggota DPR mengintrospeksi diri, tugas apa yang belum dapat diselesaikan dalam masa jabatannya. Karena itu adalah hutang kepada rakyat, yang harus dibayar. Jangan hanya mengedepankan haknya dengan rencana yang jelas tidak mendidik. Karena bukan tidak mungkin bila rencana ini terealisasi, semua anggota DPRD kota dan kabupaten akan mengikuti jejak perilaku anggota DPR pusat yang jelas-jelas tidak mempunyai keprihatinan kepada bangsa dan negara ini.

Dody Chandra
cdoddychandra@yahoo.com

PASTIKAN TARIF IKLAN **BERITAINDONESIA**

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Him Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Him Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Him Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Him Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Him Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Him Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Him Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000
Iklan kuping (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan		© Rp. 5.000.000

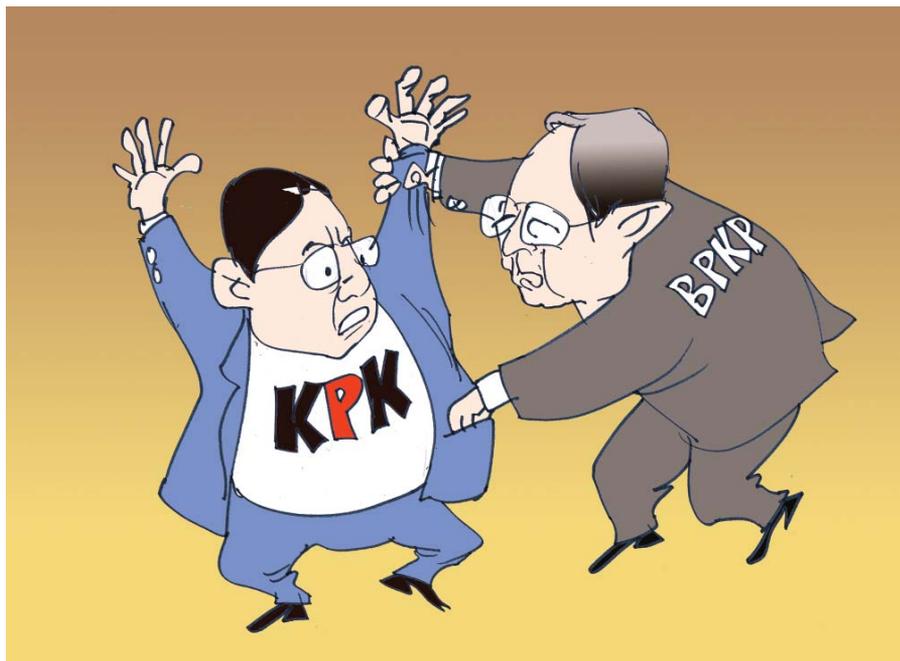
PEMASANGAN IKLAN:
 Telp. (021) 83701736, 8292735, 70930474
 Fax. (021) 83787235



Tempat Anda untuk Berlangganan Majalah BERITAINDONESIA

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

BANDA ACEH : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec. Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, **MEDAN** : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, **SIANTAR** : Jl. Ramping No. 18, Pematang Siantar, **LABUHAN BATU** : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. **KARO** : Jl. Sangab Enlau No. 51 Kaler Jahe. **RIAU** : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, **RIAU UTARA** : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. **RIAU SELATAN** : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hilir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, **RIAU KEPULAUAN** : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, **PADANG** : Jl. Pamancangan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, **JAMBI** : Jl. Depati Purbo, Komplek Karya Telawai Permai II No. 06 B, Kel. Pematang Sulur RT 16, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Telp 081366106709, **BENGKULU** : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, **PALEMBANG** : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, **MUARA ENIM** : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, **PANGKAL PINANG** : Achmad Effendi, Jl. Sriwijaya RT.001/001, Gedung Nasional, Taman Sari. **LAMPUNG** : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. I Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, **KOTABUMI** : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, **PONTIANAK** : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, **SINGKAWANG** : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, **SINTANG** : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, **KETAPANG** : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, **BALIKPAPAN** : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, **PASIR** : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Grobot Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, **SAMARINDA** : Jl. Latsitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, **BERAU** : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredep Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, **BANJARMASIN** : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, **PALANGKARAYA** : Jl. Karanggan No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimantan Tengah. Telp (0536)38958, **PANGKALAN BUN** : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, **KAPUAS** : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, **BUNTOK** : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, **MANADO** : BTN Nusantara Permai Blok C No. 11 Mapanget Barat, Manado 9524, **MAKASSAR** : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, **PAREPARE** : Jl. Wakke'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, **GOWA** : Jl. Syekh Yusuf VII Gowa. Telp (0411)861661, **BONE** : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, **PALOPO** : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, **PALU** : Jl. Tulip II No. 1, Perumnas Balaroa, Palu, Sul-Teng. Telp (0451)460717, Fax. (0451)460717, E-mail: ypi_calebaswustho@yahoo.com. **KENDARI** : Jl. A. Yani 204 Kendari, Telp (0401) 390913, HP. 081320696320 a/n. S. Edi Nurrahman. **BUTON** : Jl. MH. Thamrin No. 32A, **AMBON** : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, **TIMIKA** : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Kopra Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, **KUPANG** : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, **BELU** : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, **MATARAM** : Jl. R. Suprpto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, **LOMBOK** : Jl. Pejanggi No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, **SUMBAWA** : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, **BALI** : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd.Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, **MALAYSIA** : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009. **JAWA BARAT** : A. de Wiharyana, Jl. Purnawarman No.5, Bandung – **TARAKAN** : S.L. Pohan, Jl. Gereja Rt.17 No.59, Markoni, Tarakan - Kaltim 771211 – **PURWAKARTA** : Bernard Sihite, Kantor Perwakilan PWI, Jl. KK Singawinata No.23, Purwakarta, Tlp. (0264) 205081



BPKP Kelewat Batas

Pernyataan SBY dan rencana BPKP mengaudit KPK, membuat kesal sebagian kalangan.

Belum selesai kasus yang menimpa pimpinan KPK, Antasari Azhar, muncul lagi 'upaya' baru yang dinilai sebagian kalangan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ceritanya berawal dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu dengan pimpinan Harian Kompas (24/6).

Saat itu, SBY ditanya tentang penegekan hukum dan pemberantasan korupsi dan bagaimana jika UU Tipikor tidak hadir sebelum 19 Desember dan masa depan KPK. Dari sekian banyak jawabannya itu, SBY menyatakan, "Terkait KPK, saya wanti-wanti benar `power must not go unchecked`. KPK ini sudah `powerholder` yang luar biasa. Pertanggungjawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati". Pernyataan ini kemudian dimuat Harian Kompas pada terbitan 25 Juni.

Sehari setelah pernyataan SBY ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan akan mengaudit kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari penggunaan keuangan yang bersumber dari negara yang meliputi penggunaan keuangan langsung dan manfaat peralatan kerja yang dibeli.

"Apalagi saat ini sedang ramai kontroversi soal penyadapan telepon yang dilakukan oleh KPK. Jangan sampai

lembaga yang seharusnya bekerja secara profesional ini juga masuk ke wilayah politik," kata Ketua BPKP Didi Widayadi di Jakarta (25/6). Menurut dia, audit BPKP terhadap KPK ini adalah perintah tak tertulis dari Presiden. Apalagi Presiden sudah mewanti-wanti keberadaan lembaga KPK yang dinilai sebagai lembaga yang tidak terkontrol dan bisa berbahaya.

Berita yang beredar semakin simpang siur karena esoknya (26/6), SBY menegaskan bahwa BPKP tidak berhak mengaudit KPK dan membantah memberi perintah kepada BPKP mengaudit KPK. Anehnya lagi, beberapa lama setelah SBY menggelar konferensi pers, Didi Widayadi malah menyatakan tetap berniat mengaudit KPK.

Pernyataan SBY dan niat BPKP mengaudit KPK itu kemudian menjadi polemik dan menuai kecaman dari banyak kalangan. Pasalnya, BPKP tak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit terhadap KPK. Lembaga tersebut adalah pengawas internal yang berada di bawah eksekutif, tetapi dalam melakukan tugasnya atas permintaan kepala instansi di bawah eksekutif.

Melihat hal ini, pengamat Hukum Tata Negara yang juga aktivis antikorupsi, Saldi Isra, mengatakan, Didi harus membuka, dari mana mendapatkan perintah

tersebut. "Didi Widayadi harus terbuka, siapa yang memerintahkan dia. BPKP itu lembaga tinggi negara yang tidak mungkin bekerja kalau tidak ada yang mengorder. Yang harus dicari, siapa yang mengorder?" ujar Saldi, pada sebuah diskusi mingguan, di Jakarta, Sabtu (27/6). Tindakan BPKP, menurutnya, sangat janggal dan patut diusut latar belakangnya. KPK, Saldi mengatakan, sudah berdiri sejak 2003. Selama ini, audit sudah dilakukan lembaga yang berwenang, yaitu BPK.

"Lalu, kenapa BPKP baru muncul saat ini dan mau melakukan audit, apalagi katanya ada perintah presiden, meski kemudian dibantah. Didi harus menjelaskan, kalau bukan presiden, siapa yang menyampaikan perintah itu. Kalau tidak, berarti dia punya skenario sendiri dan itu bahaya sekali," ujarnya. Sekadar informasi, sebelumnya, BPKP sudah meminta untuk menarik orang-orang BPKP yang ada di KPK. Namun, permintaan ini tidak begitu saja diloloskan karena harus memenuhi sejumlah syarat.

Sedangkan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehmahua menilai, KPK tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan yang sangat besar. Abdullah mencontohkan, untuk melakukan penggeledahan, KPK juga tak bisa bertindak semaunya dan harus mengantongi izin. Ia juga menyatakan keheranannya atas pernyataan Didi Widayadi, yang mengaku mendapatkan perintah dari Presiden untuk mengaudit KPK. Padahal, BPKP tidak memiliki wewenang untuk mengaudit lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Pendapat senada diungkapkan Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana. Menurutnya masih ada lembaga yang lebih superbody yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam lembaga itu semua fungsi polisi, penuntutan dan pengadilan ada di sana. KPK hanya menggabungkan fungsi polisi dan kejaksaan saja sedangkan fungsi peradilan ada di Tipikor. Sehingga KPK tidak super secara struktural. Ia juga menambahkan kalau kontrol terhadap KPK itu tetap ada, bisa dilakukan DPR, pers dan masyarakat.

Sedangkan Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Dandang Widoyoko di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (28/6), mengatakan, bila memang audit ini dilakukan BPKP terhadap KPK setelah pernyataan kontroversial Presiden, ini menunjukkan SBY tak mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. "Audit yang akan dilakukan oleh BPKP tidak lepas dari kebijakan Presiden untuk mengontrol dan mengurangi kewenangan KPK sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah eksekutif," katanya. ■ **LOR**



Hercules Jatuh, 101 Tewas

20/05 - Pesawat Hercules C-130 milik TNI-AU yang membawa 98 penumpang dan 14 awak jatuh di areal persawahan di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Rabu (20/5) pukul 06.25 WIB. Korban tewas dilaporkan 101 orang, termasuk mantan Komandan Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun, Marsma Harsono. Pesawat yang diterbangkan pilot Mayor (Pnb) Danu, dan kopilot Kapt (Pnb) Younan itu mengangkut anggota TNI-AU, keluarga anggota TNI AU, dan warga sipil. Penyebab kecelakaan diduga akibat masalah teknis. Sebelum jatuh terbakar, pesawat sempat menabrak pohon, kemudian jatuh me-

nimpa beberapa rumah warga yang berlokasi sekitar 5 kilometer dari Pangkalan Udara Iswahyudi Madiun. Proses evakuasi pencarian jasad korban meninggal dihentikan pada Kamis (21/5) malam.

Deklarasi Mega-Pro

24/05 - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subiyanto mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)

Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/5). Biaya deklarasi pasangan tersebut menelan dana Rp 550 juta. Ribuan kentongan ditabuh menandai deklarasi. Lapangan Bantargebang dipilih karena dianggap mewakili semangat perjuangan pasangan calon, yaitu membangun ekonomi kerakyatan. Dalam deklarasi yang dihadiri ribuan massa, Mega-Prabowo sekitar 10 menit secara bergantian menyampaikan pidato politik terkait pencalonan mereka sebagai capres dan cawapres 2009.

Ditemukan, Gunung Api Tertinggi di Indonesia di Dasar Laut

28/05 - Para pakar geologi Indonesia, AS dan Prancis berhasil menemukan gunung api bawah laut raksasa berdiameter 50 km dan tinggi 4.600 meter yang berada 330 km arah barat Kota Bengkulu. Tepatnya di Palung Sunda, barat daya Sumatera, pada kedalaman 5.900 meter dengan puncak berada di kedalaman 1.280 meter dari permukaan laut. Para ahli geologi ini berasal dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, CGGVeritas dan IPG (Institut de Physique du Globe) Paris.

"Gunung api ini sangat besar dan tinggi. Di daratan Indonesia tak ada

Karikatur Berita



gunung setinggi ini kecuali Gunung Jayawijaya di Papua,” kata Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (PTISDA) BPPT, Yusuf, di Jakarta, Kamis (28/5). Belum diketahui apakah gunung berapi itu aktif atau tidak. Yang pasti, ditemukan kaldera (salah satu indikasi bahwa sebuah gunung tergolong gunung berapi). Eks-pedisi penelitian yang menggunakan kapal seismik Geowave Champion canggih milik CGGVeritas itu bertujuan melakukan studi risiko kegempaan dan tsunami di perairan barat Sumatera. Riset ini sendiri menggunakan metode Seismik Refleksi dengan alat *streamer sercel sentinel solid* sepanjang 15 kilometer.

PT PAL Rumahkan 1.000 Karyawan

02/06 - Terhitung 8 Juni 2009, PT PAL Indonesia, pabrik kapal terbesar di Indonesia, merumahkan sekitar 1.000 karyawannya. Langkah ini diambil demi mengurangi biaya operasional yang tinggi. Ketua Umum Serikat Pekerja PAL (SPPAL) Kartiko Adi Widodo mengungkapkan, manajemen menerapkan sistem kuota per bagian, artinya ada persentase tertentu dari jumlah karyawan di tiap bagian yang dirumahkan. Jumlah karyawan PT PAL sampai bulan Juni mencapai 2.400 orang. SPPAL khawatir program merumahkan karyawan ini berlanjut menjadi PHK terhadap karyawan. Dia menambahkan, persoalan yang dihadapi PAL saat ini karena kesalahan penanganan sumber daya manusia.

DPR Paling Korup

03/06 - Untuk ketiga kalinya sejak tahun 2004, lembaga legislatif dipersepsikan sebagai institusi terkorp di Indonesia. Hal serupa pernah disandang lembaga legislatif pada 2004 bersama dengan partai politik serta tahun 2006 bersama dengan kepolisian dan lembaga peradilan. Demikian hasil laporan Barometer Korupsi Global (BKG) yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) yang dipublikasikan pada Rabu (3/6) di Jakarta. Survei dilakukan pada 11-20 November 2008 terhadap 500 responden yang berumur di atas 16 tahun. Pada survei kali ini, lembaga legislatif mendapat skor 4,4 (skor antara 1 untuk sama sekali tidak korupsi dan 5 untuk sangat korup). Skor yang sama juga diraih lembaga itu pada tahun 2004. Lembaga peradilan, yang dipersepsikan sebagai institusi terkorp kedua, mendapat skor 4,1. Parpol sebagai institusi terkorp ketiga mendapat skor 4. Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis menuturkan, hasil survei turut dipengaruhi oleh terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPR, seperti Al Amin Nur Nasution, Bulyan Royan, hingga Hamka Yandhu.

Deklarasi Damai Pemilu 2009

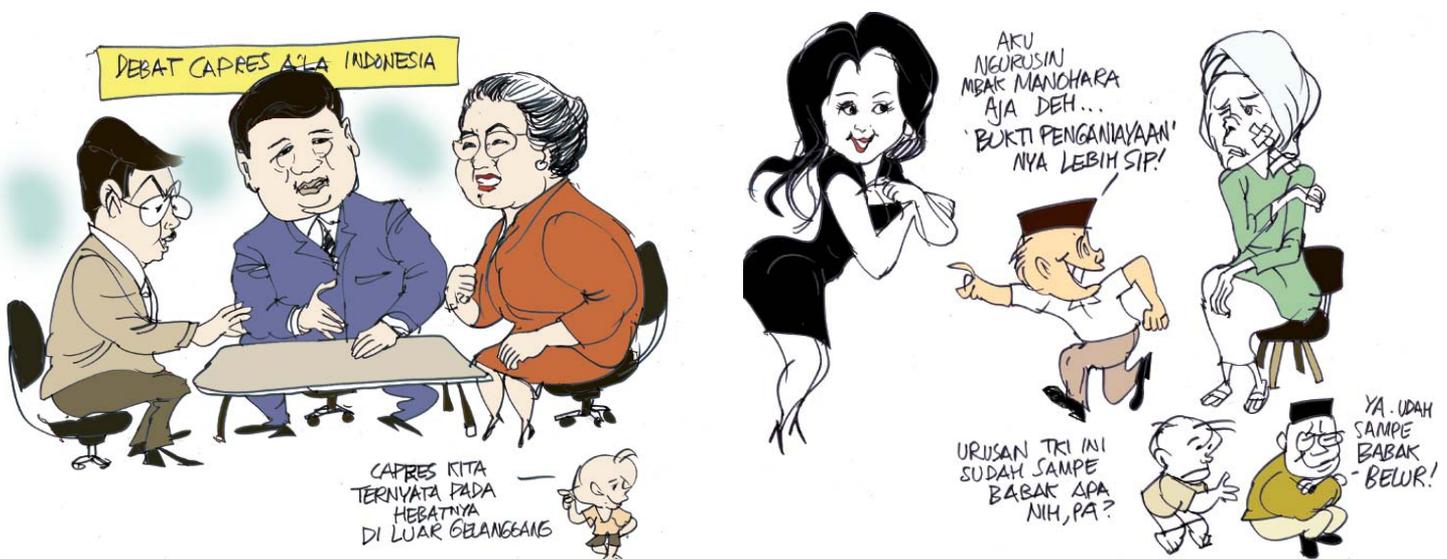
10/06 - KPU menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2009 di ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (10/6). Deklarasi ini untuk menandai

dimulainya kampanye rapat umum pilpres 2009. Deklarasi Pemilu Damai yang bertema “Pemilu Dalam Persaudaraan” diisi dengan mendengarkan Orasi Kebangsaan dari tiga pasangan capres. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden diberi kesempatan berorasi di atas panggung, masing-masing selama 20 menit sesuai dengan nomor urut pasangan. Puncaknya, sekitar pukul 20.45, tiga pasangan capres dan cawapres melakukan pengucapan deklarasi pemilu damai. Setelah pengucapan Deklarasi Pemilu Damai, tiga pasangan calon saling bergandengan tangan dan mengangkat tangan. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Pemilu Dalam Persaudaraan oleh ketiga pasangan capres dan cawapres.

Jembatan Suramadu Diresmikan

10/06 - Setelah enam tahun lamanya, pembangunan Suramadu akhirnya rampung dan diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (10/6) di Dusun Sumber Wungu, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia ini diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 4,5 triliun yakni dari APBN/APBD dan pinjaman bilateral dari pemerintah Republik Rakyat China (RRC), dengan dana senilai US\$ 280 juta dan sebagai konsekuensinya juga melibatkan kontraktor asal negeri tirai

Karikatur Berita



bambu tersebut. Pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Madura. Oleh karena itu, harus ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan Surabaya-Madura secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu. Demikian himbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat peresmian.

Andi Mallarangeng Dikecam

03/07 - Kecaman terhadap Andi Mallarangeng, tim kampanye capres-cawapres SBY-Boediono, kian tajam dan meluas. Ucapannya bahwa orang Sulawesi Selatan (Sulsel) belum saatnya menjadi Presiden RI periode 2009-2014 dinilai tidak seharusnya dilontarkan oleh seorang yang memiliki latar belakang akademis seperti Andi. Para pengecam pun kian beragam. Kalau sebelumnya kecaman dan demonstrasi baru datang dari Forum Rektor Indonesia Simpul Sulsel serta Koalisi Rakyat Sulsel Anti Rasis, kini kecaman juga muncul dari mahasiswa, sejumlah tokoh dan aliansi di luar Sulsel, bahkan dari mitra koalisi SBY-Boediono. Dalam kampanye cawapres Boediono di GOR Mattoangin, Makassar, Rabu (1/7), Andi menyebutkan bahwa yang terbaik menjadi pemimpin RI saat ini adalah SBY-Boediono. "Bagaimana dengan anak Sulawesi Selatan? Ada waktunya masing-masing, perjalanan masih panjang. Banyak anak Sulsel yang bisa memimpin negeri ini suatu ketika," kata Andi. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone-

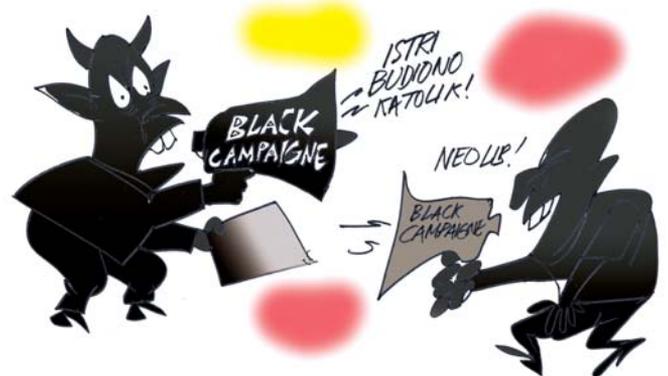


Michael Jackson Meninggal Dunia

25/06 - Raja pop dunia Michael Jackson meninggal dunia hari Kamis (25/6) tengah malam, setelah dilarikan ke University California Los Angeles Medical Center. Dia terjatuh akibat serangan jantung di dalam rumahnya di Holmby Hills, Los Angeles, pada siang harinya, dan dipastikan meninggal pada malam harinya. "Dia meninggal di rumah sakit akibat serangan jantung," ujar saudaranya Randy Jackson. Selama ini, Michael Jackson tak hanya dikenal sebagai bintang penyanyi pop, tetapi juga dikenal sebagai 'icon' kebudayaan pop, yang melawan perspektif rasisme sebagian publik Amerika, dengan keputusannya menjalani operasi penggantian warna kulitnya yang aslinya berkulit hitam menjadi kulit putih. Ia menyatakan bahwa warna kulit sesungguhnya bukanlah sebuah penentu dominasi dalam kebudayaan karena warna kulit bisa diubah. Oleh sebab itu, ia berharap semua orang bisa menerima perbedaan warna kulit. Sejumlah album legendaris Michael Jackson diantaranya adalah *Off the Wall*, *Thriller* dan *Bad*.

sia (LIPI) Syamsuddin Haris menyebut pernyataan Andi merupakan bentuk dukungan yang berlebihan. "Pernyataan Andi itu konyol. Dia akademisi, S-3, Phd. Pernyataan itu bukan hanya tidak etis, tapi

juga tidak cerdas. Terlalu percaya diri atau memang membabi buta. Dukung ya dukung, tapi ya jangan begitulah. Kayak bonek (bondho nekat/modal nekat) saja," kata Syamsuddin Haris (3/7).



Pilpres Satu atau

Pemilu Presiden (Pilpres) yang diikuti tiga pasangan diperkirakan akan berlangsung ketat dalam dua putaran. Namun pasangan SBY-Boediono melakukan berbagai cara, termasuk membiayai lembaga survei, untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Memang, jika Pilpres berlangsung dua putaran, pasangan Megawati-Prabowo atau Jusuf Kalla-Wiranto berpeluang memenangkan Pilpres.

Kampanye pemilihan presiden (Pilpres) diwarnai perang urat saraf, di antaranya tentang wacana, iklan dan gerakan Pilpres satu putaran saja. Tim Kampanye Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono menggelontorkan gerakan Pilpres satu putaran. Hal ini ditanggapi pihak pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto sebagai bentuk arogansi dan teror politik.

Pasal 6 ayat (3) UUD 1945 membuka kemungkinan Pilpres berlangsung dalam satu atau dua putaran. Pemenang Pilpres adalah apabila salah satu kontestan memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pilpres dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika di putaran pertama belum ada Capres-Cawapres yang memenuhi syarat ini, maka Pilpres dilanjutkan dengan putaran kedua yang hanya diikuti 2 kontestan peraih suara terbanyak putaran pertama.

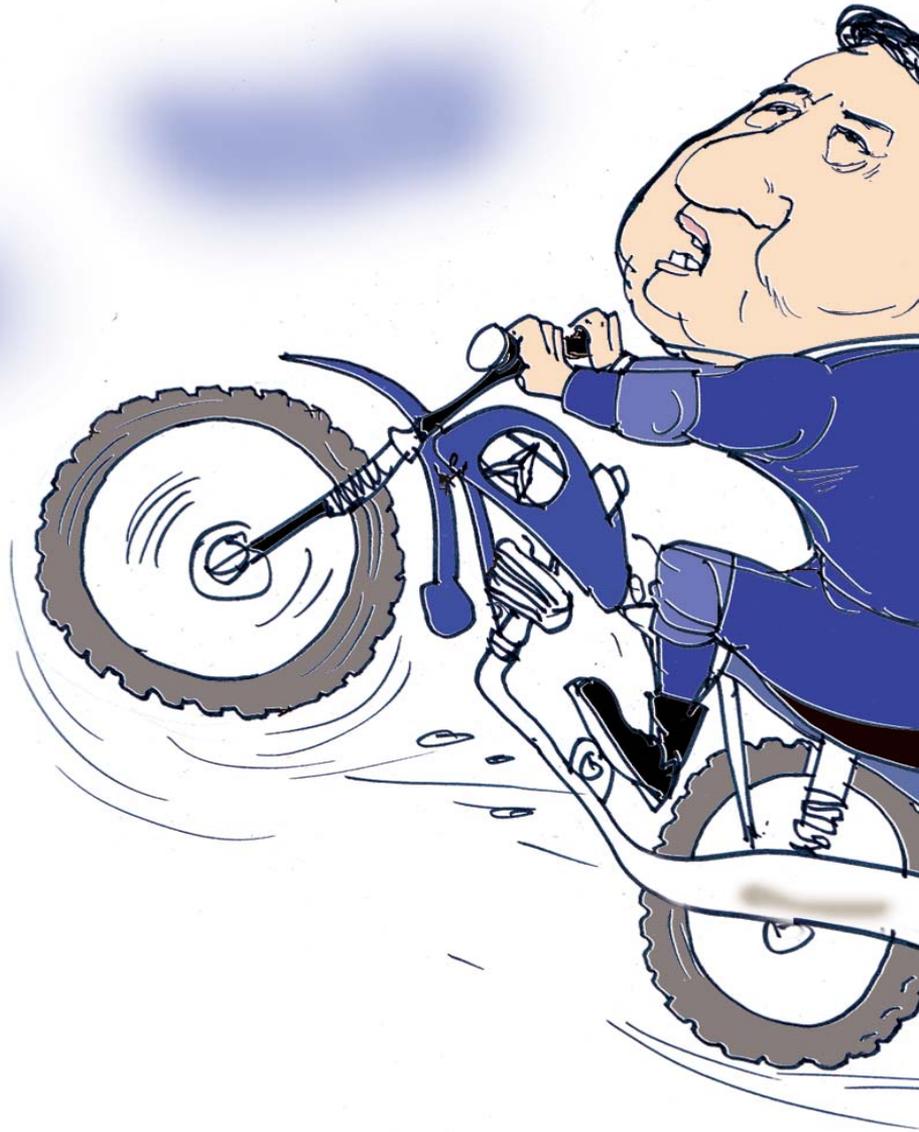
Keterpilihan dalam Pilpres tidak hanya harus meraih suara 50% plus satu tetapi juga harus memenangi sedikitnya 20% suara di setengah jumlah provinsi (17 dari 33 provinsi) di Indonesia. Jadi, memang, jika kontestan Pilpres lebih dari dua pasang, akan lebih mungkin Pilpres berlangsung dua putaran.

Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, Jumat (12/6) kepada pers menjelaskan, tidaklah mudah mencapai pelaksanaan Pilpres satu putaran. Selain syarat yang tak gampang, Pilpres yang tercantum di konstitusi memiliki filosofi yang tidak sederhana.

Imran menilai, survei yang dilakukan lembaga survei tidak mengacu pada semangat konstitusi soal aturan main dalam Pilpres, baik wacana tentang satu putaran maupun dua putaran. "Survei politik saat ini tidak mencerminkan UUD

1945 pasal 6a ayat 3," tegasnya. Menurutnya, sampel survei tidak mampu mengorek logika tentang aturan Pilpres satu putaran yang sesuai konstitusi. "Jadi tidak se-simple survei saat pemilu legislatif lalu," kata Imran.

Sementara, hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga, terutama Lembaga Survei Indonesia (LSI-1), mengindikasikan (menggiring opini publik) bahwa Pemilu Presiden (Pilpres) akan berlangsung satu putaran dan dimenangkan pasangan SBY-Boediono. Bayangkan,



Dua Putaran?



hasil survei LSI yang dilakukan pada 25-30 Mei 2009 itu, memosisikan elektabilitas SBY-Boediono sekitar 70%, sedangkan Mega-Prabowo 18%, dan JK-Wiranto hanya 7%. Survei dengan jumlah total responden sekitar 3.000 orang itu, margin error $-/+ 1,8\%$ dengan tingkat kepercayaan 95%.

Begitu pula hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI-2) pimpinan Denny JA, yang dilakukan 28 Mei-3 Juni 2009 di 33 provinsi juga memprediksi Pilpres 8 Juli 2009 berlangsung satu putaran.

Sekitar 63,1 persen responden akan memilih SBY-Boediono seandainya Pilpres diadakan pada hari survei dilakukan. Sementara yang memilih pasangan Megawati-Prabowo hanya 16,4 persen dan JK-Wiranto 5,9 persen, serta responden yang belum menentukan pilihan 14,6 persen. Survei dilakukan kepada 4.000 responden yang dipilih dengan metode *multistage random sampling* dengan wawancara tatap muka dan *margin error* sekitar 2,4 persen.

Dari survei LSI-2 ini diperoleh indikasi

bahwa pasangan SBY-Boediono unggul dalam tiga kriteria, yaitu respons pemilih terhadap figur calon, sentimen pemilih terhadap kondisi hidupnya, dan persepsi atas kinerja *incumbent*. Dalam kriteria figur, SBY sangat dikenal dan disukai masyarakat, serta sangat dianggap pantas menjadi pemimpin nasional. Nilai kesukaan responden terhadap SBY mencapai 89,6 persen, jauh di atas Megawati 59 persen dan Jusuf Kalla 57,2 persen.

Sementara dalam kriteria sentimen responden terhadap kondisi hidupnya, semakin puas, ia semakin cenderung memilih *incumbent*. Sebaliknya, makin tak puas, responden makin cenderung memilih oposisi. Sedangkan untuk kriteria ketiga, yaitu persepsi atas kinerja SBY, responden relatif puas dengan kinerja SBY kecuali dalam masalah penanganan tenaga kerja dan pengangguran.

Keunggulan SBY dalam tiga kriteria itu menyebabkan responden menunjukkan dukungan yang besar untuk pasangan SBY-Boediono. Sehingga, Direktur Riset LSI-2 Arman Salam dalam keterangan pers di Pisa Cafe Mahakam Jakarta, Kamis (11/6), memprediksi, jika tak ada blunder yang dilakukan oleh tim pemenang pasangan SBY-Boediono di sisa waktu menjelang Pilpres, pasangan nomor urut dua ini berpotensi menang dalam satu putaran.

Blunder-blunder itu, menurut Arman Salam, yang normatif saja, misalnya kasus korupsi, perempuan, yang sifatnya sosial kemasyarakatan, itu bisa memengaruhi cepatnya turun naik angka dukungan. Arman mengatakan, potensi Pilpres dimenangkan SBY-Boediono dalam satu putaran juga akan semakin besar jika tak ada program yang sangat luar biasa dari pasangan calon lainnya dan tak ada peristiwa yang sangat luar biasa dalam sisa waktu.

Namun timbul beragam respons atas hasil survei yang dianggap sebagai pesan tersebut. Kedua hasil survei itu dianggap pesanan karena Lembaga Survei Indonesia (LSI-1) mengaku dibiayai Fox Indonesia, pimpinan Rizal Mallarangeng dan adiknya, yang dibayar SBY-Boediono sebagai konsultan kampanye Pilpres 2009. Begitu pula Lingkaran Survei Indonesia (LSI-2), pimpinan Danny JA, atas nama Lembaga Studi Demokrasi (LSD) yang juga dipimpinnya, mengiklankan

gerakan Pilpres satu putaran dengan memasang foto SBY-Boediono, antara lain dengan alasan besarnya biaya Pilpres.

Sehingga, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris, mengkritisi pernyataan lembaga survei yang dengan optimistis memprediksi Pilpres akan berlangsung satu putaran. "Apalagi, setelah diketahui lembaga survei itu dibiayai salah satu pasangan calon. Kita butuh lembaga survei yang lebih independen," ujarnya di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (12/6).

Syamsudin Haris lebih sepekat jika Pilpres berlangsung dua putaran, sehingga legitimasi pasangan terpilih lebih kuat. Menurutnya, jika dua putaran, akan ada pergeseran koalisi, yang kalah pasti akan bergabung dengan dua pemenang lainnya, sehingga membuat barisan koalisi pasangan semakin kuat.

Sementara, mantan Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan UU sudah mengakomodasi jika Pilpres berlangsung satu atau dua putaran. Maka ia berpendapat, putaran Pilpres bukan mengikuti kehendak masing-masing calon. "Satu atau dua putaran bergantung pada rakyat. Yang menentukan semuanya adalah kehendak rakyat. Tidak bisa kita yang menentukan mau satu atau dua putaran," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Refly Harun, dari *Centre for Electoral Reform* (CETRO), mengatakan, putaran pertama Pilpres ibaratnya penajakan pasar. "Semua dagangan digelar. Syukur-syukur kalau ada yang laku 50 (persen) plus satu. Kalau tidak, ya gelar dagangan lagi di putaran kedua," ujar Refly.

Gerakan Pilpres Satu Putaran

Lembaga Studi Demokrasi (LSD) pimpinan Denny JA dan Konsultan Citra Indonesia (KCI) melakukan sosialisasi gerakan sosial "Pilpres Satu Putaran Saja" melalui aneka media, antara lain melalui kampanye media, lewat koran, TV dan radio. LSD dan KCI mendukung pasangan Capres-Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) pada Pilpres, 8 Juli 2009.

Iklan Pilpres satu putaran yang dimuat setengah halaman di media cetak itu dirilis hampir bersamaan dengan dipublikasikannya hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI-2), juga dipimpin Denny JA, yang menyebutkan 63,1% persen suara responden memilih SBY-Boediono.

Iklan yang memuat foto SBY-Boediono tersebut bisa digunting. Di situ tertera tulisan, "Ingin terlibat? Silahkan gantung stiker ini. Fotokopi semampunya. Bagikan kepada keluarga. Sebarkan kepada handai



SAMPAI SABANG: Wakil Presiden Jusuf Kalla, kandidat presiden dari Partai Golkar, meninggalkan Masjid Baiturrahman saat kampanye dengan becak motor didampingi gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Irwandi Yusuf (kedua dari kanan), di Banda Aceh, 13 Juni 2009.

taulan. Beritakan kepada para sahabat."

Denny menyebutkan ada tiga keuntungan bila Pilpres 2009 berlangsung satu putaran. Pertama, negara bisa berhemat Rp 2,8 triliun biaya untuk putaran kedua yang sudah dianggarkan KPU. Kedua, luka politik akibat kampanye di lapangan bisa dicegah tidak terlalu lama dan tidak mendalam. Ketiga, pemerintah bisa jauh lebih fokus menyelesaikan permasalahan bangsa karena tidak lagi terpecahkan oleh kepentingan politik seperti kampanye.

Bagi Danny dan LSD, gerakan ini sebuah perjuangan. "Itu perjuangan bung. Publik akan diuntungkan jika pilpres hanya berlangsung satu putaran," katanya. Denny menegaskan bahwa pihaknya ingin menjadikan gerakan ini menjadi gerakan masyarakat. "Pemilihan presiden terlalu penting jika hanya dikerjakan oleh partai politik dan politisi saja. Masyarakat banyak selayaknya terlibat aktif. Apalagi presiden yang terpilih masih sangat menentukan bulat dan lonjong nasib rakyat banyak," ujar Denny.

Menurut Denny, jika Pilpres berlangsung dua putaran, dikhawatirkan akan terjadi ketidakpastian dan ketegangan politik akan berlangsung lebih panjang. "Sementara polarisasi politik sangat mungkin akan lebih tajam. Pergeseran akibat persaingan akan lebih menimbulkan luka-luka politik, sehingga perlu waktu lebih lama untuk menyembuh-

kannya," katanya.

"Padahal, Indonesia butuh kepastian politik yang lebih cepat untuk mengatasi problem ekonomi nasional dan krisis ekonomi dunia," kata Denny. Oleh karena itu, Denny mengatakan, akan lebih baik jika pemilihan presiden 2009 ini selesai dalam satu putaran saja, dengan asumsi pasangan yang terpilih sudah mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen suara, sehingga Pilpres tak perlu berlanjut ke putaran kedua.

Denny optimis, dapat membuat gerakan sosial Pilpres Satu Putaran Saja terwujud dengan cara yang sangat mudah: "Bapak, ibu, saudara saudari, petani, nelayan, guru, mahasiswa, pedagang kecil sampai pengusaha, cukup mengatakan setuju untuk pilpres satu putaran."

Denny JA mengaku langkah itu ditempuh hanya untuk membujuk rakyat. Menurutnya, semua warga negara itu punya hak untuk membujuk sesuai dengan apa yang menjadi argumentasinya. "Saya melihat kalau Pilpres satu putaran itu justru lebih banyak menguntungkan rakyat dari pada ruginya," ujar Ketua Umum Gerakan Nasional 'Setuju Satu Putaran Saja' itu.

Gerakan LSD ini mendapat dukungan dari Konsultan Citra Indonesia (KCI). Direktur Eksekutif KCI Barkah Pattimahu mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk Pilpres satu putaran saja



foto: bangkabar.com

Ferry Mursyidan Baldan

karena selain KPU dapat menghemat anggaran Pilpres kedua sebesar Rp2,8 triliun dan publik diuntungkan, popularitas Capres SBY sangat mencolok sehingga ia mungkin terpilih kembali sebagai presiden hanya dalam satu putaran.

Dalam suatu acara dialog politik bertajuk Pilpres 2009 Satu Putaran: Fakta atau Fiksi, Senin (15/6), Barkah mengaku KCI merupakan konsultan politik gerakan nasional satu putaran saja. "Selaku konsultan, kami memimpin sebuah mesin politik untuk menggulirkan ide satu putaran ini seluas mungkin," kata Barkah Pattimahu.

Mendistorsi Kedaulatan Rakyat

Pandangan berbeda datang dari berbagai pihak menanggapi adanya gerakan dan iklan Pilpres satu putaran itu. Juru bicara Tim Sukses JK-Wiranto, Hajriyanto Yasseir Thohari, pengamat politik UI Rocky Gerung, Direktur Eksekutif Lembaga Riset Indonesia (LRI) Johan Silalahi, Indra J Piliang (anggota Tim Sukses Pasangan JK-Wiranto), Ganjar Pranowo (anggota tim Sukses Mega-Pro) menilai ajang Pilpres satu putaran justru mengebiri hak demokrasi rakyat, menandakan sikap arogansi kekuasaan, teror politik dan mengindikasikan ada upaya memanipulasi hasil Pilpres.

Juru bicara Tim Sukses JK-Wiranto, Hajriyanto Yasseir Thohari, yang juga anggota Komisi I DPR, menyatakan, iklan dan gerakan Pilpres satu putaran itu merupakan teror politik yang luar biasa sistematis, baik terhadap para pemilih maupun para Capres yang menjadi kompetitornya. Menurut Hajriyanto, selain merupakan teror politik, iklan Pilpres satu putaran, juga mendistorsi demokrasi dalam mengejawantahkan kedaulatan rakyat.

Dengan iklan itu, kata Hajriyanto, mereka ingin menggiring opini rakyat, bahwa memilih selain pasangan SBY-



foto: wifanews.com

Denny JA

Boediono adalah tidak memiliki arti politik apa pun alias mubazir. Ia menyayangkan iklan yang menggambarkan seolah-olah demokrasi itu pemborosan, bahwa jika Pilpres sampai dua putaran, maka itu hanya merupakan pemborosan semata.

Rocky Gerung, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), pada acara diskusi politik bertema Pilpres 2009 Satu Putaran: Fakta atau Fiksi di Jakarta, Senin (15/6) berpendapat, wacana Pilpres hanya akan berlangsung dalam satu putaran, menandakan sikap arogansi kekuasaan. Menurutnya, selain hanya didasarkan pada permainan statistik melalui lembaga-lembaga survei yang sudah dibayar, wacana Pilpres satu putaran juga mengindikasikan ada upaya memanipulasi hasil Pilpres. "Teori satu putaran ini terlalu sempurna untuk benar, saya kira ini bentuk kecemasan saja," ujar Rocky Gerung.

Rocky juga menilai kampanye Pilpres melalui iklan politik yang menyuarakan Pilpres satu putaran sudah melanggar etika riset. Pasalnya, iklan tersebut dibuat dengan mendasarkan pada angka-angka survei. "Ini sama saja menipu publik karena angka-angka statistik yang berupa dugaan tersebut kemudian dibuat menjadi kesimpulan yang dipaksakan," kata Rocky.

Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan hal itu pengebirian hak rakyat. "Upaya ini adalah kumpulan omong kosong yang dilembagakan," katanya. Menurutnya, iklan Pilpres satu putaran sangat tendensius dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Itu merupakan bentuk arogansi politik dari salah satu kandidat," ungkap Rocky.

Apalagi alasan satu putaran dihembuskan antara lain penghematan anggaran. Menurutnya, perlu ditelaah, apakah perlu penghematan anggaran yang sudah dialokasikan dan mengorbankan hak politik

rakyat?

Rocky berpendapat iklan tersebut lebih bersifat menghina pikiran politik rakyat. Sebab, pesta demokrasi seperti Pilpres seharusnya ditujukan untuk pendidikan politik warga negara. "Politik yang dikuasai oleh arogansi kekuasaan dan dikendalikan kekuatan kapital adalah politik yang merendahkan akal sehat warganegara. Keindahan demokrasi bukan pada monopoli kebenaran, tapi pada pertukaran kemungkinan," kata Rocky.

Dalam pandangan Rocky, kampanye Pilpres satu putaran lebih memuat reaksi kecemasan dari kemungkinan terjadi dua putaran. Sehingga tidak heran bila akhirnya ini opini publik terkesan sedang dikendalikan politik survei. "Satu putaran atau dua putaran, bukan itu soalnya. Ukuran sukses Pilpres terletak pada kemerdekaan warga negara untuk memakai haknya tanpa dicurangi. Menyenggarakan Pemilu sebagai upaya memungkinkan perubahan adalah pelajaran demokrasi paling utama. Itulah yang harus kita menangkan di hari-hari ini," ujar Rocky.

Pengamat politik Yudi Latif, dari Reform Institute, menambahkan iklan tersebut justru dapat menimbulkan citra buruk bagi SBY. Yudi melihat, bila ingin bermain cantik, seharusnya Denny lebih mengedepankan kampanye antigolput ketimbang wacana satu putaran. "Kalau pakai nalar publik tentu saja mengajak partisipasi rakyat menggunakan hak pilihnya jauh lebih baik. Tapi kalau dari nalar manipulatif, memang iklan satu putaran itu yang dianggap lebih menguntungkan," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Yudi berpandangan kampanye Pilpres satu putaran yang kini cukup masif dilakukan pendukung salah satu Capres tidak akan seefektif yang dibayangkan. Justru, menurutnya, kampanye Pilpres satu putaran hanya akan membuat efek perlawanan terhadap kandidat yang terus-terusan dicitrakan sebagai orang yang paling kuat dan tak tertandingi.

"Kalau terus-terusan dikampanyekan seperti itu, rasionalitas publik akan berubah. Orang jadi akan bersimpati kepada kandidat yang underdog antara JK dan Mega. Kampanyenya itu terlalu manipulatif, kalau terus dilakukan malah akan muncul sikap antipati kepada kandidat itu," kata Yudi.

Johan O Silalahi, Presiden Lembaga Riset Indonesia (LRI), menimpali Rocky dan Yudi, bahwa angan-angan pasangan SBY-Boediono untuk menang Pilpres satu putaran hendaknya dievaluasi. Johan mengungkap, survei yang dilakukan lembaganya menyimpulkan hasil yang berbeda dengan lembaga survei lain,



foto: inliah.com

Effendi Ghazali

termasuk LSI-1 dan LSI-2.

Hasil survei LRI, elektabilitas SBY-Boediono hanya 33,02 persen, JK-Win 29,29 persen dan Mega-Pro 20,09 persen. "Dari hasil ini, sangat sulit diprediksi karena masih ada 17,56 persen belum menentukan pilihan," kata Johan saat jumpa pers Survei Nasional Polling Presiden di Jakarta, Minggu (7/6).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan dengan modal 56 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 58 persen suara sah nasional, maka Pilpres akan dilaksanakan dengan satu putaran. "Ini bukan arogansi, bukan kesombongan, bukan kepongahan, bukan provokasi politik pada rakyat. Kita punya modal yang besar," tegas Anas se usai memberikan sambutan di hadapan kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kantor PKPI, Jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan, (Minggu, 14/6).

Anas menambahkan bahwa seluruh partai koalisi merasa yakin jika SBY-Boediono akan terpilih kembali satu putaran pada 8 Juli nanti. Indikasi ataupun keinginan tersebut, menurut Anas, dikarenakan Partai Demokrat dan 24 partai pendukung SBY lainnya memiliki modal yang sangat kuat. "Kita berharap, tanggal 8 Juli sudah ada presiden baru untuk periode 2009-2014," ujar Anas optimis.

Sehari sebelumnya, Sabtu (13/6), Anas Urbaningrum menegaskan, mengusahakan Pilpres hanya satu putaran akan memperkokoh legitimasi politik pemerintah. "Tetapi, kalau mesti dua putaran, atas kemauan rakyat, kami pun siap,"



DI TENGAH WONG CILIK: Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) melambai ke arah pendukungnya saat mereka mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres di Bantargebang, Jakarta, 24 Mei 2009

katanya. Anas yang juga anggota Tim Kampanye SBY-Boediono itu menambahkan, pihaknya sangat siap menghadapi situasi apa pun. "Satu atau dua putaran kami siap. Yang penting, jangan sampai ikhtiar yang demokratis untuk Pilpres satu putaran dianggap aneh dan bentuk arogansi," tandasnya.

Dalam kesempatan lain, Ferry Romawi, anggota tim sukses pasangan SBY-Boediono mengatakan pihaknya tidak pernah mengampanyekan untuk Pilpres satu putaran. "Kami tidak pernah menganjurkan kampanye satu putaran, tapi kalau ada pihak luar yang menganjurkan dan memberikan analisis untuk satu putaran, itu lebih baik. Agar proses demokrasi bisa segera selesai," ujar Ferry mencoba mengelak bahwa iklan tersebut dibiayai pihak tim kampanye SBY-Boediono.

Ketua tim kampanye nasional SBY-Boediono, Hatta Rajasa dalam pertemuan dengan para wartawan di Jakarta, Jumat (19/6) malam menegaskan, wacana Pilpres satu putaran bukan berasal dari tim kampanye nasional SBY-Boediono. "Sebetulnya muncul wacana satu putaran di masyarakat itu, bukan dari kami tapi dari poling. Lalu ada gerakan publik, misalkan di koran "pasar menginginkan satu putaran" mungkin pendapatnya adalah

anggaran bisa dihemat hingga Rp 4 triliun," kata Hatta.

Hatta juga menegaskan tidak betul pasangan SBY-Boediono menggunakan segala cara untuk memenangkan Pilpres mendatang. Hatta mengatakan strategi yang digunakan tetap dalam koridor aturan yang ada. "Tim kampanye SBY-Boediono ingin menang secara terhormat," katanya.

Pilpres Dua Putaran

Di tengah optimisme LSI-1 dan LSI-2 serta tim kampanye SBY-Boediono bahwa Pilpres akan bisa dimenangkan hanya dalam satu putaran, Presiden Lembaga Riset Indonesia (LRI) Johan O Silalahi sangat yakin Pilpres akan berlangsung dua putaran. "Saya jamin hal itu," kata Johan Silalahi. Ia mengatakan heran dengan hasil survei LSI yang mengatakan elektabilitas SBY-Boediono hampir mencapai 71 persen. "Saya geleng-geleng mendengarnya," ungkapnya dengan memberi gambaran, pada Pilpres 2004 saja SBY bersama JK hanya mendapat perolehan 60,1 persen.

Namun, Johan tidak ingin berpolemik mengenai metodologi dan angka-angka hasil survei. Sebab, menurutnya, survei hanya menggambarkan agregat politik di



NEOLIBERAL?: Capres dari Partai Demorat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kiri), isterinya Kristiani Yudhoyono (kiri), pasangannya cawapres Boediono (kedua dari kanan) dan isterinya Herawati melambai saat deklarasi mereka di Bandung 15 Mei 2009.

akar rumput. Tapi, yang jelas menurut Johan, elektabilitas SBY-Boediono semakin hari semakin tergerus dan berbanding terbalik dengan dua pasangan Capres-Cawapres lain, yaitu JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo.

Menurut Johan, tren elektabilitas SBY-Boediono terus menitik turun sejak berpolemik dengan PKS, kemudian isu neoliberalisme, dan pengungkapan realita politik dari Capres lain tentang apa yang terjadi di pemerintahan selama ini. Menurutnya, hal ini juga bisa dilihat dari pasangan Capres mana yang dalam kampanyenya selalu didemonstrasi, tim sukses siapa juga yang setiap hari sibuk menangkis gempuran kampanye pasangan calon lain?

Sementara itu, Capres Partai Golkar-Hanura Jusuf Kalla menilai wacana tersebut mencerminkan keangkuhan politik atau kesombongan penguasa. "Saya juga ingin menang satu putaran. Tapi itu menggambarkan keangkuhan politik atau kesombongan penguasa," kata Jusuf Kalla, Jumat (12/6). Jadi, katanya, biarkan rakyat yang menentukan satu putaran atau dua putaran. Jusuf Kalla percaya pada kecerdasan rakyat yang harus menentukan soal satu atau dua putaran untuk Pilpres. Jadi, tegasnya, bukan tim sukses Capres yang menentu-

kan. "Bagi saya yang lebih bernilai adalah menang secara jujur. Itulah pendidikan politik bagi rakyat yang menginginkan perubahan," kata Jusuf Kalla.

Hal senada dikemukakan Capres Megawati Soekarnoputri dalam orasi tanpa teks di Lapangan Senaman Mentikai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (15/6). Megawati menyatakan wacana Pilpres satu putaran adalah sebuah kesombongan. "Ada yang katakan Pemilu akan berjalan satu putaran. Seolah-olah tidak ada lawannya, saya katakan sombong sekali orang ini. Padahal, ada 3 pasang calon," kata Megawati.

Mega lebih yakin dan menyatakan lebih demokratis Pilpres berlangsung 2 putaran. "Lalu, mereka naikkan 70 persen, itu dari mana datangnya? Olahraga lompatan saja, harus berlatih setiap hari. Sekarang tanpa latihan bisa 70 persen, itu datangnya dari mana," Megawati memberi gambaran.

Pernyataan senada kembali dikemukakan Megawati saat berorasi dalam kampanye akbar di Lapangan Merdeka Medan, Selasa (17/6). "Pemilu belum dimulai kok sudah dibuat menang satu putaran. Saya tegaskan, kalau rakyat tidak bisa ditekan. Tidak bisa dipaksa untuk satu putaran," kata Megawati.

Mega mengatakan, rakyat harus diberi-

kan kebebasan memilih. "Jadi jangan sampai memperjualbelikan suara hanya untuk mewujudkan hasil survei yang dipaksakan untuk memenangkan pihak yang berkuasa saat ini," kata Mega.

Cawapres Prabowo Subianto juga tidak memercayai hasil survei LSI yang menunjukkan pasangan SBY-Boediono meraih sekitar 70% suara. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu yakin Pilpres 2009 akan terjadi dua putaran.

Prabowo mengaku punya alat ukur dan indikator tersendiri yang memang berbeda dengan hasil survei LSI. "Sudah banyak yang tahulah siapa yang berada di balik LSI. Jadi, nggak mungkin satu putaran, tetapi dua putaran," kata Prabowo usai meresmikan Front Persatuan Pendukung Prabowo (F-PPP) di Jakarta, Jumat (5/6).

Keyakinan akan berlangsung Pilpres 2009 dalam dua putaran semakin mengemuka dalam diskusi hasil survei yang dilakukan Soengeng Sarjadi Syndicate (SSS) di Jakarta. Terlihat ada tren dukungan terhadap pasangan SBY-Boediono terus menurun, sedangkan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto terus naik.

Survei Soengeng Sarjadi Syndicate dilaksanakan pada 5-9 Juni 2009 di 33 provinsi dan mencakup 137 kabupaten/kota dengan metode wawancara tatap muka

foto: mediaindonesia.com



Syamsudin Haris

terhadap 2.496 responden. Penarikan sampel *stratified random sampling*, dan responden dengan *simple random sampling*. Hasilnya, jika Pilpres dilakukan saat survei, pasangan SBY-Boediono mendapat dukungan 52,5%, Mega-Prabowo 24,4%, dan JK-Wiranto 20,2%.

Memang, jika mengacu hasil survei ini, Pilpres bisa dimenangkan SBY dalam satu putaran. Namun, koordinator survei SS Syndicate, Toto Sugiarto mengatakan, jika dibandingkan dengan berbagai hasil survei lembaga lain, pasangan SBY-Boediono mengalami penurunan tingkat elektabilitas. Menurutnya, beberapa faktor penyebab, antara lain komentar berbau SARA oleh salah satu tim sukses SBY, Ruhut Sitompul, dan komentar SBY soal pengusaha, serta isu Boediono neoliberal.

Toto mengungkap hasil survei SS Syndicate terkait evaluasi terhadap pemerintah, Wapres JK dipersepsikan lebih berperan 41,7%, daripada Presiden SBY 40,5%. Sementara perihal isu-isu populis seperti perekonomian prorakyat, Mega-Prabowo menang. Soal siapa yang berani menjadwal utang luar negeri, Mega-Prabowo 38,5%, SBY-Boediono 35%, dan JK-Wiranto 20,7%. Pasangan Mega-Prabowo juga dipersepsi punya program politik pertanian prorakyat 57,7%, SBY-Boediono 28,9%, JK-Wiranto 10,2%.

Pakar komunikasi politik UI, Effendi Ghazali, dalam diskusi tersebut, mengatakan, kampanye Pilpres satu putaran yang dilontarkan SBY-Boediono juga kurang cerdas karena memberi kesan jumawa dan arogan. Sedangkan Tamrin Amal Tomagola, sosiolog Universitas Indonesia, mengatakan kesenjangan elektabilitas *incumbent* dan penantang menyempit menjelang Pilpres akibat penantang dipersepsikan lebih prorakyat. "Bila ini berlangsung terus, Pilpres berlangsung dua putaran," prediksi Tamrin.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian menilai, pilpres dalam satu putaran sangat mustahil terjadi. "Berdasarkan realitas politik, ketiga pasangan capres-cawapres berpeluang sama menjadi pemenang. Siapa pun yang menang, tak mungkin diraih dalam satu putaran,"



SIBUK: Menjelang Pilpres 8 Juli 2009, kertas suara telah siap dicetak dan dikirim ke tiap TPS.

katanya kepada pers, Rabu (17/6).

"Kecuali kalau hanya dua pasang calon, maka Pilpres satu putaran sangat logis," kata Sebastian. Padahal ada tiga pasang, maka, menurutnya, gagasan Pilpres satu putaran sangat prematur. Menurutnya, kalau ini kampanye dari tim sukses, maka itu sesuatu yang sangat angkuh. Ia juga berpendapat, gagasan Pilpres satu putaran sangat membahayakan kemandirian masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. "Sangat berbahaya kalau publik sudah mulai tergoda dengan gagasan Pilpres satu putaran," tegasnya.

Pengamat politik UGM, Arie Sudjito menambahkan, kemunculan wacana dan iklan satu putaran hanyalah produk kampanye sebagai upaya untuk meyakinkan elektabilitas Capres-Cawapres. Ia mengimbau agar jangan terjebak isu

yang akhirnya mengaburkan substansi dan penajaman agenda krusial dari Capres-Cawapres bagi kesejahteraan rakyat.

Menanggapi hal itu, Jubir Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Max Sopacua, Selasa (16/6) meminta para kompetitor tidak berprasangka buruk terkait harapan kubunya untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran. "Kalau tertantang, silahkan berusaha gagalkan harapan dan keinginan kami itu. Jangan berpikiran negatif," katanya.

Ketua Umum Gerakan Nasional "Setuju Satu Putaran Saja", Denny JA menegaskan, Pilpres satu atau dua putaran bukanlah sesuatu yang melanggar aturan (SP, Rabu 17/6). Sebab, kata Denny, dalam konstitusi, peluang satu atau dua putaran dimungkinkan dan dua-duanya sama-sama demokratis. ■ **BI**

SBY Bisa Kalah di Putaran Kedua



Kampanye capres-cawapres Pilpres 2009 diwarnai aksi demonstrasi yang menuntut Indonesia berhenti menambah hutang luar negeri

Upaya SBY-Boediono memenangkan Pilpres pada putaran pertama, 8 Juli 2009, adalah strategi paling realistis. Pilpres putaran pertama adalah milik SBY-Boediono.

Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan didukung 24 partai politik itu diprediksi akan meraih suara paling banyak pada Pilpres putaran pertama dibanding dua pasangan Capres-Cawapres lainnya, Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Bisa dikatakan, Pilpres putaran pertama adalah milik SBY-Boediono.

Maka strategi paling realistis bagi SBY-Boediono, memang adalah berusaha memenangkan Pilpres pada putaran pertama, 8 Juli 2009.

Peluang SBY-Boediono memenangkan Pilpres satu putaran memang paling mungkin bila dibandingkan dengan peluang Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Hal ini terindikasi dari berbagai hasil

survei nasional. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI-1), 25-30 Mei 2009, memosisikan SBY-Boediono sekitar 70%, Mega-Prabowo 18%, dan JK-Wiranto 7%.

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI-2), 28 Mei-3 Juni 2009, memprediksi 63,1 persen responden akan memilih SBY-Boediono dan Mega-Prabowo hanya 16,4 persen, JK-Wiranto 5,9 persen, serta responden yang belum menentukan pilihan 14,6 persen.

Hasil survei berbeda dari Lembaga Riset Indonesia (LRI), menunjukkan elektabilitas SBY-Boediono hanya 33,02

persen, JK-Win 29,29 persen dan Mega-Pro 20,09 persen, serta 17,56 persen belum menentukan pilihan. Sedangkan hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (5-9 Juni 2009), SBY-Boediono 52,5%, Mega-Prabowo 24,4%, dan JK-Wiranto 20,2%.

Melihat tren yang diindikasikan berbagai hasil survei, dan pengamatan *Berita Indonesia* dari kenyataan lapangan (peta) politik setelah kampanye dimulai 2 Juni 2009, jika SBY-Boediono tidak berhasil memenangkan Pilpres pada putaran pertama, akan semakin sulit pasangan ini mengalahkan siapa pun dari pasangan Mega-Prabowo atau JK-Wiranto di putaran kedua. Bahkan bisa mungkin SBY-Boediono akan mengalami kekalahan pada putaran kedua.

Kemungkinan SBY-Boediono memenangkan Pilpres lebih terbuka pada putaran pertama dibanding pada putaran kedua. Kendati ambisi SBY-Boediono memenangkan Pilpres dalam satu putaran tidaklah mudah diwujudkan, karena kekuatan politik ketiga pasangan peserta yang cenderung makin berimbang. Namun, jika SBY-Boediono tidak berhasil memenangkan Pilpres pada putaran pertama, akan semakin sulit lagi menangkannya pada putaran kedua.

Tetapi hampir bisa dipastikan, pasangan SBY-Boediono akan lolos untuk mengikuti putaran kedua. Bahkan pasangan ini, menurut perkiraan *Berita Indonesia*, paling sedikit akan meraih suara 40 sampai 48 persen. Jika SBY-Boediono meraih suara di bawah 40 persen pada putaran pertama, kemungkinan kalah dalam putaran kedua akan semakin terbuka.

Sementara, peluang Mega-Prabowo dan JK-Wiranto memenangkan Pilpres dalam satu putaran sangat kecil, untuk tidak mengatakan tidak mungkin. Namun, kedua pasangan ini, memiliki peluang yang sama untuk masuk putaran kedua. Diperkirakan kedua pasangan ini akan meraih suara 15 sampai 35 persen pada putaran pertama. Dan, siapa pun di antara dua pasangan ini yang lolos ke putaran kedua akan mempunyai peluang mengalahkan SBY-Boediono.

Ada beberapa hal yang mendukung prediksi atau analisa ini. **Pertama**, hasil survei berbagai lembaga yang mengindikasikan adanya tren semakin menurunnya elektabilitas SBY-Boediono dan berbanding terbalik dengan semakin meningkatnya elektabilitas Mega-Prabowo dan JK-Wiranto.

Kedua, merebaknya isu aliran ekonomi neoliberalis yang dianut SBY-Boediono. Kendati hal ini telah dibantah dengan berbagai argumentasi dan menunjuk contoh adanya kebijakan yang



NOMOR TENGAH: Pasangan capres-cawapres, SBY-Boediono menunjukkan nomor urut mereka usai pengundian di KPU

prorakyat, seperti bantuan langsung tunai (BLT). Tapi, tampaknya penjelasan itu masih kurang kuat untuk menghalau isu neoliberalisme itu.

Ketiga, terjadinya blunder tidak satunya kata dengan perbuatan tentang etika kampanye, santun dan damai. Di antaranya, pernyataan Rizal Mallarangeng yang menyerang pribadi salah satu Cawapres, pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul tentang Arab yang tak pernah membantu Indonesia dan hal itu dinilai berbau Sara.

Keempat, pernyataan SBY-Boediono tentang kurang eloknya pengusaha jadi pemimpin (pejabat negara). Pernyataan ini mendapat reaksi, tidak hanya dari pengusaha, tetapi juga publik dan tim kampanye pasangan lain, terutama JK-Wiranto.

Kelima, SBY-Boediono dan tim kampanyenya, terlihat lebih sering membela diri, dengan mengemukakan kata-kata santun tetapi bahkan terkadang terasa oleh publik bernada sinis dan menyindir. Di antaranya, tentang *tagline* JK-Wiranto, lebih cepat lebih baik, yang selalu pula di-kick balik SBY-Boediono dengan lebih tangkas dan rileks. Di mata publik sudah tidak jamannya, biar lambat asal selamat. Juga tentang prorakyat dari Mega-Prabowo yang justru disikapi sebagai serangan kepada SBY-Boediono, bukan dengan memberikan argumentasi, bukti dan janji yang lebih prorakyat.

Keenam, pernyataan SBY yang terlalu berulang kali mengatakan ia tidak menungbar janji, pada saat ia juga bahkan menyatakan janji-janji. Pernyataan ini, malah menyegarkan ingatan publik tentang janji-janji SBY-JK pada Pilpres 2004.

Publik menjadi teringat (berdiskusi sesama) apakah janji-janji itu telah dipenuhi atau tidak. Akan lebih bijak membiarkan pasangan lain berjanji, biarlah rakyat yang menilai.

Ketujuh, iklan utang pada IMF lunas, yang pada Pemilu Legislatif masih efektif, telah menjadi sorotan setelah terungkap bahwa dalam hampir lima tahun terakhir utang luar negeri pemerintah bertambah hampir Rp400 triliun, rata-rata Rp 80 triliun per tahun dengan bunga komersial 12%-13% pula. Bukan pinjaman lunak dari lembaga internasional, seperti IMF, yang rata-rata bunganya hanya sekitar 4%-6%. Jumlah utang pemerintah meroket dari Rp.1.275 triliun pada Desember 2004 menjadi sekitar Rp.1.700 triliun pada 29 Mei 2009. Sehingga, rakyat, dari kakek sampai bayi baru lahir, harus menanggung kewajiban utang Rp 7,5 juta per jiwa.

Kendati hal ini sudah dijelaskan Menteri Keuangan dan tim kampanye SBY-Boediono dengan menyatakan bahwa melihat utang semata dari jumlah adalah menyesatkan. Mereka menganjurkan mencermati jumlah utang seraya membandingkannya dengan rasio produk domestik bruto (PDB). Sepuluh tahun silam (1999), rasio itu mencapai 100 persen, tahun 2008 sudah turun tajam menjadi 33 persen, dan akhir tahun ini diharapkan susut lagi menjadi 32 persen. Dikatakan, dilihat dengan cara itu, kemampuan pemerintah dalam membayar utang semakin meningkat.

Kedelapan, publik terhenyak setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat tahun 2008 kepada DPR, menyatakan bahwa BLT di-



ANTI-BOEDIONO: Para demonstran memprotes keputusan Presiden SBY yang memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai pasangan cawapresnya. Boediono dituding sebagai antek Barat dan KORAN singkatan dari Komando Rakyat Anti Neoliberalisme.

biayai dengan utang komersial berbunga 12%-13%. Hal ini memang telah dibantah tim kampanye SBY-Boediono bahwa BLT bukan dari utang.

Kesembilan, kampanye melankolis. Publik memang masih mudah terpengaruh dan merasa iba jika melihat pihak yang terpojokkan atau terzalimi. Tapi tampaknya tidak begitu mudah bagi publik meyakini bahwa seorang yang sedang berkuasa (*incumbent*) sedang dizalimi, dikeroyok dan diserang. Sehingga kampanye bernada melankolis, bagi SBY-Boediono tidak seefektif Pilpres 2004 lagi. Bahkan hal ini bisa menjadi blunder jika publik meyakini kecenderungan keberpihakan KPU kepada *incumbent* ditambah dukungan dari 24 partai politik.

Kesepuluh, intensitas kampanye pesaing, Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Faktor ini, justru hal yang paling berpengaruh. Apalagi jika kedua pasangan ini semakin giat menjanjikan dan mengampanyekan program aksi yang menyentuh

kepentingan hidup rakyat banyak. Sementara SBY-Boediono semakin terbawa arus sibuk membantah, seraya mengatakan bukan janji tapi bukti. Apalagi jika Jusuf Kalla semakin meyakinkan publik bahwa perannya sangat besar dalam pemerintahan saat ini khususnya pengambilalihan kebijakan pro rakyat dan hal-hal besar lainnya.

Kesebelas, bersatunya 'koalisi besar', Mega-Prabowo dan JK-Wiranto, mendukung siapa pun yang lolos putaran kedua. Apalagi jika JK-Wiranto yang lolos bersaing dengan SBY-Boediono, kekuatan Mega-Prabowo lebih cenderung akan lebih sepenuhnya mendukung dibandingkan dukungan barisan JK-Wiranto jika Mega-Prabowo yang lolos putaran kedua.

Semua faktor ini akan sangat berpengaruh pada menang kalahnya SBY-Boediono, baik dalam Pilpres putaran pertama, terutama pada putaran kedua. Menghadapi hal ini, terlihat kesan bahwa SBY-Boediono masih tetap tenang dan percaya diri akan memenangkan Pilpres

dalam putaran pertama.

Walaupun juru bicara Tim Pemenangan JK-Wiranto Yuddy Chrisnandi, Jumat (12/6), justru melihat gerakan Pilpres satu putaran itu justru mencerminkan kepanikan SBY menghadapi lawannya di Pilpres kali ini.

Namun yang jelas, Pilpres akan berlangsung ketat. Pengamat politik Bachtiar Aly memperkirakan, pada putaran pertama akan bertarung secara ketat antara JK-Wiranto dengan Megawati-Prabowo, untuk memperebutkan suara SBY-Boediono. Ia memperkirakan dukungan pada JK-Wiranto, semakin mendekati pasangan dengan nomor urut dua itu. "Saya memperkirakan apabila pada putaran kedua nanti yang bertarung adalah SBY-Boediono dan JK-Wiranto, maka ini akan menjadi pertarungan yang seru," ujarnya di Jakarta, Kamis (11/6).

Menurut mantan Dubes Indonesia untuk Mesir itu, meski JK terlambat dari SBY dalam persiapan Capres, namun belakangan lebih intensif dalam mengampanyekan program-programnya. "Hal tersebut membuat masyarakat semakin tahu akan kemampuannya," kata Bachtiar. Ia menunjuk ketika tampil dalam acara Kadin, JK tampil menarik dengan bahasa yang lugas dan cerdas.

Tingkat keterpilihan (elektabilitas) JK-Wiranto yang terekam dalam polling SMS yang dilakukan beberapa media hingga pukul 19.00 WIB, Rabu 17/6 dengan pertanyaan siapa capres dan cawapres pilihan Anda, terus meningkat. Elshinta.com merekam hasil yang diraih JK-Wiranto 41,57%, SBY-Boediono 37,26%, dan Mega-Prabowo 21,17%. Polling SMS yang dilakukan detik.com juga memperlihatkan keunggulan JK-Wiranto 40,967%,

Mega-Prabowo 31,822% dan SBY-Boediono 27,211%. Begitu pula polling SMS Kompas.com, JK-Wiranto 66,14%, SBY-Boediono 21,15% dan Mega-Prabowo 12,71%. Tempointeraktif.com juga menunjukkan JK-Wiranto 51%, SBY-Boediono 30%, dan Mega-Prabowo 19%.

Walaupun harus dicermati bahwa tingkat akurasi polling SMS ini sangat jauh dari kelayakan untuk dipercaya secara akademis. Polling SMS di internet ini hampir sepadan dengan terawangan para paranormal. Seperti pernyataan Sekjen DPP PKB Lukman Edy yang menegaskan Pilpres 2009 akan terjadi hanya satu putaran sesuai terawangan kyai. Menurut Edy, SBY menang satu putaran, berdasarkan survei internal dan kultur yang suka tanya-tanya kyai khos, kyai kunci PKB. "Berdasarkan terawangan kyai-an mereka, SBY menang 58%," kata Lukman yang saat ini menjabat Menteri Percepatan Daerah Tertinggal. ■ BI

Semua Bicara Prorakyat

Ketiga pasangan Capres-Cawapres berlomba berbicara, menebar visi-misi dan janji yang pro rakyat. Juga berlomba mengunjungi pasar-pasar tradisional. Ketiganya, terutama SBY-Boediono, ingin membuktikan tidak menganut ekonomi neoliberalisme.

Secara umum, visi ekonomi ketiga pasangan calon persiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto, memiliki kesamaan. Setidaknya, ketiga pasang Capres-Cawapres itu selalu menebar janji kebijakan ekonomi yang prorakyat, demi kesejahteraan rakyat.

Namun jika disimak, di antara ketiganya bisa ditarik garis pembeda. Paling tidak, antara lain, jika dibedah dari paparan ketiga Capres dalam dialog dengan Kadin, 20 Mei 2009, slogan-slogan mereka serta paparan pada saat kampanye.

Pasangan Mega-Prabowo lebih menonjolkan ekonomi kerakyatan, dalam azas kekeluargaan (gotong-royong) sebagai jati diri bangsa. "Kita harus bergotong-royong untuk membangun negeri ini. Para pengusaha mempunyai tempatnya. Rakyat, sebagai pelaku ekonomi mikro pun mempunyai tempatnya. Hanya saja mereka (rakyat) harus terbantuan, harus diangkat," kata Mega di hadapan para pengurus Kadin.

Visi Mega Prabowo 2009-2014 adalah: "Gotong Royong Membangun Kembali Indonesia Yang Berdaulat, Bermartabat, Adil Dan Makmur". Adapun Misinya: "Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat; Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan; Menyelenggarakan pemerintahan demokratis-konstitusional yang bersih dan efektif".

Dalam program aksinya, Mega-Prabowo menegaskan akan memperkuat ekonomi kerakyatan. Antara lain dengan cara menjadikan petani, nelayan, koperasi, serta usaha kecil sebagai subyek pembangunan melalui politik anggaran, instrumen perbankan dan memacu industri berbasis pertanian dan perikanan yang memiliki nilai tambah. Juga akan membuat Bank Khusus bagi petani, nelayan, pengusaha/pedagang kecil dan rakyat kecil lainnya, serta menuntaskan reformasi agraria agar rakyat dapat berpartisipasi secara luas di bidang ekonomi.

Mendorong daya beli rakyat melalui

skema jaminan sosial. Perlindungan petani dan perekonomian dari liberalisasi yang merugikan. Melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar swalayan berskala besar



BATIK: Capres Megawati Soekarnoputri memilih batik saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, 17 Juni 2009

yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Modernisasi pasar tradisional untuk pedagang kecil.

Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh dan buruh migran (TKI).

Mega-Prabowo juga berjanji akan melakukan moratorium utang dan menegosiasikan penjadwalan kembali setidak-tidaknya 50% kewajiban utang luar negeri, sehingga APBN dapat berfungsi untuk mendorong kegiatan ekonomi terutama sektor riil yang padat karya serta program-program di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, energi dan perbaikan lingkungan.

Juga akan meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perbankan yang pro sektor riil. Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi. Menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Meninjau kembali kontrak-kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional. Mewajib-

kan eksportir nasional yang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk menyimpan setidaknya 60% dana hasil ekspornya di bank dalam negeri. Dan, meningkatkan pendapatan per kapita dari USD 2000 menuju USD 4000.

Pasangan SBY-Boediono yang menonjolkan slogan "Lanjutkan!" selama ini telah menjalankan ekonomi yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. SBY menegaskan, ia dan Boediono bukan ultranasionalis dan bukan pula neoliberalis, tetapi menganut ekonomi jalan tengah

demi kesejahteraan rakyat. "Inilah manajemen ekonomi nasional. Kita tidak menganut paham neoliberalism. Kita tidak *full Washington consensus*. Banyak orang bicara neolib tapi *they don't understand* apa sesungguhnya neoliberalisme. Kita tidak, yang kita jalankan tidak," kata SBY di hadapan para pengurus Kadin.

"Anda tahu neoliberalisme dan *Washington Consensus* itu?" tanya SBY, yang kemudian dijawabnya: "Semuanya diserahkan pada pasar bebas. Pemerintah tidak boleh terlalu banyak mencampuri, subsidi itu ditabukan, diserahkan kepada *multinational corporation*, pada IMF, World Bank dan sebagainya. Bukan itu pilihan kita." Meskipun, menurut SBY, kaidah-kaidah efisiensi kita perlukan dalam sebuah pasar terbuka, tetapi campur tangan pemerintah juga diperlukan agar kita bisa memproteksi yang lemah, tapi semuanya juga bisa mengalir ke depan.

SBY berulangkali menangkalkan isu bahwa ia dan Boediono menganut paham ekonomi neoliberalis. Salah satu contoh konkrit yang selalu diunggulkannya

sebagai bukti keberpihakan kepada rakyat adalah program pemerintah dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Sementara, JK-Wiranto yang menonjolkan slogan "Lebih Cepat Lebih Baik" dengan tegas menyatakan akan menjalankan ekonomi kebangsaan yang mandiri untuk kepentingan seluruh rakyat. "Kami bertekad secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan hati nurani untuk membangun masyarakat yang adil, mandiri dan bermartabat dengan menjalankan ekonomi kerakyatan," kata Jusuf Kalla pada pernyataan politiknya saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Kalla, jika ingin melihat per-

oleh para elite neo-liberal, melainkan lebih ke pasar rakyat yang menggerakkan roda ekonomi riil. JK juga menonjolkan BLT yang merupakan inisiatifnya, sebagai bukti nyata kepedulian kepada rakyat. Program ini, katanya, jelas membantu jutaan rakyat kecil yang selama ini tak memiliki akses bantuan.

Dari pemaparan ketiga pasang Capres ini terlihat ada perbedaan satu sama lain. Pengamat ekonomi Avilliani sebagaimana dikutip detikFinance, Sabtu (23/5), menggambarkan kebijakan ekonomi Megawati-Prabowo agak ke kiri (neo-sosialis) dan SBY-Boediono lebih ke kanan (neoliberalis) serta JK-Wiranto agak berada di tengah-tengah.

Pasangan Mega-Prabowo, yang meng-

utamakan stabilitas makro ekonomi (untuk investor-investor asing di pasar modal saja) dengan target pertumbuhan ekonomi moderat 7%, menurut Avilliani, ini bisa merugikan kita. Karena itu SBI (Sertifikat bank Indonesia) asing tinggi, jadi buat dunia usaha tidak menguntungkan," ujarnya. Itu sebabnya, Avilliani melihat dari visi dan misi ekonominya, SBY-Boediono 'kanan'.

Pasangan JK-Wiranto yang mengusung ekonomi berkeadilan, dalam pandangan Avilliani, membuka kemungkinan investor asing boleh masuk tapi untuk kepentingan rakyat. Avilliani memandang pasangan JK-Wiranto yang paling realistis. "JK selama menjadi Wakil Presiden berani menjamin proyek-proyek infrastruktur seperti listrik 10 ribu MW dan juga infrastruktur lain. Ini jelas akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan dia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%," jelasnya.

Namun, pandangan Avilliani ini harus disikapi dengan pemikiran tidak sepenuhnya benar. Sebab, Mega-Prabowo juga menegaskan bahwa ekonomi makro, pengusaha besar (investor asing maupun dalam negeri) mempunyai tempatnya sendiri dalam azas kegotong-royongan dengan ekonomi mikro (ekonomi rakyat).

Begitu pula SBY-Boediono dengan gamblang menegaskan berbagai kebijakannya yang tidak sepenuhnya menganut ekonomi pasar, melainkan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi rakyat (kesejahteraan rakyat), antara lain dengan adanya subsidi dan BLT.

Jadi yang lebih penting, juga menurut Avilliani, adalah bagaimana agar janji serta visi dan misi yang diusung oleh ketiga capres itu haruslah dilaksanakan



IKAN: Capres Jusuf Kalla (tengah) dan isterinya Mufidah (kiri) berbicara dengan pedagang ikan saat mengunjungi pasar ikan di Kedonganan, Bali, 21 Juni 2009.

kembangan ekonomi rakyat maka bisa dilihat di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Tanah Abang, Klewer Solo dan lain-lain. "Rakyat harus terlibat penuh dalam perekonomian. Pasar-pasar tradisional harus dipelihara, diperbanyak dan digunakan sebagai penyangga perekonomian nasional," katanya.

Menurut Kalla, ekonomi rakyat harus dijalankan untuk kemajuan bangsa. Pengalaman krisis ekonomi beberapa tahun lalu menunjukkan ekonomi kerakyatan yang justru menyokong dan menyelamatkan bangsa. JK-Wiranto menegaskan sikap tak ingin bangsa Indonesia yang besar jatuh ke tangan kekuasaan asing, termasuk dalam soal ekonomi. Pasangan ini bertekad melakukan akselerasi pembangunan (lebih cepat dan lebih baik) dengan mengandalkan kemampuan sendiri (mandiri).

Pasangan ini juga menyatakan pro pasar, namun tidak semata pasar saham sebagaimana didengung-dengungkan



TEKSTIL: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri kemeja hijau), didampingi isterinya Kristiani Yudhoyono berbicara dengan pedagang tekstil di Pasar Tanah Abang, 11 Juni 2009.

target pertumbuhan ekonomi optimistis 10%, menurut Avilliani, tidak bagus juga, nanti tidak ada investor yang mau masuk karena seperti sosialis.

Sementara pasangan SBY-Boediono

setelah terpilih nanti, khususnya di bidang ekonomi, bagaimana menghadapi tekanan imbas krisis ekonomi global saat ini, serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. ■ MLP-BHS



Untuk mendapatkan BLT, penerima menunjukkan tanda peserta



Penerima BLT sedang antri berdesak-desakan

Kontroversi BLT dan U

Pasangan Capres incumbent, baik SBY maupun JK, sama-sama mengunggulkan program populis bantuan langsung tunai (BLT) sebagai andalan keberpihakan kepada rakyat miskin. Tak pengaruh, apakah sejak awal program BLT ini telah mengundang kontroversi.

Program BLT diluncurkan pemerintahan SBY-JK saat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dua kali pada Maret dan Oktober 2005. Program jaring pengaman sosial ini dibuat sebagai kompensasi untuk warga miskin. Sekitar 19,1 juta kepala keluarga diberi uang Rp100 ribu per bulan selama setahun, yang kemudian berlanjut sampai saat ini.

Walau belum ada penelitian mendalam, diyakini faktor BLT ini telah berpengaruh besar dalam mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat (partai yang dipimpin SBY sebagai Ketua Dewan Pembina) dalam Pemilu Legislatif, hingga keluar sebagai pemenang dengan meraih suara lebih 20 persen.

Tetapi, di lain pihak, perolehan suara Partai Golkar yang dipimpin JK sebagai Ketua Umum, justru jeblok 7 persen menjadi lebih 15 persen dari sebelumnya 22 persen pada Pemilu 2004. Padahal, menurut JK, sebagai Wakil Presiden, dia lah yang menggagas BLT. Oleh sebab itu, dalam kampanye Pilpres, ia pun beberapa kali mengungkap bagaimana ia mengambil inisiatif untuk menggelontorkan program BLT itu.

Sehingga, antara Capres SBY dan

Capres JK, terjadi saling berlomba mengunggulkan BLT sebagai bukti nyata keberpihakan kepada rakyat miskin. Walaupun di kalangan intelektual (cendekiawan) dan kalangan berpendidikan lainnya, timbul kontroversi apakah BLT mengurangi kemiskinan? Tapi, rakyat penerima BLT sudah terbantu, terpikat dan kecanduan menikmati uang tunai itu. Uang kontan

Rp.100 ribu sangat berarti bagi mereka. Mumpung ada kebijakan pemerintah yang populis, tak peduli apakah itu visioner dan mendidik atau tidak!

Program BLT, dalam pandangan pemimpin yang visioner dan kalangan terdidik, dinilai tidak mendidik masyarakat dan hanya mengentalkan mental pengemis warga miskin. BLT hanya menyodorkan ikan, bukan kail. Rakyat miskin tidak diberdayakan agar mampu keluar dari kemiskinan.

Selain kontroversial, dari segi mendidik kemandirian atau tidak, pelaksanaan program BLT itu juga tidak berjalan mulus. Bukan hanya karena dananya ada yang tidak utuh sampai ke tangan warga miskin, juga



Di satu sisi BLT menolong mereka yang berkekurangan, di sisi lain BLT membuat rakyat menjadi malas



Utang

telah memakan korban jiwa karena kelelahan atau terinjak-injak saat mengantre.

Namun, ketika Megawati mengkritisi program BLT, saat kampanye Pemilu Legislatif, malah menjadi bulan-bulanan. Hampir semua politisi, cendekiawan, profesor, ulama dan rohaniawan bungkam, terbawa arus populis dan pragmatis. Jadilah, arus opini publik bahwa BLT sebagai suatu kebijakan unggulan yang pro rakyat.

BLT dan Utang

Publik kemudian sedikit tersadar, ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat tahun 2008 kepada DPR, Selasa (9/6). Ketua BPK Anwar

Nasution BPK mengungkapkan program pemerintah dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) ternyata anggarannya berasal dari utang.

Ironisnya, utang itu termasuk utang komersial karena bunganya mencapai 12%-13%. Bukan pinjaman lunak dari lembaga internasional, yang rata-rata bunganya hanya sekitar 4%-6%. Rasionalitas publik semakin terganggu ketika menganggap program BLT itu dipakai sebagai kampanye keberhasilan pemerintah dalam pemilu.

Pemerintahan SBY pun dengan cekatan dan tegas membantah, tidak benar sumber dana BLT dari utang. Walaupun sebelumnya, Menko Kesra Aburizal Bakrie (10/6) sudah menjelaskan bahwa utang hanyalah salah satu sumber belanja pemerintah. "Program pemerintah itu berasal dari anggaran yang isinya dari berbagai sumber, yaitu komponen pajak, utang dan lainnya," katanya.

Menurut Aburizal, telah terjadi salah interpretasi dari BPK dalam memandang pola anggaran yang diterapkan pemerintah. Ical menjelaskan dalam menyusun pola budget, pemerintah memilih seluruh komponen, mulai pemasukan pajak, pendapatan lainnya, hingga utang, dicampur dalam satu paket.

"Pendapatan yang telah bercampur dalam satu paket budget itulah yang dipergunakan untuk belanja macam-macam, baik itu proyek pembangunan, termasuk pengucuran BLT bagi rumah tangga sangat miskin," ujar Aburizal sebagaimana dirilis berbagai media.

Kendati pemerintah sudah membantah, tapi perhatian publik sudah terlanjur tertarik ingin mengetahui kebenaran tentang utang pemerintah. Sebelumnya publik sangat senang melihat dan mendengar iklan yang menyatakan utang kepada IMF telah lunas. Memang benar, utang kepada IMF telah lunas dan CGI

telah dibubarkan.

Tetapi, ternyata pemerintah terus melanjutkan utang, justru dengan bunga yang lebih besar (komersial) berkisar 12%-13%. Malah bukan lagi pinjaman lunak seperti sebelumnya yang rata-rata bunganya hanya sekitar 4%-6%.

Dalam lima tahun terakhir, ternyata utang meningkat rata-rata Rp 80 triliun per tahun. Membengkak drastis Rp.400 triliun dalam empat setengah tahun terakhir, dari Rp.1.275 triliun pada Desember 2004 menjadi sekitar Rp.1.700 triliun pada 29 Mei 2009. Itu berarti setiap rakyat Indonesia, dari kakek sampai bayi baru lahir, telah terbebani utang Rp.7,5 juta per jiwa.

Bahkan, hanya dalam tempo lima bulan terakhir, utang pemerintah Indonesia naik Rp.64 triliun, dari Rp1.636 triliun pada akhir 2008 menjadi Rp.1.700 triliun pada akhir Mei 2009. Utang itu terdiri dari Rp.732 triliun pinjaman luar negeri dan Rp.968 triliun berupa surat berharga nasional (SBN).

Tereksposnya data tentang utang itu dengan cepat ditanggapi pejabat pemerintah dan anggota tim kampanye SBY-Boediono. Menurut mereka, melihat utang semata dari jumlah adalah menyesatkan. Mereka menganjurkan menyimak utang seraya membandingkannya dengan produk domestik bruto (PDB).

Dijelaskan, 1999, rasio utang-PDB kita mencapai 100 persen. Tahun 2008 sudah turun menjadi 33 persen, dan akhir tahun ini diharapkan susut lagi menjadi 32 persen. Dilihat dengan cara itu, tampaknya bahwa kemampuan pemerintah dalam membayar utang semakin meningkat. Menteri Keuangan yang juga Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati menilai kondisi utang pemerintah saat ini tak mengkhawatirkan seperti dituding oleh beberapa kalangan.

Namun penjelasan pemerintah ini dianggap kalangan pengamat ekonomi kurang pas. Disebutkan, di negara lain, utang dibandingkan dengan total cadangan devisa, total aktiva bersih pemerintah atau arus penerimaan pajak. Maka jika utang kita Rp 1.700 triliun, sedangkan cadangan devisa pemerintah hanya US\$ 58 miliar atau Rp 580 triliun dan penerimaan pajak cuma Rp 660 triliun, maka utang hampir tiga kali lipat cadangan devisa.

Padahal pada 2000, utang luar negeri kita US\$ 74,9 miliar atau 2,5 kali lipat cadangan devisa saat itu, US\$ 29,4 miliar. Tahun 2004, utang luar negeri naik menjadi US\$ 82,7 miliar, dan cadangan devisa bertambah menjadi US\$ 35,4 miliar. Sehingga perbandingannya dua kali lipat lebih. Maka, jika rasio ini yang dipakai, terlihat bahwa tingkat utang memang semakin mengkhawatirkan. ■ CRS



Bagi masyarakat kecil, beberapa lembar uang lima ribuan sangat terasa nilainya

Saling Melengkapi Sedikit Menyentil

Debat Capres Versi Indonesia



Debat tiga capres yang ditayangkan langsung dari Studio Transcorp, Trans TV

Rakyat boleh berharap bahwa demokrasi telah semakin menunjukkan habitatnya di Indonesia. Hal ini, antara lain, ditandai dengan suksesnya debat calon presiden (Capres), kontestan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, yang dilakukan sebanyak tiga kali. Meski belum menyuguhkan aksi saling sanggah antarkontestan secara intens, tapi setidaknya, (mungkin) itulah debat Capres versi Indonesia, tidak harus versi Amerika.

Debat Capres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu diikuti tiga peserta (Capres), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla (JK). Debat ronde pertama bertema mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menegakkan supremasi hukum. Dimoderatori Rektor Universitas Paramadina Dr. Anies Baswedan, berlangsung dalam empat sesi di Studio Transcorp, Jakarta, Kamis malam 18/6/09.

Pada sesi pertama diberikan kesempatan kepada ketiga Capres menyampaikan visi sesuai tema, masing-masing 10 menit. Sesi kedua, moderator mengajukan pertanyaan yang sama kepada ketiga Capres, masing-masing menjawab dalam dua menit. Sesi ketiga, moderator mengajukan satu pertanyaan berbeda kepada masing-masing Capres yang dijawab selama dua menit. Kemudian diberikan kesempatan satu setengah menit kepada Capres lain untuk menanggapi. Setelah itu, diberi kesempatan durasi satu menit

lagi kepada Capres yang giliran ditanya untuk memberi tanggapan. Setelah itu, sesi keempat, masing-masing Capres diberi waktu satu menit menyampaikan kata penutup.

Pada sesi ketiga, sebenarnya terbuka peluang saling adu argumentasi antar-capres. Namun, dalam debat pertama ini, tidak ada tanggapan yang berbeda (perdebatan), tetapi pendapat yang saling melengkapi. Barangkali, inilah formula baru debat Capres versi Indonesia.

Saat moderator mengajukan pertanyaan kepada Megawati berkaitan slogannya "Mega Pro Rakyat" khususnya tentang apa yang akan dilakukan untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia (TKI) apabila terpilih sebagai presiden. Megawati menjawab perlindungan kepada TKI harus diberikan terlebih dahulu di dalam negeri, melalui pelatihan dan kontrak kerja yang jelas, karena perlindungan setelah mereka berada di luar negeri lebih sulit untuk dilakukan.

SBY yang mendapat giliran pertama menanggapi, menyatakan setuju 200%

dengan Megawati bahwa perlindungan harus terlebih dahulu dilakukan di dalam negeri. "Saya setuju 200% dengan pandangan Ibu Megawati," kata SBY, lalu memberi tanggapan yang melengkapi tentang perlu perbaikan kerja sama yang baik di luar negeri.

Begitu pula JK mengawali tanggapannya dengan kalimat: "Tentu saya sependapat dengan Ibu Mega, karena itu saya lakukan juga ketika saya jadi Menko Kesranya." Lalu JK melengkapi dengan menekankan perlu ada MoU antarnegara dan lawyer di setiap kedutaan. Maka, ketika Megawati diberi kesempatan untuk menanggapi kembali komentar dua pesaing, yang mantan menternya itu, dia tersenyum dan hanya berkata singkat: "Ya, semua ngikut saya." Megawati pun mengatakan: "Cukup!"

Nyaris tidak adanya diferensiasi (perbedaan) pendapat antar-capres juga terlihat saat SBY ditanya berkaitan slogannya "Lanjutkan!" khususnya tentang kejahatan hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Menurut SBY, penyelesaian masalah HAM masa lalu tidak melulu masalah hukum. Karena, dalam beberapa hal ada kerumitan tertentu untuk menyelesaikan dugaan kasus HAM masa lalu. Maka, di masa pemerintahannya diusahakan dimunculkan adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun, hal itu tidak terwujud mengingat pembatalan UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, menurut SBY, ada pilihan lain dalam penyelesaiannya. "Truth and reconciliation, atau cara mirip itu bisa kita pikirkan bersama," katanya.

JK yang diberi kesempatan pertama menanggapi, langsung mengangguk. "Tentu saya setuju, karena saya masih wapres juga," katanya disambut tawa hadirin. Namun, JK menambahkan perlunya melihat ke depan. "Kalau lihat ke belakang saja, lihat kaca spion saja, tidak bisa maju," katanya. JK pun mengutip falsafah Mandela: *forgive but not forget*.

Megawati yang terlihat lebih santai, juga memberi tanggapan yang menghangatkan suasana. "Kalau JK bilang setuju, saya oposisi juga setuju," kata Megawati, seraya menegaskan, penegakan HAM tidak secara individu, tapi diselesaikan secara berbangsa dan bernegara.

Hal yang sama juga berlangsung ketika giliran Jusuf Kalla diajukan pertanyaan sesuai slogannya "Lebih Cepat Lebih Baik" khususnya tentang upaya untuk mem-



Jusuf Kalla tampak tertawa saat Megawati Soekarnoputri bersalaman dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

berantas pungutan liar. Kalla menjawab, harus ada standar kinerja dan penilaian terhadap para birokrat yang sering terlibat skandal pungli. JK menyatakan, menyelesaikan pungli perlu target dan performance. Misalnya, berapa lama penerbitan KTP, sehingga bila ada pelanggaran akan ketahuan. "Semua pelanggaran harus ada hukumannya, baik administrasi, pidana, atau pemecatan," katanya.

Begitu pula Megawati menyatakan setuju dengan Kalla. "He, he ... menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Kalla benar, karena harus mempertahankan slogan lebih cepat lebih baik," kata Megawati seraya tersenyum. Yang diperlukan, kata Mega menambahkan, kembali ke pembangunan mental bangsa. "Bila tidak, apa yang ingin dilakukan Pak Kalla, mungkin berjalannya tak lebih cepat dari yang diinginkan."

SBY menanggapi JK: "Saya setuju dengan Pak Jusuf Kalla. Pengawasan, disiplin, serta mekanisme *punishment and reward* harus diterapkan." Lalu SBY menambahkan, sosialisasi harus jelas. "Saya berterima kasih kepada Pak SBY dan Ibu Mega yang mendukung ucapan saya," kata Kalla menanggapi.

Debat Bersahabat

Perdebatan yang bersahabat. Dalam artian, pemaparan pandangan dengan saling melengkapi. Ketiga Capres terlihat saling menghormati. Apalagi SBY dan JK tampak masih memandang Megawati sebagai senior. Maklum, SBY dan JK, yang kini sedang menjabat presiden dan wakil presiden, pernah menjadi pembantu

presiden (Menko Polkam dan Menko Kesra) Megawati.

Acara debat Capres itu dimulai pukul 19.00. SBY datang lebih awal, sekitar pukul 18.45 WIB dengan memakai batik merah. Disusul, Kalla datang pukul 18.46 WIB dengan memakai jas hitam. Mega datang dua menit kemudian, pukul 18.48. Ketiganya saling bersalaman saat berada di ruang tunggu.

Debat itu disiarkan langsung Trans TV. Sayang, tidak disiarkan langsung TVRI, KPU tak memberi penjelasan. Sesi penayangan iklan, sangat dominan memotong-motong acara debat itu. Sangat terasa ada dominasi ekonomi pasar dalam penyiaran acara debat Capres itu. Sesi iklan, sangat terasa kurang pantas dan patut dalam acara seperti ini. Namun, sesi iklan itu rupanya digunakan para Capres beristirahat dan berdiskusi dengan anggota tim suksesnya.

Sesi pertama, tiap Capres memaparkan visi dan misi sesuai tema. Megawati, dipersilakan moderator tampil lebih dulu. Ia tidak terlihat memaparkan pandangannya dengan menggunakan teks. SBY yang tampil pada giliran kedua, tampak dengan teks di tangannya. Lalu Jusuf Kalla memaparkan visi juga tidak tampak menggunakan teks.

Masing-masing diberi durasi waktu 10 menit. Megawati dan SBY menyisakan 1 menit 30 detik dari alokasi waktu 10 menit. Sementara, JK menyisakan sekitar 2,5 menit.

Makin Menggelitik

Debat Capres 2009 berlangsung tiga

ronde. Ronde kedua dilakukan pada 25 Juni 2009 dengan tema: "Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran" dan dimoderatori pengamat ekonomi, Aviliani MSc. Dalam debat Capres kedua ini, ada beberapa hal yang menarik. Salah satunya, saat Jusuf Kalla (JK) menjawab pertanyaan moderator Aviliani mengenai bagaimana menaikkan tarif hidup rakyat. JK menegaskan dibutuhkan program ekonomi yang melindungi para petani untuk bersaing dengan produk impor. Lalu secara bergurau JK mengatakan: "Saya minta maaf *jingle* Indomie yang bapak (SBY) pakai. Jangan terlalu banyak makan gandum karena nanti impor gandum naik."

SBY yang mendapat serangan guyanan JK itu tampak agak tegang. Lalu saat mendapat kesempatan menjawab pertanyaan kedua, SBY membalas gurauan Jusuf Kalla. "Mungkin mi instan yang bapak makan itu 100% gandum, tapi mi instan yang saya makan itu terbuat dari sagu, singkong, dan sukun. Jadi kalau makan itu petani akan ikut tumbuh," kata SBY. "Nanti saya kirim ke rumah," seloroh SBY, sambil tertawa pahit. "Ya tolong dikirim," balas Kalla sambil tersenyum.

Sedangkan ronde ketiga, 2 Juli bertema: "NKRI, demokrasi dan otonomi daerah", moderator Dekan Fisip UGM, Prof Dr Pratikno. Dalam debat ronde ketiga ini, debat semakin menarik karena sejak sesi pemaparan visi, misi dan program, para capres sudah saling sentil.

Jusuf Kalla (JK) misalnya, mempersoalkan iklan 'gerakan satu putaran' yang dikampanyekan oleh kubu SBY. "Iklan Bapak (SBY), agar pilpres satu putaran, itu artinya demokrasi dengan pandangan uang."

SBY baru menanggapi kritik itu pada sesi debat. Sambil tertawa, SBY berkata, "Karena masih ada waktu, saya mau menanggapi Pak JK tadi. Iklan yang bapak maksud bukan iklan SBY. Saya bingung. Di satu sisi kita harus hemat biaya, ketemu KPU. Di satu sisi anggaran tak masalah. Saya jadi bingung mana yang harus diikuti. Intinya, demokrasi jangan terhalang apapun, meskipun harus ada akuntabilitas keuangan."

Mendengar jawaban SBY, JK nyeletuk, "Artinya iklan itu ilegal." SBY diam. Selanjutnya, JK mengingatkan, "Yang bisa satu putaran bukan hanya Pak SBY, tapi juga saya dan Ibu Mega."

Selain itu, juga diadakan Debat Cawapres dalam dua ronde. Ronde pertama, 18 Juni bertema: "Pembangunan jati diri bangsa," moderator Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof Komaruddin Hidayat. Ronde kedua, 30 Juni bertema: "Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia." Moderator Ketua Umum IDI, Dr dr Fachmi Idris. ■ BI

Prita Bukan yang Pertama

Kasus yang menimpa Prita Mulyasari, ibu dua balita, bukanlah cerita baru tentang perlakuan buruk rumah sakit terhadap pasiennya. Banyak pasien, karena lemah keuangan dan pendidikan, memilih bungkam dan pasrah. Sudah saatnya, para pasien belajar memahami betul apa hak dan kewajibannya bila berobat ke rumah sakit.

Kasus Prita Mulyasari yang digugat Rumah Sakit Omni International, Alam Sutra Tangerang, Banten cukup menyita perhatian dan emosi berbagai kalangan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, masyarakat umum, bahkan para capres. Betapa tidak, ibu dua anak yang merasa tidak puas dan dirugikan oleh pelayanan Omni International ini, sempat mendekam di penjara selama 22 hari dan menjadi tahanan kota selama 8 hari.

Itu dikarenakan surat elektronik (e-mail) yang berisi curahan hatinya kepada rekan-rekannya. E-mail itu akhirnya menyebar luas dan berbuntut panjang. Melihat isi e-mail itu, pihak Rumah Sakit Omni International menganggap telah terjadi pencemaran nama baik. Soalnya, beberapa kalimat dalam surat elektronik itu berbunyi "Bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan RS dan title International karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat dan suntikan". Prita juga menulis, manajemen Omni pembohong besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang. Ada juga kalimat, tapi apabila nyawa manusia dipertainkan oleh sebuah RS yang dipercaya untuk menyembuhkan malah mempermainkan sungguh mengecewakan.

Dr Hengki, dokter yang menangani Prita saat berobat di RS Omni, kemudian melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada September 2008. Pada 22 Desember 2008, Prita mulai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti cetakan surat elektronik (e-mail) yang disebarluaskan di internet. Setelah dokumen pemeriksaan dua kali dinyatakan P19 atau kurang lengkap, pihak kepolisian akhirnya melimpahkan berkas pemeriksaan Prita ke Kejaksaan

Negeri Tangerang pada 30 April 2009. Di sinilah mulai terjadi kejanggalan.

Kejaksaan sepertinya sangat aktif dalam kasus ini. Prita ditahan di LP Wanita Tangerang pada 13 Mei 2009. Pasal yang menjerat pun bertambah. Tidak hanya pasal pencemaran nama baik, tapi juga pasal 45 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda satu miliar rupiah.

Selanjutnya, Prita harus mendekam selama 2 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Tangerang. Dan baru pada awal Juni lalu, ia dibebaskan bersyarat, berubah status menjadi tahanan kota, hingga akhirnya dibebaskan. Terhitung sejak Senin 15/6, Prita sudah kembali bekerja sebagai Kepala Layanan Pelanggan Kantor Kas Bank Sinar Mas, Apar-



temen River Side, Jalan Pluit Karang Barat, Jakarta Barat.

Soal betapa aktifnya Kejaksaan menangani kasus Prita ini, akhirnya berujung pada pencopotan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Dondy K Sudirman dari jabatannya. Sebelumnya, Tim Pengawasan dari Kejagung memeriksa Dondy terkait kasus Prita. Sebab diduga, pihak kejaksaan baik Kejaksaan Tinggi (Kejati)



Prita sedang mengikuti sidang gugatan yang dilakukan Rumah Sakit Omni International

foto: vivanevs.com



Banten maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang berhubungan dengan pihak RS Omni, sebelum menjebloskan Prita ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang. Salah satu dugaan itu karena ada layanan kesehatan gratis berupa medical check up dan pap smear bagi karyawan Kejari Tangerang.

Setelah dibebaskannya Prita, kuasa hukum Prita, Samsu Anwar mengatakan,

pihaknya tengah menyiapkan gugatan balik perdata terhadap RS Omni dan gugatan pidana terhadap dokter Henky Gozal dan dr Grace. Kuasa hukum tergugat menyangkan ketidakprofesionalan pelayanan rumah sakit yang terkesan tidak akurat dan terburu-buru. Buktinya adalah perbedaan hasil pengujian sampel darah.

Selain itu, kuasa hukum Prita juga

menyesalkan sikap rumah sakit yang tak kunjung memberikan informasi, hasil diagnosa dan tindakan medis apa yang akan dilakukan kepada Prita. Merujuk pada UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No 1419/Per/X/2005 mewajibkan dokter memberikan penjelasan yang lengkap kepada pasien ketika melakukan tindakan medis. Berdasarkan fakta dan dasar hukum itu, kuasa hukum Prita mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan menuntut ganti rugi yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Kasus yang serupa juga menimpa keluarga almarhum Abdullah Anggawie. Rumah Sakit Omni Medical Center yang satu grup dan satu pemilik dengan RS Omni International melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kegagalan pihak keluarga memenuhi kewajiban pembayaran biaya selama dirawat di sana.

Sejak dirawat sampai akhirnya meninggal dunia, keluarga pasien, yakni Tiem F Anggawie dan Joesoef Faisal, termasuk penjamin (PT Sinar Supra Internasional) harus membayar tagihan sebesar Rp 552,2 juta. Dari total itu, pasien belum membayar sebesar Rp 427,2 juta. Selain itu, RS Omni menuntut pembayaran bunga sebesar 6 persen per tahun dari total tagihan senilai Rp 552,2 juta.

Keluarga menolak membayar dengan alasan tidak mendapatkan keterangan medis dari RS Omni maupun perawatan untuk almarhum. Mereka juga menilai jumlah tagihan itu tidak wajar. Misalnya, tagihan cuci darah dibebankan selama satu bulan secara terus menerus. Selain itu, tagihan tabung oksigen dikenakan setiap hari. Sedangkan tagihan resep dokter setiap hari selalu berubah.

Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, Ketua Majelis Hakim Reno Listowo pada Senin, 15/6, memutuskan menolak gugatan RS Omni Medical untuk seluruhnya. Dalam pertimbangan putusan, majelis sepakat dengan keluarga pasien sebagai tergugat. Majelis menyatakan, RS Omni seharusnya tidak menutup-nutupi dan memberikan informasi sesuai dengan kewajiban.

Tercoreng

Munculnya kasus gugatan hukum antara rumah sakit dan pasien jelas mencoreng dunia kedokteran Indonesia. Sekjen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Zainal Abidin, mengakui saat ini terjadi perubahan hubungan antara dokter dan pasien. "Bukan saja rumah sakit menggugat pasien, tapi bisa dokter menggugat pasien, jika merasa dicemarkan nama baiknya," katanya.

Menurut Zainal, banyak yang harus diperbaiki dalam dunia kedokteran,



Para kaum ibu mendukung pembebasan Prita Mulyasari

seperti kualitas dokter, pelayanan rumah sakit, dan penegakan hak-hak pasien, yang diatur dalam UU No 29/2004. Dalam UU itu disebutkan lima hak pasien, yaitu hak mendapat penjelasan lengkap tentang tindakan medis, hak meminta pendapat dokter, hak mendapat layanan sesuai dengan kebutuhan medik, hak menolak tindakan medis, dan hak mendapat rekam medis.

Sementara itu, menurut pengurus sekaligus pengacara publik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, pada prinsipnya hak seorang pasien tak jauh berbeda dengan seorang konsumen. Karena itu, lanjut Sudaryatmo, pasien juga berhak mendapatkan informasi dan pelayanan jasa yang jelas serta menjamin keamanan pasien. "Selain itu, pasien juga punya hak prosedural seperti bagaimana proses penyelesaian jika ada sengketa dan mendapatkan advokasi."

Sebagai pelaku usaha, rumah sakit juga harus menyediakan mekanisme penampungan keluhan yang bagus. Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu,



Megawati mengunjungi Prita Mulyasari

pertama terbukanya akses pasien untuk menyampaikan keluhan, baik berupa kotak saran, complain center, sms, e-mail atau faksimili. Syarat berikutnya adalah jelasnya mekanisme penanganan keluhan seperti siapa yang bertanggung jawab,

tahapan apa saja yang harus dilalui dan berapa lama keluhan itu diproses. Syarat terakhir adalah adanya kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan bagaimana hasil penanganan keluhan itu kepada konsumen.

Surat Elektronik Berbuah Bui

Jeratan hukum atas Prita bermula saat ia menjadi pasien di RS Omni International Tangerang, 7 Agustus tahun lalu. Lewat surat pembaca yang dikirimkan pada salah satu media internet pada 30 Agustus, Prita menceritakan penyebab keluhan atas RS Omni.

Prita menyebutkan, sekitar pukul 20.30 WIB, dengan kondisi panas tinggi dan pusing, ia mendatangi RS Omni. Ia kemudian diminta ke bagian Unit Gawat Darurat (UGD) untuk mendapatkan pemeriksaan. Suhu badan Prita tercatat 39 derajat. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan darah, kadar sel darah merah atau trombosit Prita adalah 27 ribu. Sedangkan kondisi normal trombosit manusia adalah 150 ribu sampai 300 ribu.

Dari hasil itu, dokter RS kembali melakukan tes ulang atas trombosit Prita dan hasilnya tetap sama. Akhirnya Prita diwajibkan rawat inap. Dari referensi dokter umum jaga saat itu, dr Hengki akhirnya menangani Prita. Dokter itu menyatakan, ibu dua anak balita itu positif menderita demam berdarah dan harus mendapat tindakan medis seperti infus dan suntikan.

Keeseokan hari, dr Hengki kembali mendatangi Prita dan menginformasikan adanya revisi hasil lab atas trombosit sebelumnya, dari 27 ribu menjadi 181 ribu. Mengetahui hal itu, Prita langsung menanyakan sakit apa yang sebetulnya ia derita. Jawaban diterima tetap sama, yakni demam berdarah. Pada hari itu, Prita kemudian menerima sejumlah suntikan. Karena khawatir atas kondisi dirinya, ia mengaku menanyakan alasan diberikan tindakan medis itu, tapi tidak

ada keterangan memuaskan. Tangan kiri istri Andri Nugroho ini mulai membengkak. Ia lalu minta tindakan infus dan suntikan dihentikan serta meminta bertemu dr Hengki. Namun, hingga ia dipindah ke ruangan lain, dokter bersangkutan tidak menampakkan batang hidungnya.

Suhu badan Prita kembali naik 39 derajat. Saat itu, dokter jaga atau pengganti datang menemuinya dan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, ia meminta Prita untuk menunggu dr Hengki saja.

Sehari setelahnya, dr Hengki datang pada sore hari dan memerintahkan ke suster, memberikan suntikan dan memasang infus lagi di tangan kanan. Prita kembali menanyakan keluhan sakit yang dideritanya. Dokter itu menjawab, Prita terkena virus udara. Sabtu malam, Prita kembali mendapatkan suntikan dua ampul sekaligus dan terserang sesak napas selama 15 menit. Untuk mengatasinya, ia diberikan oksigen. Dokter jaga hanya memintanya untuk menunggu dr Hengki.

Tangan kanan Prita juga mengalami pembengkakan seperti tangan kirinya. Akhirnya Prita memutuskan meminta perawat tidak lagi memberikan infus, suntikan dan obat. Esoknya, ia dan keluarga meminta dr H untuk bertemu, tapi janji bertemu selalu diulur dan baru datang malam hari.

Saat itu, suami dan kakak Prita meminta penjelasan dr Hengki mengenai sakit yang diderita, revisi data medis trombosit yang awalnya 27 ribu menjadi 181 ribu, dan serangan sesak napas. Dari pengakuan Prita, dr Hengki tidak memberikan

penjelasan memuaskan. Ia bahkan menyalahkan bagian lab. Putus asa atas pelayanan dan keterangan dari dokter dan RS, Prita memutuskan pindah ke RS lain keesokan harinya. Namun, ia membutuhkan data medis lengkap dari RS Omni.

RS Omni kemudian memberikan data catatan medis. Namun dalam data medis itu, hasil lab yang diberikan adalah hasil trombosit yang 181 ribu bukan 27 ribu. Prita kemudian memintah pihak RS juga memberikan data hasil lab yang 27 ribu tapi tidak diberikan. Dari serangkaian kejadian tidak memuaskan itu, Prita kemudian mengajukan keberatan kepada manajemen RS Omni. Namun ia menilai tanggapan yang diterimanya tidak memuaskan. Akhirnya ia memutuskan menulis kasus medis yang dialaminya lewat e-mail kepada 10 temannya. Tujuannya agar kasus medis yang menyimpannya tidak dialami orang lain. Namun, e-mail Prita itu kemudian menyebar ke sejumlah milis hingga tersebar ke banyak orang.

Dari milis itu, RS Omni mengetahui dan merasa dirugikan. RS bertaraf internasional ini kemudian menggugat Prita dengan pasal pencemaran nama baik. Prita digugat secara perdata dan pidana. Berdasarkan hasil putusan perdata PN Tangerang 11 Mei lalu, ia divonis membayar denda senilai Rp 261 juta. Denda itu terdiri atas kerugian materiil Rp 161 juta dan nonmateriil Rp 100 juta. Selain itu, 3 Juni lalu, kuasa hukum RS Omni menyebutkan, siap mencabut gugatan bila Prita tidak lagi meminta data medis trombosit 27 ribu. Selain itu, Prita juga harus mengakui kesalahannya. ■

Menurut pandangan pribadi Sudaryatmo, seorang pasien tak bisa disebut mencemarkan nama baik rumah sakit jika sebelumnya sudah mengadukan keluhannya secara langsung. "Kalau dia belum mengadukannya, terus langsung mengungkapkannya kepada publik, itu berpeluang sebagai pencemaran nama baik." Sikap pelaku usaha yang terlalu defensif atas keluhan konsumen dan bahkan menyerang balik konsumen dengan gugatan, sebenarnya merugikan kedua pihak. Konsumen bakal trauma dalam menyampaikan saran dan usulan. Sementara pelaku usaha bisa kehilangan masukan yang konstruktif demi perbaikan kualitas layanannya.

Kritik juga disampaikan Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana. Menurutnya, pihak kejaksaan dan kepolisian berlebihan dalam menyikapi kasus Prita. Ibu dua balita itu seharusnya tidak perlu sampai harus mendekam puluhan hari di tahanan.

Menurut Erlangga, seseorang bisa ditahan apabila ada unsur berbahaya dari tersangka itu. Sebagai contoh, tersangka pencurian bisa ditahan bila dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Ia berpendapat, keluhan Prita hanya merupakan bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat dan dilindungi UUD. Terlebih UUD menjadi panduan tertinggi bagi UU lain. Karena itu, penanganan hukum atas seseorang tidak boleh ber-



Berbagai media di Tanah Air sangat menyoroti kasus yang dihadapi Prita Mulyasari

tentangan dengan UUD itu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mempunyai pendapat tersendiri. Lembaga ini menilai, penggunaan Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada kasus Prita justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana disebutkan, saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan,

kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Menurut Komisioner Bidang Hukum Diseminasi dan Humas LPSK Lies Sulistiani, Prita adalah orang yang secara faktual mengalami dua kali viktimisasi. Prita dirugikan akibat suatu tindakan medis. Kedua, Prita dirugikan karena proses peradilan yang tidak cermat sehingga membalikkan posisi faktualnya sebagai korban yang saat ini justru secara yuridis berada dalam posisi terdakwa.

■ MLP

Kisah Sedih Jered-Jayden

Belum selesai kasus Prita, muncul lagi 'Prita baru' korban RS Omni International. Juliana, orangtua bayi kembar Jayden dan Jared melapor ke polisi dan mendatangi OC Kaligis untuk meminta bantuan hukum. Anaknya, Jayden Christophel, buta setelah dirawat di rumah sakit tersebut.

Ceritanya berawal pada 26 Mei 2008, Juliana melahirkan sepasang anak kembar lelaki yang diberi nama Jered Christophel dan Jayden Christophel dengan kondisi belum cukup usia kandungan (prematuur), yakni 33 minggu. Karena lahir prematur, dokter yang menangani memutuskan bayi kembar ini dimasukkan ke inkubator. Namun beberapa minggu kemudian, kedua anaknya mengalami gangguan di bagian matanya. Menurut Juliana, ketika itu tidak ada dokter spesialis yang menangani kedua bayinya hingga mengalami kebutaan.

Juliana lalu membawa kedua buah hatinya itu ke rumah sakit di Australia. Dokter di Australia mengatakan, kerusakan mata anaknya diduga akibat penanganan yang tidak benar terhadap bayi prematur. Selain itu, kedua anaknya juga over oksigen ketika dimasukkan ke dalam inkubator sehingga sarat mata Jayden lepas dari

retina karena kelebihan oksigen saat di inkubator. Sudah stadium empat.

Setelah sebulan di negeri kangguru itu, Juliana dan kedua bayinya kembali ke Indonesia. Lalu dengan berbekal berbagai dokumen pemeriksaan para dokter di Australia, dirinya mendatangi RS Omni International untuk meminta catatan medis bayinya selama ditangani rumah sakit itu. Namun permintaannya selalu ditolak. Pada pertengahan April lalu, pihak RS Omni memang sempat meminta bertemu dengan Juliana dan suaminya. Dalam pertemuan itu, manajemen memberi penjelasan tentang kondisi Jared dan Jayden selama dirawat. Namun, pihak RS tetap menolak memberi catatan medis kedua anaknya.

Bahkan melalui majelis etika pihak RS Omni yang dijawab lewat surat menyatakan mereka tidak bersalah dan telah melakukan prosedur yang benar. Jawaban ini membuat ibu yang malang ini meminta pengacara senior O.C. Kaligis untuk membantu kasusnya sekaligus melaporkannya ke Polda (10/6). Dalam laporannya, RS Omni dituduhkan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat.

Menanggapi hal ini, manajemen Omni Internasional Alam Sutera menyatakan pihaknya sudah berbuat maksimal terhadap pasien Juliana dan kedua anak kembarnya. Kerusakan mata pada si kembar Jayden Christophel dan Jared Christophel sudah pernah dikomunikasikan dengan Juliana.

Namun, hal ini dibantah oleh Juliana. Memang benar dokter telah menyampaikan soal gangguan mata pada kedua anaknya, "Tetapi, hanya sebatas mengatakan, anak saya mungkin akan memakai kacamata".

Oleh sebab itu, Juliana menduga, RS Omni tidak memiliki standar prosedur operasional (SOP). Sebab, kalau RS itu memiliki SOP, seharusnya ia diberitahu tentang ROP (Retinopathy of Prematurity), yaitu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada mata kedua anaknya.

Dengan pemberitahuan itu, dirinya bisa lebih cepat mengantisipasi keadaan sehingga penyakit mata anaknya tidak bertambah parah. Seharusnya, kedua anaknya dirawat lebih intensif selama perawatan. "Ini kok bisa, dokter meninggalkan perawatan kedua anak saya hanya untuk mengikuti seminar di Surabaya (maksudnya dokter FL)," tegas Juliana. ■



Goyah Setelah 100 Tahun

Raksasa otomotif di AS dan dunia, General Motors (GM), ikut terseret arus krisis finansial global sehingga terpaksa mengajukan perlindungan kepailitan. GM yang menjadi simbol kebesaran ekonomi Amerika berusaha bangkit di bawah kepemilikan pemerintah.

Siapa yang tidak mengenal GM? Perusahaan otomotif raksasa di AS ini sanggup hidup selama 100 tahun terakhir dengan segudang prestasi. Bahkan selama 77 tahun pernah menjadi produsen mobil terbesar di dunia, sebelum dua tahun terakhir disalip produsen mobil Toyota asal Jepang.

Perusahaan yang didirikan William C. Durant pada 1908 di Detroit itu bahkan menjadi simbol inovasi industri kendaraan di negeri Paman Sam. Bahkan, GM berhasil mentransformasi kota kecil itu menjadi masyhur dengan nama Silicon Valley, serta ratusan ribu warga AS yang menjadi kayawannya masuk kategori kelas menengah.

GM pun makin menggurita. Dalam satu abad perjalanannya, jaringan-jaringan pabrik manufaktur bermunculan di berbagai negara. Mulai dari daratan Eropa seperti Jerman, Inggris, Belgia, Polandia, hingga Spanyol. GM juga memiliki anak perusahaan atau kepemilikan saham di banyak perusahaan otomotif seperti

Afrika Selatan dan Jepang.

Mobil yang diproduksi meliputi berbagai jenis mobil, dari yang biasa sampai mewah. Di antaranya Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, GM Daewoo, Holden, Hummer, Opel, Saturn, Saab, Pontiac, Vauxhall dan Wuling. Kinerja GM yang menggurita di kancah otomotif dunia semakin mengokohkan keyakinan bahwa perusahaan yang berkantor pusat di Renaissance Center, Detroit, Michigan itu, bakal abadi. Tapi keyakinan itu perlahan-lahan luntur setelah krisis finansial melanda AS setahun terakhir ini.

Krisis mengakibatkan permintaan kendaraan mengalami penurunan drastis di banyak negara, terutama di pasar utamanya di Eropa dan AS. GM pun ikut terkena imbasnya, penjualan GM anjlok. GM mengalami kebangkrutan setelah menanggung beban utang US\$172,8 miliar dan gagal mengadopsi permintaan konsumen atas mobil-mobil kecil. Kondisi keuangan yang tidak sehat ini membuat GM mengajukan bantuan pinjaman kepada

Pemerintah AS sebesar 20 miliar dolar AS, Desember 2008.

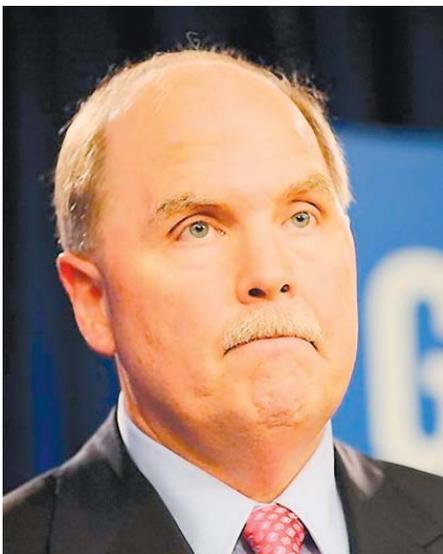
Selama 5 bulan terakhir ini, GM berjuang membenahi diri agar bisa melewati masa kritis. Pada Februari 2009, GM meminta bantuan pendanaan \$30 miliar, mengumumkan rencana pengurangan tenaga kerja dan penutupan 5 pabriknya di AS. GM juga melaporkan kerugian \$30,9 miliar di 2008. Pada Maret, pemerintah AS mendepak CEO GM Rick Wagoner dan menunjuk CEO Fritz Henderson sebagai penggantinya. Hingga puncaknya pada akhir Mei, GM mengajukan perlindungan kepailitan Chapter 11.

Akhirnya, Senin, 1 Juni 2009, manajemen GM dengan pahit mesti mengakui bahwa perusahaannya jatuh pailit atau bangkrut. Status ini dikeluarkan oleh pengadilan niaga Manhattan, Amerika Serikat. Perlindungan kepailitan diputuskan setelah sebelumnya lebih dari 50 persen pemegang saham GM akan mendukung upaya menukar 27 miliar dolar AS utang GM dengan saham sebagai upaya restrukturisasi.

Opsi chapter 11 yang dipilih adalah pasal perlindungan terhadap kebangkrutan. Perusahaan yang memilih status chapter ini bisa tetap beroperasi dan dioperasikan oleh manajemen dan pemimpin yang ada, serta tidak ada perubahan manajemen dan kepemimpinan.

Opsi chapter 11 juga berarti semua aset tetap dimiliki GM dan tidak boleh disita atas alasan apapun, karena semua aset itu telah diproteksi oleh Pemerintah AS. Garansi pembelian tetap berlaku, semua pelanggan tetap dapat menikmati layanan dealer, baik dari segi penjualan, layanan perawatan, dan penyediaan suku cadang. Jadi kebangkrutan GM ini bukanlah bangkrut dalam pemahaman masyarakat Indonesia. Istilah bangkrut di Indonesia lebih merujuk pada opsi chapter 7 di AS dimana perusahaan tutup, tidak beroperasi, semua layanan tidak berlaku, penyediaan suku cadang berhenti, dan seluruh aset disita pengadilan.

Dengan terlibatnya pemerintah AS menalangi GM, komposisi kepemilikan



CEO GM, Fritz Henderson

saham pun berubah. Pemerintah AS (Departemen Keuangan) kini menguasai saham terbesar sebanyak 72,5 persen. Sedangkan sisanya dikuasai oleh Serikat Pekerja Otomotif (United Automobile Workers/UAW) dan Pemerintah Kanada.

Sebagai pemilik saham (pemegang saham pasif), Pemerintahan Presiden Obama akan menyuntikkan dana (dana pembayar pajak) sebesar 30 miliar dolar bagi restrukturisasi GM yang kini menjadi perusahaan baru, New GM. Perusahaan yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan AS ini akan dibangun dengan utang yang lebih

sedikit dan biaya operasi yang lebih rendah dibandingkan yang dimiliki GM sebelumnya.

Lewat restrukturisasi, New GM diharapkan menjadi pemimpin global era efisiensi bahan bakar dan teknologi canggih ramah lingkungan, serta kualitas dan daya tahan tinggi. Selain itu, New GM menawarkan desain yang atraktif, pelayanan pelanggan yang lebih prima, dan yang paling utama harga produk yang bersaing.

GM juga menegaskan, di bawah bendera baru, tidak ada operasi GM di luar AS yang termasuk dan masuk ke dalam daftar pengadilan AS atau masuk ke dalam proses yang diawasi pengadilan. GM meyakinkan bahwa seluruh operasi bisnis tetap berjalan tanpa mengalami gangguan, termasuk operasi di kawasan Asia Tenggara yang di dalamnya terdapat GM

telah menghapus empat merek lainnya. Akibatnya, 21 ribu karyawan di-PHK atau sekitar 34 persen dari total pekerja, dan memangkas jumlah dealer menjadi 2.600 serta 11 pabrik ditutup.

Penyelamatan lain yang dilakukan GM agar manajemen tetap berjalan adalah menjual beberapa merek. Sejauh ini, GM telah mencapai kesepakatan untuk menjual merek Saturn kepada Roger Penske, mantan pembalap yang memiliki jaringan dealer mobil terbesar kedua di AS; merek Opel, Hummer dan Vauxhall masih dalam tahap negosiasi.

Bila proses restrukturisasi yang direncanakan selama 60 hari berjalan lancar, New GM diperkirakan dapat kembali membukukan keuntungan tahunan sebelum 2011. Penasihat keuangan produsen otomotif Amerika Serikat, Evercore Part-



Seorang karyawan sedang memeriksa mobil Saturn Aura di pabrik perakitan di Kansas City

Indonesia. Dealer GM akan terus melakukan aktivitas pelayanan terhadap kendaraan GM dan menerima garansi yang diberikan GM. Pemerintah AS pun menjamin pertanggungjawaban garansi kendaraan GM.

Sebagai tahap awal restrukturisasi, GM menjual semua asetnya kepada New GM. Penjualan seluruh aset GM kepada New GM diselesaikan melalui proses yang diawasi oleh pengadilan di bawah Chapter 11 dari US Bankruptcy Code.

New GM akan mengandalkan produksi hanya pada empat merek utama, yaitu Chevrolet, Cadillac, Buick dan GMC, se-

ners memperkirakan bahwa New GM akan menderita kerugian US\$ 17,5 miliar tahun ini. Selanjutnya pada 2011, perusahaan ini diperkirakan membukukan laba sebesar US\$ 3 miliar dan US\$ 7,8 miliar pada 2014, keduanya sebelum pajak.

Perkiraan ini didasarkan pada asumsi bahwa penjualan mobil AS akan kembali meningkat (rebound) menjadi 16 juta unit per tahun dari tingkat penjualan tahun ini yang kurang dari 10 juta. Produksi mobil global GM akan meningkat dari 3,8 juta unit pada 2009 menjadi enam juta unit pada 2014. ■ PAN

Chrysler Juga Berbenah

Selain GM, pabrikan otomotif AS, Chrysler juga ikut dalam perlindungan kepailitan yang dijalaninya sejak 30 April lalu. Dalam proses restrukturisasi, pabrikan otomotif Italia, Fiat, mencapai kesepakatan untuk menjalin aliansi dengan Chrysler. Dalam perusahaan yang baru ini, Fiat memiliki saham 20 persen tanpa

mengeluarkan dana investasi, Serikat Pekerja Otomotif AS (UAW) memiliki saham 55 persen, sedangkan pemerintah AS dan Kanada masing-masing memperoleh bagian saham delapan dan dua persen. Perusahaan Chrysler yang baru masih berkantor pusat di negara bagian Michigan, AS, dan memproduksi merek Chrysler, Jeep

dan Dodge. "Kegiatan Chrysler dalam bentuk perusahaan baru akan segera berjalan. Saat ini sedang dilakukan upaya pengembangan lingkungan yang bersahabat, penghematan dan menciptakan kendaraan bermutu yang dapat membuat Chrysler menjadi terdepan dalam industri," kata Sergio Marchionne, CEO Fiat. ■

Mantapkan Implementasi S

Dari Sidang Tahunan Litbang Al-Zaytun 2009

Satu dasawarsa institusi pendidikan Al-Zaytun berkiprah. Sudah banyak inovasi pendidikan yang dilakukan dan banyak pula kemajuan yang diraih. Hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun, Al-Zaytun telah berhasil mengimplementasikan cita-cita *One Pipe Education System*, dari tingkat pendidikan usia dini (*elementary*) hingga universitas.

Seri Satu dari Tiga



Setiap tahun, dari perjalanan satu dasawarsa, selalu saja ada inovasi baru di kampus Al-Zaytun. Semua inovasi itu selalu mengarah pada semakin mantapnya implementasi sistem pendidikan satu pipa, sebagaimana sejak awal dicita-citakan pendiri dan pengasuhnya.

Upaya pembaruan (inovasi) pendidikan itu selalu dilakukan dalam suatu sistem tata kelola kreatif yang terlembaga dalam badan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang kegiatannya terjadwal dalam sidang tahunan yang diawali dengan pengkajian-pengkajian berkala sebelumnya sepanjang tahun.

Setiap tahun, Sidang Tahunan Litbang Al-Zaytun selalu melahirkan pembaruan menuju hal yang lebih baik. Namun, Sidang Tahunan Litbang tahun ini (yang berlangsung 27 Mei sampai 9 Juni 2009 di Meeting Room Al-Islah, Al-Zaytun), rasanya memiliki makna tersendiri. Bermakna, selain dari segi hasil-hasil yang disimpulkan, juga karena tahun ini (2009), tepatnya 1 Juli, genap satu dasawarsa pembelajaran berlangsung di Al-Zaytun.

Sejak awal, permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli dan tidak mengikuti kebiasaan pesantren, yang mengawali tahun pembelajarannya pada bulan Syawal. Pertimbangannya adalah untuk tidak menyulitkan calon santri dan mahasiswa serta semua pihak yang menggunakan kalender pembelajaran pendidikan nasional.

Setelah melalui tiga tahun masa



persiapan dan pembangunan awal infrastruktur pendidikan, pembelajaran pertama dimulai pada 1 Juli 1999 M. Kala itu, sepuluh tahun lalu, awal tahun pembukaan pembelajaran dibuka oleh Menteri Pertanian Prof. Soleh Solahuddin. Santri tahun pertama berjumlah 1.460 orang (624 santri nisa dan 836 santri rijal), yang berasal dari seluruh provinsi Indonesia dan juga dari negeri jiran Malaysia. Tenaga pendidik dan mustami' berjumlah 150 orang (35 nisa dan 115 rijal).

Ada suasana haru, bahagia, bangga

Sistem Pendidikan Satu Pipa



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
SIDANG TAHUNAN LITBANG AL-ZAYTUN
DISELENGGARAKAN PADA TARIKH 03 JUMADA AL-TSANIYAH 1430 H / 27 MEI 2009 M S/D SELESAI
DI AL-ZAYTUN
 Al-Zaytun, 03 Jumada al-Tsaniiyah 1430 H / 27 Mei 2009 M

dan puas bagi segenap eksponen Al-Zaytun ketika awal pembelajaran itu dimulai. Sebuah awal langkah lembaga pendidikan kepesantrenan bersistem modern, pendidikan bersistem satu pipa dan bergaya Indonesia sepenuhnya, namun bersetting global. Yang bagi pendiri dan pemimpinnya, Syaykh Abdussalam Panji Gumilang, hal ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang pewujudan sebuah mimpi (impian) menjadi kenyataan.

Telah lahir di bumi Indonesia, tepatnya di dusun Sandrem, Desa Mekarjaya,

Kecamatan Haurgeulis (sekarang Gantar), Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebuah lembaga pendidikan Islam Al-Zaytun (Yayasan Pesantren Indonesia). Bangsa Indonesia pun menyambut gembira kelahiran Al-Zaytun. Terbukti dari antusias masyarakat dari seluruh provinsi mempercayakan anak-anaknya dididik di Al-Zaytun.

Kegembiraan bangsa Indonesia itu dimanifestasikan pula oleh Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. BJ Habibie, kala itu, dengan kehadirannya me-

SIDANG LITBANG: Sidang Tahunan Litbang Al-Zaytun 2009 memantapkan langkah implementasi sistem satu pipa (*one pipe education system*).

resmikan Ma'had Al-Zaytun. Hari itu, tepatnya 27 Agustus 1999, bertepatan dengan 16 Jumada al-Ula 1420 H. Hari peresmian inilah kemudian dirayakan sebagai hari kelahiran (milad) Al-Zaytun, yang tahun ini genap satu dasawarsa.

Sejak 4 Februari 2002, di usianya yang ketiga, Al-Zaytun mendapat akreditasi "Diakui"

Kedatangan Presiden BJ Habibie untuk meresmikan Al-Zaytun, kala itu, cukup membuat suasana meriah bagi warga Haurgeulis dan sekitarnya. Maklum, bagi mereka, saat itulah kali pertama lingkungan Haurgeulis dan sekitarnya kedatangan Kepala Negara, orang pertama di negeri ini. Tak hanya warga dari Haurgeulis, warga Sukra, Anjatan dan Kroya - tiga kecamatan tetangga Haurgeulis, yang mengetahui peristiwa itu pun ikut berbondong-bondong ingin turut menyaksikan, bersuka-cita.

Mengorbit di Tengah Badai

Namun, sejenak kilas balik, perjalanan Al-Zaytun tidaklah semudah mengisihkannya. Baru saja melangkah ke tahun kedua (menginjak tahun 2000) sesudah diresmikan, ada semacam badai gunjang-ganjing menerpa Al-Zaytun. Satu per satu, bagai metraleur dan bagai badai angin puting-beliung, terhembus berita tak sedap menggugat eksistensinya dengan berbagai alasan, mulai dari isu sesat hingga sebagai pusat komando dan sarang pergerakan politik bawah tanah.

Tak tanggung-tanggung, hingga tahun 2005, gunjang-ganjing itu makin gencar ditembakkan, bahkan hingga tahun ini juga. Uniknya, gunjang-ganjing itu muncul dengan suatu pola tetap setiap tahun menjelang proses penerimaan santri baru. Tetapi, menghadapi gunjang-ganjing itu, Al-Zaytun selalu tampil tenang, tak reaktif dan tak menampilkan sesuatu yang arogan. "Cukup dengan senyum dan kata-kata indah, terutama dengan berkarya sepanjang hari," kata Syaykh al-Zaytun menggambarkan sikap yang ditempuhnya. Hasilnya, ternyata jurus itu bisa melumpuhkan kekerasan dan kedengkian yang dibidikkan ke tubuh Al-Zaytun.

Di tengah badai itu, Al-Zaytun yang jadi sasaran tembak, pendiri dan pemimpin serta para eksponennya terus menguatkan kuda-kuda dengan terus berkarya secara kreatif dan inovatif. Sehingga di tengah badai itu, justru Al-Zaytun makin mengorbit. Ibarat sebuah satelit yang mengorbit memancarkan sinyal ke seluruh penjuru negeri, bahkan lintas negeri menjangkau berbagai penjuru dunia.

Al-Zaytun menjadi bahan pembicaraan dunia mengalahkan terpaan badai gunjang-ganjing yang ditiupkan oleh pihak-pihak tertentu. Al-Zaytun menjadi makin ramai dikunjungi berbagai kalangan, bukan hanya dikunjungi

umat Islam tetapi juga dikunjungi berbagai golongan umat beragama lainnya. Tidak hanya dikunjungi masyarakat umum, tetapi juga dikunjungi para pengusaha, politisi, pejabat negara, budayawan dan para diplomatik serta para artis dan wartawan dari dalam dan luar negeri.

Sehingga periode bertiupnya badai gunjang-ganjing itu, boleh dibilang malah menjadi suatu periode emas bagi Al-Zaytun. Sebab kedatangan para sahabat dari berbagai lapisan dan golongan itu membawa berkah bagi Al-Zaytun. Tak sedikit di antara pengunjung itu memberi dukungan moral dan materil untuk membangun berbagai sarana penunjang (infrastruktur) Al-Zaytun.

Begitu pula masyarakat, tampak tak begitu terpancing dengan desas-desus itu. Terbukti setiap tahun semakin banyak orang tua yang mempercayakan anaknya menjadi santri di kampus ini. Jumlah calon santri yang mendaftar setiap tahun bertambah hingga tak semuanya bisa ditampung.

Di samping itu, pengakuan dari berbagai elemen pendidikan diberikan kepada Al-Zaytun. Mulai dari sebuah surat ketetapan pemberian akreditasi pada 4 Februari 2002, status "Diakui" pun melekat bagi Al-Zaytun ketika baru berusia tiga tahun. Bahkan akreditasi lain datang dari Australia yang diberikan kepada Program Pendidikan Pertanian Terpadu (P3T) - sekarang Fakultas Pertanian Terpadu Universitas Al-Zaytun Indonesia - berupa akreditasi berbintang empat atau *Recognition by IARC as 4 stars organization*. Menyusul kemudian, akreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang berkedudukan di Pasadena, AS.

Lalu, sejak Juli 2005 lahirlah Universitas Al-Zaytun Indonesia (UAZ Indonesia) dan tingkat pendidikan dasar. Inilah hari sebagai titik awal implementasi *One Pipe Education System* di Al-Zaytun, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga universitas, mulai dari kelas 1 SD sampai program doktor (S3).

Al-Zaytun semakin memantapkan langkah implementasi pendidikan formal dengan jenjang yang tak terputus untuk mencapai arah dan tujuan *one pipe system education*, yang diwujudkan dalam pelaksanaan pendidikan dari kelas satu hingga kelas dua puluh.

Jenjang pendidikan itu adalah: Pertama, tingkat dasar (*elementary*) yakni tahun pertama hingga tahun keenam, umur 6-12 tahun; Kedua, tingkat mene-



ngah (Secondary and Senior High School) yakni tahun ketujuh hingga tahun ke-12, umur 13-18 tahun; Ketiga, tingkat S1 yakni tahun ke-13 hingga tahun ke-15, umur 19-21 tahun; Keempat, tingkat S2 yakni tahun ke-16 hingga tahun ke-17, umur 21-23 tahun; dan Kelima, tingkat S3 yakni tahun ke-18 hingga tahun ke-19, umur 24-26 tahun.

Pada saat awal, yang dimplementasikan barulah tingkat menengah, kemudian persiapan S1 berupa Program Pendidikan Pertanian Terpadu (P3T), Program Pendidikan Teknik Terpadu (P2T2) dan Program Pendidikan Bahasa-bahasa Terpadu (P2BT). Sampai kemudian, setelah berdirinya Universitas Al-Zaytun Indonesia (UAZ Indonesia) dan tingkat pendidikan dasar,

semakin mantaplah langkah Al-Zaytun mengimplementasikan sistem pendidikan satu pipa, dari kelas satu hingga kelas dua puluh.

Al-Zaytun pun tidak hanya bagai satelit yang mengorbit di angkasa lepas, bahkan ibarat matahari memancarkan sinar ke seantero jagat. Jika Allah berkehendak, tiada kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk berakidah yang kokoh terhadap Allah dan syari'at-Nya, berakhlakul karimah dan berpengetahuan luas demi kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi, tentulah sesuai dengan kehendak Allah. Tampaknya misi mulia itulah yang menjadi kekuatan utama para eksponen Al-Zaytun.

Namun, pujian seperti ini bukanlah kehendak pengasuh Al-Zaytun. Bagi mereka, Syaykh al-Zaytun dan para eksponennya, semua itu menyiratkan natijah bahwa Al-Zaytun harus

BERSEJARAH: *Presiden BJ Habibie meresmikan Mahad Al-Zaytun didampingi Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang, Gubernur Jabar Nuryana (paling kiri), dan Mendiknas Malik Fajar (paling kanan), pada 27 Agustus 1999.*

Visi dan misi Al-Zaytun menggariskan bahwa pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa.

KESATUAN:

Syaykh al-Zaytun mempertajam dan menyatukan visi peserta Sidang Tahunan Litbang Al-Zaytun 2009

terus maju untuk membangun dan memberi manfaat kepada umat dan negara tanpa harus mundur satu langkah pun, baik saat menghadapi gangguan dan tantangan dari luar maupun menerima pujian dan penghargaan.

Buahnya, Al-Zaytun dari tahun ke tahun makin berkembang. Pembangunan sarana fisik berlangsung tak henti-hentinya. Sistem pendidikannya pun terus ditingkatkan memenuhi kriteria pendidikan abad 21. Kurikulumnya terus disempurnakan untuk mampu melahirkan peserta didik yang berkemampuan berskala dunia. Kualitas guru pun makin ditingkatkan dengan berbagai upaya sistematis dan terencana. Begitu pula pembenahan lingkungan terus dilakukan. Kemandirian ekonomi juga makin ditingkatkan melalui berbagai upaya pengembangan pertanian, peternakan, dan lain-lain.

Sebagai lembaga pendidikan berasrama (*boarding house*), Al-Zaytun pun menempatkan faktor pengadaan makanan menjadi agenda utama yang

harus ditata dengan baik. Dengan sistem pendidikan yang berasrama yang jumlah santrinya mendekati 10 ribuan, maka faktor pengadaan makanan tidak bisa disepelekan. Maka lahan penunjang yang telah dimilikinya, terus dipersiapkan dengan seksama untuk dapat menunjang sumber pangan utama secara mandiri. Semua hal itu dibahas dalam Sidang Tahunan Litbang 2009.

Pembukaan Sidang Litbang 2009

Dalam sebuah acara pembukaan bersahaja, namun serius dan profesional, Sidang Tahunan Litbang Al-Zaytun dilakukan di Meeting Room Al-Islah, Al-Zaytun pada 27 Mei 2009. Sidang Litbang ini berlangsung hingga 9 Juni 2009. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang tahunan Litbang diselenggarakan bersamaan dengan pekan-pekan dimana santri menjalani masa belajar di masyarakat. Seluruh pengurus yayasan dan eksponen menjadi peserta sidang. Proses sidang tahunan Litbang itu, sejak awal hingga penutupan,



berlangsung amat intens dan 'melelahkan' serta membuahkan hal-hal penting yang menentukan arah kemajuan Al-Zaytun ke depan sesuai visi dan misi yang sudah digariskan sejak awal pendiriannya.

Visi dan misi Al-Zaytun menggariskan bahwa pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa. Komitmen inilah yang melatarbelakangi Al-Zaytun untuk turut berperan dan berpartisipasi aktif mewujudkan cita-cita dan konsensus bersama masyarakat internasional di dalam satu era *millennium development* melakukan pembangunan manusia yang holistik, mencakup semua komponen pembangunan yang dihimpun dalam kependidikan. Hal ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan mulia yakni kemajuan kemanusiaan dan kesejahteraan.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan urgensi peningkatan kualitas umat manusia inilah, maka Al-Zaytun mendesain pendidikannya dengan tujuan: "Mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan luas, berketrampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtatan fil `ilmi wai jismi* (QS 2:247) sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi."

Untuk mencapai tujuan itu, kurikulum pendidikan Al-Zaytun dirancang sedemikian rupa, baku namun tidak beku, 'ashri, komprehensif dan dinamis. Sehingga dalam aplikasinya selain dapat menerima pembaruan dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Apalagi tahun ini, Sidang Litbang diwarnai refleksi sepuluh tahun sudah pendidikan Al-Zaytun berkiprah dengan berbagai dinamikanya hingga berhasil mengimplementasikan cita-cita sistem pendidikan satu pipa (*one pipe education system*).

Pada acara pembukaan Syaykh al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang memberi arahan (tausiyah). Syaykh al-Zaytun memberi arahan tentang apa makna upaya pembaruan dan inovasi kependidikan dan tentang pokok-pokok materi sidang yang sudah diagendakan dan dipersiapkan sebelumnya.

Arahan itu mempertajam kemampuan dan cara pandang bagi peserta

sidang. Sehingga para peserta memiliki kesamaan visi dan misi dalam membahas setiap pokok bahasan dalam sidang. Tausiyah Syaykh al-Zaytun itu, kemudian dituangkan dalam Muqaddimah Hasil Sidang Tahunan Litbang Al-Zaytun.

Setelah memaparkan visi-misi dan tujuan pendidikan di Al-Zaytun, seperti dikemukakan di atas, diamanatkan pula bahwa perkembangan pendidikan dan inovasinya terus berjalan seiring dengan rotasi waktu yang tiada henti. Kemajuan sains dan teknologi serta perubahan environment pendidikan secara umum yang berpengaruh terhadap kehidupan, menuntut langkah penyesuaian yang harus ditempuh, sebagai faktor eksternal yang harus direspon dengan positif.

Memandang perjalanan pendidikan Al-Zaytun satu dasawarsa, supaya terjadi perkembangan pendidikan yang berkelanjutan (*sustainable development*), maka perlu dilakukan pembaruan pelaksanaan pendidikan sebagai langkah konkrit dari upaya pengembangan manusia yang berkesinambungan.

Sehingga pendidikan Al-Zaytun dapat bergerak secara leluasa sesuai dengan irama zaman dengan tetap berpedoman pada visi-misi Al-Zaytun.

Mengacu kepada Sisdiknas, maka bidang studi yang diujikan pada ujian nasional perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Sehingga peserta didik senantiasa siap menghadapinya tanpa mengalami beban dan tidak harus mengikuti bimbingan khusus di luar jam pembelajaran. Adapun bidang studi yang tidak termasuk dalam ujian nasional tetap mendapatkan perhatian sama yang penyajiannya terintegrasi dengan takshis kurikulum pendidikan Al-Zaytun.

Selanjutnya bahasa sebagai jiwa bangsa harus tertanam secara menyeluruh dalam setiap jiwa peserta didik maupun civitas akademika, sehingga bahasa ibu menjadi cerminan budaya dan kepribadian bangsa. Selain itu penguasaan bahasa antarbangsa yang dominan, khususnya Arab dan Inggris haruslah menjadi komunikasi harian bagi sivitas akademika. Dengan begitu terbentuklah *language atmosphere* di Al-Zaytun.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pemakanan dan kegiatan olah raga-seni yang memadai untuk mencapai kesihatan jiwa dan raga yang prima. Kegiatan olah raga dan seni yang pada hakikatnya bisa menyehatkan dan menghaluskan perangai dalam perannya membentuk karakter dan kepribadian harus diikuti oleh peserta didik. Sehingga mereka dapat berkiprah dalam event yang lebih luas, nasional maupun internasional.

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran perlu didukung oleh sarana prasarana yang memadai, seperti laboratorium sains, kimia, biologi, bahasa, matematika, dan lain-lain. Juga disediakan tempat hunian yang sakinah bagi civitas akademika serta termenej dengan pola manajemen yang baik. Sehingga para penghuni, khususnya pelajar, dapat berinteraksi dengan penuh toleran dan damai, merasa nyaman, dan betah sebagai pengganti rumah mereka sendiri, Dengan demi-

Bahasa sebagai jiwa bangsa harus tertanam secara menyeluruh dalam setiap jiwa peserta didik maupun civitas akademika, sehingga bahasa ibu menjadi cerminan budaya dan kepribadian bangsa.

kian diharapkan dapat menumbuhkan manusia yang bertanggung jawab kepada diri dan lingkungannya.

Kemudian setiap kegiatan penelitian dan berbagai perkembangan hendaklah dicatat dan diadministrasikan dengan baik. Pengadministrasian ini berguna untuk memberikan informasi kepada pihak luar maupun sebagai rujukan dalam menentukan langkah ke depan.

Sehubungan dengan itu dipandang perlu melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk membahas hal-hal tersebut di atas sebagai upaya yang responsif dan inovatif dalam mewujudkan cita-cita pendidikan.

Sidang Komisi

Sidang ini sudah diawali dari tahap persiapan, terutama persiapan materi Sidang Litbang yang akan dibahas. Tahap persiapan ini dilakukan oleh beberapa orang untuk mendetailkan hal-hal yang perlu dibahas dalam sidang berdasar hasil kajian Litbang sepanjang tahun.

Sesuai materi hasil tahap persiapan itu, dikelompokkan dalam tujuh pokok materi bahasan. Selanjutnya, setiap pokok materi itu didetailkan pembahasannya dalam sidang yang dibagi dalam tujuh komisi.

Komisi I bersidang membahas masalah pembaruan pendidikan. Komisi II membahas masalah bimbingan kebahasaan. Komisi III membahas masalah ekstrakurikuler. Komisi IV membahas masalah perawatan gedung. Komisi V membahas masalah manajemen asrama. Komisi VI membahas masalah pemakanan. Sedangkan yang terakhir, komisi VII membahas masalah dokumentasi dan penelitian.

Selain memberi arahan untuk mempertajam dan mempersatukan visi para peserta sidang, Syaykh al-Zaytun juga memberi masukan kepada setiap komisi. Misalnya kepada Komisi I yang membahas masalah pembaruan pendidikan, antara lain tentang hari belajar dan kurikulum. Tentang hari belajar, selain dalam acara pembukaan sidang, dalam beberapa kesempatan dan melalui pesan-pesan Jumat, Syaykh sudah berulang kali mengemukakan gagasan agar para santri dan mahasiswa tidak sepenuhnya dalam sepekan duduk di kelas. Tapi ada beberapa hari yang duduk di kelas, ada hari-hari yang tidak duduk di kelas. Yakni, lima hari di dalam kelas, dan dua hari di luar kelas. Hal ini telah menjadi salah satu keputusan dalam Sidang Tahunan Litbang 2009.

Lima hari belajar dalam kelas per pekan itu yakni mulai hari Senin sampai Jum'at.

Kemudian mengenai item yang menyangkut kurikulum, yang dibahas dalam sidang tahunan Litbang antara lain tentang mata pelajaran yang diujikan pada ujian akhir nasional (UAN). Mata ajar yang akan mendapatkan evaluasi nasional dalam bentuk ujian akhir nasional, itu ternyata tidak semua materi ajar yang diberikan berdasar kurikulum. Tapi jumlah mata ajar yang diujikan dalam ujian nasional hanya empat dan enam. Yakni untuk tingkat madrasah tsanawiyah empat mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, matematika dan IPA), dan tingkat menengah atas atau aliyah enam mata pelajaran (untuk jurusan IPA: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika dan kimia; dan untuk IPS: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, matematika, sosiologi, geografi, dan ekonomi).

Dalam sidang Litbang dibahas bagaimana cara memaksimalkan mata ajar yang diikuti dalam ujian akhir nasional itu. Dikaji, jika diberikan dalam bentuk seperti yang telah berlangsung selama ini, kemudian ditambah les-les tertentu, sesungguhnya membuang waktu. Sudah duduk di kelas, tapi masih ada les, atau jam-jam tambahan dan lain sebagainya. Cara itu dinilai tidak efisien dalam penggunaan waktu, tenaga dan lain sebagainya.

Maka, dinilai lebih baik kalau pendetailan mata ajar yang diujikan dalam ujian akhir nasional itu berlangsung di dalam proses belajar di kelas saja. Tanpa ada pelajaran-pelajaran tambahan. Sebab yang diujikan itu hanya enam, tapi mengapa terjadi seakan-akan tidak cukup waktu dalam beberapa tahun atau tiga tahun untuk mengatasi ujian nasional yang hanya enam ini.

Sidang Litbang mencari jalan keluar, sehingga anak didik sudah harus selalu siap dan mampu menghadapi ujian nasional. Kapan saja diadakan ujian nasional itu, santri sudah siap. Syaykh al-Zaytun menginspirasi peserta sidang untuk mencari jalan keluar terbaik, dengan mengutip kata orang Cina, lihai atau pintar, untuk mengatur materi ajar yang diujikan secara nasional itu di dalam kelas, dalam jadwal belajar reguler saja.

Hal ini menjadi bahan kajian Sidang Litbang secara serius. Melihat kenyataan yang terjadi di lain tempat, bahkan secara nasional, menghadapi ujian

Selain para santri belajar 'ulumu al-fiqhi di kelas, ada juga bimbingan Al-Qur'an yang arahnya untuk mendukung itu. Jadi, Qur'an yang akan diberikan itu adalah yang berakidah, kemudian 'ulumul'ibadah, dan mu'amalah.

nasional ini seakan-akan suatu beban sehingga tatkala menjelang ujian, banyak yang stres. Baik guru maupun unit-unit sekolah, maupun pelajar merasakan seakan-akan ujian akhir nasional itu beban yang maha berat. Padahal semua sudah memiliki kurikulum dan pendukungnya.

Keadaan ini, menurut Syaikh, jangan sampai terjadi di Al-Zaytun. Walaupun selama ini kejadian tersebut tidak pernah terjadi di Al-Zaytun. Namun, pengkajian tentang hal ini dilakukan dalam Sidang Litbang dan menghasilkan jalan keluar yang dibuat menjadi suatu kebiasaan (bukan terobosan) supaya yang hanya empat dan enam mata ajar yang diujikan itu tidak menjadi beban. Caranya, melakukan pendetailan pada setiap jam pelajaran yang diberikan, antara lain dengan penambahan jam pelajaran per pekan. Sehingga tidak perlu ada tambahan dengan les atau kursus.

Namun bukan berarti pelajaran-pelajaran yang tidak diujikan dalam ujian akhir nasional, tidak diperhatikan atau dikorbkan. Tapi semuanya sama-sama diperhatikan dan ditangani secara serius.

Begitu pula tentang pendetailan pembimbingan dan pencapaian pembacaan Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang diulas komisi I, ada evaluasi yang dilakukan secara mendasar. Hasil kajian Litbang menunjukkan, ternyata anak-anak atau para pelajar tidak bisa dilepaskan dengan sendirinya menghafalkan Al-Qur'an, dan Al-Hadits tanpa bimbingan. Dengan adanya bimbingan, maka diharapkan, selain anak-anak akan menguasai bacaan Al-Qur'an, juga menguasai tafsirnya, serta menguasai pesan-pesan Al-Qur'an untuk pelajaran akhlak, untuk pelajaran akidah, dan untuk pelajaran ibadah.

Litbang mengkaji akan membuat satu metoda yang dinilai efektif tentang hal ini. Metoda itu antara lain, selain para santri belajar 'ulumu al-fiqhi di kelas, ada juga bimbingan Al-Qur'an yang arahnya untuk mendukung itu. Jadi, Qur'an yang akan diberikan itu adalah yang berakidah, kemudian ulumul'ibadah dan mu'amalah. Hal itu diberikan secara khusus, sambil anak-anak itu fasih di dalam membaca.

Sesungguhnya, pedoman-pedoman seperti itu selama ini telah berlangsung di Al-Zaytun. Namun, Sidang Litbang mengkaji penataan yang lebih baik. Antara lain dengan memanfaatkan keunggulan Al-Zaytun, banyaknya sumberdaya, baik guru dan eksponen ya-

yaan maupun unsur-unsur lain, untuk dilibatkan memberikan bimbingan bacaan Al-Qur'an, maupun pengertian-pengertian daripada ayat-ayat Al-Qur'an atau petikan-petikan ayat Al-Qur'an maupun hadits-hadits.

Dalam program pemberian bimbingan pendetailan Al-Qur'an maupun Al-Hadits ini, peserta didik itu tidak harus banyak dalam satu kelas. Dalam satu kelas, paling banyak satu regu, yakni 10 sampai 11 orang. Kemudian ada pembimbing, satu atau dua orang.

Sedangkan mengenai waktu pemberian bimbingan, pada tingkat Ibtidaiyah akan diberikan pada kelas lima dan kelas enam. Sementara untuk kelas satu, dua, tiga, dan empat, tetap guru-guru resmi yang ada di kelas. Artinya, bimbingan pendetailan tadi, cukup di kelas lima dan enam. Kemudian di tingkat tsanawiyah, diberikan pada kelas 3 atau kelas 9. Sedangkan di tingkat aliyah, diberikan di kelas 5 akhir atau kelas 11 akhir dan 12.

Materi bimbingannya sendiri yaitu ayat-ayat Qur'an yang berhubungan dengan khuluq atau akhlak, berhubungan dengan akidah, dan berhubungan dengan ibadah dan lain-lain. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan nanti anak atau pelajar sudah terbiasa membaca Al-Qur'an dan menghafal dengan teliti sehingga tatkala membaca Al-Qur'an atau membaca mushap secara sempurna sudah bisa dimiliki atau sudah bisa ditekuni oleh masing-masing. Termasuk di dalamnya Al-Hadits.

Pendidikan Kejuruan Berkualitas

Masih dalam ulasan bidang pendidikan, tahun ini kuat keinginan di Al-Zaytun untuk membuka pendidikan kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program SMK yang masih baru di Al-Zaytun ini menjadi salah satu topik ulasan yang alot dalam sidang tahunan Litbang kali ini. Di antaranya mengenai beberapa hal menyangkut pelaksanaan pendidikan kejuruan itu sendiri dan pemilihan kejuruan apa yang akan ditekuni.

Biasanya kejuruan itu kaitannya adalah tenaga yang dipersiapkan secara cepat dan tepat untuk mencapai pekerjaan tertentu. Menurut kajian Litbang, pendidikan kejuruan seperti itu, profesional. Sekarang, profesional yang paling diperlukan itu, adalah profesional yang berhubungan dengan informatika. "Jadi, mana yang kita pilih terlebih dahulu walaupun banyak profesional-profesional itu. Ada ekonomi, ada pertanian, ada teknik, ada juga IT, informatika dan lain sebagainya," kata Syaikh memberi arahan.

Lebih rinci lagi, Syaikh mengatakan, jika sekolah menengah kejuruan ditetapkan jadi dibentuk, yang dibuka satu jurusan dulu. Yang satu jurusan itu ditekuni, baru kemudian dikembangkan. Jadi, jangan sekaligus membuat beberapa jurusan tapi kemudian tidak bisa mengembangkannya secara baik. "Jadi satu dulu, kemudian kita tetapkan, ijinnya kita miliki. Kemudian kita bikin sedemikian berkualitas. Kalau itu sudah berjalan, baru kita kembangkan yang lain-lain," ucap Syaikh.

Ditanya *Berita Indonesia* mengenai latar belakang dibukanya SMK ini, Syaikh mengatakan

**Kuat
keinginan di
Al-Zaytun
untuk
membuka
pendidikan
kejuruan,
Sekolah
Menengah
Kejuruan
(SMK).**



WAWANCARA: Syaykh Al-Zaytun diwawancara Berita Indonesia sesuai acara pembukaan Sidang Tahunan Litbang Al-Zaytun 2009

Selain bahasa-bahasa yang telah ditampilkan di dalam kurikulum, akan ada kursus bahasa yang mudah-mudahan ada manfaatnya, yaitu bahasa Ibrani

pembentukan SMK ini agar pelajar yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi bisa bekerja dulu baru kemudian melanjutkan pendidikan.

Sementara, dalam sidang Litbang dibahas juga perihal laboratorium dan perpustakaan. Juga tentang sistem dan pelaksanaan perekrutan dan seleksi penerimaan santri atau pelajar baru. Sidang Litbang juga mengkaji adanya persyaratan khusus untuk kelas 12 seperti selama ini, dengan memasukkan pada persyaratan khusus yaitu kemampuan di dalam menguasai bacaan hafalan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Hal ini berkaitan dengan pendetailan

bimbingan Al-Qur'an, dan Al-Hadits. Sehingga, dengan adanya pendetailan bimbingan Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka sistem evaluasi, sistem perekrutan yang telah dilakukan dan lain sebagainya, bisa disinkronkan dengan program pembimbingan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Karena, berdasar kajian Litbang, ternyata apa yang pernah dilakukan dalam perekrutan yang berkaitan dengan tahfid Al-Qur'an, tidak mendukung pada perjalanan lebih lanjut. Sehingga perlu ditemukan cara agar tahfid yang dicapai oleh anak-anak di dalam persyaratan kelulusan masuk, itu harus disertai dengan perkembangan lebih lanjut.

Martabat Bahasa Indonesia

Kemudian mengenai pokok materi bimbingan kebahasaan yang pembahasannya ditangani oleh komisi II, dalam sidang ini masih dibagi dalam beberapa item antara lain, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan baku, serta rencana pembukaan kursus bahasa Ibrani, di samping pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Arab yang selama ini sudah dilakukan di Al-Zaytun.

Tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik, Syaykh memaparkan kajian Litbang yang perlu didetailkan dalam sidang sebab belakangan ini bahasa Indonesia anak-anak dan lingkungan di Al-Zaytun dirasakan sudah tidak mencerminkan bahasa Indonesia yang menjadi jiwa bangsa. Kehidupan keseharian berbahasa ini sudah tidak menunjukkan bahwa di sana adalah kampus pendidikan. Termasuk yang senior maupun yang pelajar.

"Kita tidak bangga dengan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena kita tidak mampu mengangkat harkat martabat bahasa Indonesia itu sendiri. Ini harus disadari dan harus cepat kembali. Kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan baku," kata Syaykh Panji Gumilang.

Dikatakan, bahasa-bahasa yang prokem, hendaknya dijauhi sebab civitas akademik Al-Zaytun bukan makhluk yang tampil di layar tv untuk menghibur orang. Tetapi adalah makhluk Indonesia, bangsa Indonesia yang tampil untuk mendidik dan punya bahasa yang baik. Sehingga bahasa Indonesia nanti menjadi bahasa yang disenangi banyak makhluk hidup di dunia ini. Syaykh menginginkan, berbahasa Indonesia yang tidak baik dihentikan. Syaykh menganjurkan, mulai dari guru, senior-senior, berbahasalah dengan bahasa Indonesia yang baik.

Dengan berbahasa Indonesia yang

baik, maka pelajaran bahasa yang lainnya pun akan menjadi baik. Jadi kalau bahasa bangsa itu tidak dikuasai oleh bangsanya, dia dianggap tidak menguasai dengan baik bahasa lainnya. Maka nanti, mempelajari bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa lainnya, itu akan baik kalau sudah kembali kepada bahasa Indonesia yang baik.

"Awali bahasa Indonesia kita dengan bahasa yang baik," kata Syaykh. Mengapa? Karena itulah ciri sebuah kampus, satu di antaranya adalah bagaimana menggunakan bahasa yang baik untuk berinteraksi.

Kursus Bahasa Ibrani

Ada ide selain bahasa-bahasa yang telah ditampilkan di dalam kurikulum, nanti ada kursus-kursus bahasa yang mudah-mudahan ada manfaatnya, yaitu bahasa Ibrani. Mengapa bahasa Ibrani? Karena ada sangkut paut dengan Arab, dan ada sangkut paut dengan ajaran Ilahi secara murni. Itu adalah bahasa Ibrani.

Lalu, karena yang menguasai bahasa Ibrani di lingkungan Indonesia ini terbatas, biasanya adalah pastor dan pendeta, bahkan di dalam organisasi kepastoran itu sendiri juga belum banyak yang menguasai bahasa Ibrani. Namun, setelah dicari dan insyallah ada. Untuk tahap awal telah dijajaki dengan Pdt. Dr. S.M. Siahaan, mantan Rektor Sekolah Tinggi Theologia HKBP Nommensen, Pematang Siantar, untuk mengajar. Rencananya, akan diikuti 10-20 orang.

Materi Lainnya

Komisi III yang membahas mengenai ekstrakurikuler membaginya dalam beberapa item antara lain mengenai kependuan atau kepramukaan, olahraga dan kesenian, serta kursus-kursus.

Litbang mengkaji kurikulum kepramukaan harus ditegaskan secara gamblang, sehingga bisa dievaluasi. Seberapa jauh kurikulum kependuan yang bisa dikuasai oleh anak-anak. Jangan sampai kependuan ini dijadikan arena untuk permainan saja yang tidak ada manfaatnya. Tapi jadikanlah kependuan ini sebagai satu medan untuk mendidik anak-anak bisa mencintai kampusnya, bisa mencintai negaranya, bisa mencintai bangsanya, bisa berkomunikasi dengan lingkungannya maupun lingkungan antarbangsa.

Kepanduan itu bertugas is'aaf. Is'aaf itu adalah memberi bantuan, diminta atau tidak diminta. Jadi, dibahas dalam sidang tahunan Litbang bagaimana kurikulum untuk menciptakan is'aaf

untuk seluruh umat manusia, bukan untuk golongan tertentu.

Kurikulum kependuan dan kepramukaan diperjelas. Evaluasinya juga diperjelas. Tim kepramukaan, dan tim kependuan harus dibentuk secara jelas, termasuk pengorganisasiannya. Kemudian, interaksi dengan pramuka atau kependuan di lingkungan juga harus dibuat.

Begitu pula tentang evaluasi program di bidang olahraga dan kesenian, ditinjau dan dibaca kembali. Apa yang telah dilakukan dengan program keolahragaan. Dengan dibentuknya KOSMAZ dan lain sebagainya untuk melindungi keolahragaan dan kesenian, dikaji kembali. Sampai di mana tugas-tugas untuk melindungi yang juga diartikan untuk mengembangkan olahraga dan kesenian.

Kemudian mengenai kursus-kursus yang ada selama ini seperti kursus tanaman hias dan lain sebagainya, dikaji untuk semakin ditingkatkan. Begitu pula kursus bahasa dan sebagainya. Juga dikaji oleh Komisi IV, mengenai perawatan gedung.

Sedangkan Komisi V membahas manajemen asrama. Di antaranya tentang pertimbangan menetapkan kepemimpinan atau kepengurusan atau manajemen asrama. Juga dikaji oleh Komisi VI tentang menu makanan dan sistem menu makanan. Ditelaah, masih bisa dipertahankan sistem pemakanan atau penyampaian makanan yang di dalam kelas dengan jam-jam yang telah ditetapkan? "Masih bisa dipertahankan atau kembali kepada yang lama? Namun dari kajian Litbang, apa yang kita lakukan ini masih baik tapi tinggal caranya yang perlu diperbaiki," ujar Syaykh.

Yang terakhir, mengenai penataan administrasi dan dokumentasi-penelitian pembahasannya ditangani komisi VII. Dikaji seluruh kegiatan yang sifatnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang telah ada. Bagaimana pendukungnya, baik itu administrasinya maupun penanggungjawabnya maupun pergudangan atau penyimpanannya.

Semua dikaji, karena dalam sepuluh tahun ini sesungguhnya telah banyak atau telah ada yang dilakukan, tapi mungkin belum terkoordinir, tersimpan dengan baik karena belum ada lembaga yang mendokumentasikan hasil penelitian itu. Umpamanya, penelitian tentang pertanian, penelitian tentang pembangunan.

Al-Zaytun pernah punya hasil penelitian yang dibuat oleh tim pembangunan, juga penelitian bibit-bibit, meneliti pembibitan ternak-ternak, baik itu melalui uji juriat maupun persilangan, yang seharusnya tersimpan (terdokumentasi) dengan baik. Maka diperlukan adanya lembaga yang khusus menangani hal itu sehingga nanti semuanya terdokumentasikan dan bisa dibagikan, ataupun kekayaan penelitian yang bisa dijadikan juga sebagai sumbangsih kepada masyarakat. *(Bersambung Edisi depan)*

■ BI/marjuka-hotsan-crs

Lembaga Penelitian Al-Zaytun (LPAZ) dan Lembaga Arsip Al-Zaytun (LAAZ) bertekad terus membenahi cara kerja mereka sehingga dokumentasi yang mereka buat bisa dibagikan kepada masyarakat



Pdt. Dr. S.M. Siahaan

"Belajar Bahasa Ibrani Butuh Ketekunan"

Meski usianya sudah 73 tahun, doktor teologi (cum laude) lulusan Universitas Hamburg, Jerman, ini masih lugas dan antusias menceritakan pengalaman pertamanya mengunjungi kampus Al-Zaytun, Senin, 8 Juni lalu. "Pembicaraan kami bagus sekali. Kami sudah seperti saling kenal lama. Itu enak, saya senang sangat akrab," katanya sambil tersenyum saat diwawancarai Berita Indonesia di kediamannya di daerah Cipinang Muara, Jakarta Timur (10/6).

Pendeta Siahaan, begitu ia biasa dipanggil, menceritakan lebih lanjut kepada Berita Indonesia tentang sambutan Al-Zaytun kepadanya, niat Al-Zaytun yang ingin mempelajari bahasa Ibrani, dan apa tips-tips mempelajari bahasa tersebut.

Dikatakannya, belajar bahasa Ibrani membutuhkan ketekunan

yang sangat tinggi. Sebab bahasa yang masih digunakan oleh bangsa Israel ini bukanlah bahasa yang akrab di telinga orang.

Saat seseorang belajar bahasa Jerman, misalnya, orang tersebut bisa belajar lebih cepat dengan menjalin komunikasi dengan orang Jerman. Sedangkan bahasa Ibrani menurutnya, adalah bahasa mati yang harus banyak mengetahui dulu baru bisa membaca

bahasa Ibrani kuno yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama.

Ia kembali mengenang proses belajar saat kuliah di Jerman yang harus ia lalui agar bisa menguasai bahasa Ibrani. Pada semester pertama, ia harus belajar 6 hari dan setiap harinya 2 jam. Kemudian pada semester berikutnya jamnya agak berkurang namun belajar membaca semakin diperbanyak. Saat itu, tiap hari ia selalu ditanya berbagai kosa kata dan artinya. Tiada hari tanpa bahasa Ibrani. Oleh sebab itu, ia berharap, Al-Zaytun mesti sabar kalau ingin menguasai, atau setidaknya mengetahui, apa itu bahasa Ibrani. Berikut ini petikan wawancaranya.

Bapak sudah pernah mendengar tentang Al-Zaytun sebelumnya? Saya baru tahu sesudah mendapatkan majalah Berita Indonesia. Tapi baru pertama sekali saya mengenal dari dekat. Kemudian baru pertama kali juga melihat ponpes yang sebesar itu. Saya sangat kagum. Hanya, kemarin kita sampai di sana, belum ada kegiatan mahasiswa. Dan saya melihatnya sangat bagus, sangat besar. Penghuninya lebih dari 10.000 orang.

Bapak ke Al-Zaytun dalam rangka apa?

Mereka ingin belajar bahasa Ibrani, dimulai dengan satu semester.

Berapa kali seminggu?

Jadi kita bikin hari Rabu. Kita mulai jam 11 kira-kira sampai sore, setelah pause 2 jam. Kemudian besoknya satu hari, artinya adalagi pause-nya. Kemudian esoknya saya kembali ke Jakarta. Saya di sana agak lama, hampir tiga hari. Menurut pengalaman saya waktu belajar bahasa Ibrani baik di Indonesia ataupun Eropa, belajar bahasa Ibrani itu tidak cukup satu semester. Sewaktu saya menjadi mahasiswa, tiap hari belajar dua jam hampir dua semester. Saya ke Eropa belajar belum tahu apa-apa. Jadi itu yang saya pikirkan, bagaimana cara memberikan pelajaran ini supaya mereka (Al-Zaytun) dapat belajar sendiri dengan cepat.

Tapi keinginan mereka saya tangkap, kira-kira satu semester, saya paling sedikit mengajar di sana. Walaupun itu terlalu berat bagi saya. Tapi itulah bayangan saya, belum kita bicarakan secara detail. Hanya setelah saya sampai di sini, saya mendapat SMS dari Bapak Abdul Halim (Isi SMS: Sialom Pak Pendeta Siahaan. Bagaimana perjalanan pulang, tiba

jam berapa di Jakarta. Semoga rencana kita diberkati Tuhan. Abdul Halim-Al-Zaytun). Dan saya merasa sangat senang.

Tentu termasuk langka ada ponpes yang ingin mempelajari bahasa Ibrani. Ini berarti Bapak mengajar umat muslim sebuah bahasa yang notabene domain-nya umat nasrani. Bagaimana perasaan Bapak tentang hal ini? Jadi begini. Ada pengertian di antara kita kalau bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu kakak beradik, sama-sama anak Abraham. Jadi keinginan Syaykh itu saya pikir adalah sesuatu yang baru. Saya juga senang. Hanya saja saya kurang tahu berapa banyak yang akan belajar karena saya katakan kalau boleh 20 orang paling banyak. Kalau mengajar bahasa itu lebih bagus 20 orang.

Bukankah sudah dibicarakan? Pembicaraan kami bagus sekali. Kami sudah seperti saling kenal lama. Itu enak, saya senang sangat akrab. Dan awalnya saya membayangkan kalau saudara-saudara kita dari muslim ini, pakaiannya pun lain, berbicaranya agak diatur-aturlah. Tetapi ini nggak. Pembicaraan kami layaknya seperti

Salah satu kelebihan bangsa Israel adalah mereka tetap memegang bahasanya di mana pun mereka berada, baik itu di Amerika, Rusia dan Israel sendiri.

Cara menulisnya juga sama dengan bahasa Arab, dari kanan ke kiri. Jadi tetap seperti yang ada di Alkitab. Tapi sudah berubah sedikit dari bahasa yang

membuat kagum sama mereka, apa yang membuat mereka begitu ingin belajar bahasa Ibrani?

Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar mahir berbahasa Ibrani?

Pada saat saya belajar bahasa Ibrani, guru saya adalah seorang Jerman yang



Dosen Bahasa Ibrani SM, Siahaan didampingi Pemred Berita Indonesia Robin Simanullang bercengkrama dengan Syaykh AS Panji Gumilang yang didampingi Abdul Halim di Wisma Tamu Al-Islah.



Dr. SM, Siahaan saat diwawancarai Berita Indonesia

sudah lama saling kenal. Saya rasa Syaykh itu sangat baik dan Pak Abdul Halim juga baik. Sangat ramah. Saya tanyakan kira-kira pesertanya 20 orang. Terus Syaykh menjawab bisa.

Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih jauh soal bahasa Ibrani ini? Saya mempelajari bahasa Ibrani yang dijumpai dalam Alkitab, bahasa yang tidak dipergunakan secara modern. Sedangkan orang Ibrani sekarang menggunakan bahasa Ibrani modern.

lama menjadi bahasa yang modern. Seperti bahasa Batak. Sudah banyak bahasa Batak yang tidak saya mengerti umpamanya. Kalau dibandingkan dengan tulisan Arab, arah tulisannya sama dari sebelah kanan ke kiri. Hanya bahasa Ibrani lebih empat persegi sedangkan bahasa Arab meliuk-liuk. Saat bertemu, Syaykh banyak mengungkapkan beberapa bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani. Walaupun ada sedikit perbedaan-perbedaan tapi banyak yang diketahuinya. Jadi yang

juga ahli dalam Perjanjian Lama. Seorang ahli teologia yang belajar Perjanjian Lama harus tahu bahasa Ibrani. Pada semester pertama, saya belajar 6 hari dan setiap harinya belajar 2 jam. Dan pada semester berikutnya dikurangi namun membacanya semakin diperbanyak.

Waktu saya belajar bahasa Ibrani, tiap hari harus ditanya, mulai dari kosa kata dan artinya. Tiada hari tanpa bahasa Ibrani, mulai dari menuliskannya dan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Bisa dibayangkan, Al-Zaytun ingin belajar 6 bulan. Jadi yang ingin kita transfer hanya sekedar mengetahui. Jadi memerlukan kesabaran juga untuk mengajarkannya, misalnya supaya membaca dua atau tiga kata.

Itulah yang saya pikirkan setelah kembali dari Al-Zaytun. Bagaimana mereka jangan cepat bosan tetapi tetap ingin mempelajarinya. Namun, karena mereka sudah belajar bahasa Arab, maka dalam pikiran saya, mereka sudah mengerti bagaimana mempelajari teks yang sulit. Metode itulah yang mungkin bisa dilakukan. Kalau mempelajari bahasa hidup, kita harus bicara. Saat saya belajar bahasa Jerman, saya harus berhubungan dengan orang Jerman, dengan begitu akan semakin cepat kita memahami sebuah bahasa. Sedangkan bahasa Ibrani adalah bahasa mati jadi

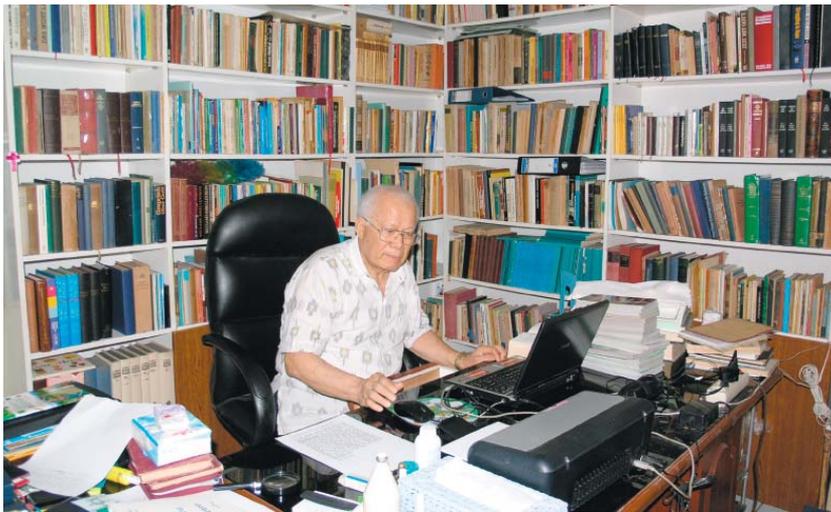
Harus mengenal huruf, dia harus berulang membaca dan menuliskannya. Jadi semua huruf Ibrani harus bisa ditulis serta memerlukan latihan yang banyak.

harus banyak mengetahui dulu baru bisa membaca bahasa Ibrani kuno dalam Alkitab.

Cara menulis bahasa Ibrani pun agak sukar. Dan saya sedang berpikir bagaimana mengajarkan menulis dengan baik. Belajarnya harus diulang-ulang. Saya jadi teringat kembali, waktu pertama belajar bahasa Ibrani. Satu lembar hanya untuk menuliskan huruf alef dari huruf yang kasar sampai yang halus. Itu metode yang saya terapkan dalam satu bulan yaitu hanya untuk menulis dan kemudian membaca.

Belajar bahasa Ibrani juga cukup rumit. Di mana penyebutan untuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga laki-laki, orang ketiga perempuan, kami, mereka, mereka laki-laki, mempunyai istilah tersendiri. Menurut saya, bahasa yang saya kenal inilah yang paling sulit.

Oleh sebab itu, belajarnya lambat-lambat namun ada keseriusan. Harus mengenal huruf, dia harus berulang membaca dan menuliskannya. Jadi semua huruf Ibrani harus bisa ditulis



Di usianya yang semakin senja, Pdt. SM. Siahaan masih aktif menulis beberapa buku.

serta memerlukan latihan yang banyak. Dan yang saya optimis mereka dapat mempelajarinya karena mereka sudah biasa mempelajari bahasa Arab dari kanan ke kiri. Setelah itu dilanjutkan dengan gramatik. Melatih dari alphabet, satu kata secara perlahan-lahan sampai terbentuk satu kalimat. Jadi harus sabarlah mengerjakannya dan mereka sendiri harus memiliki keseriusan untuk belajar sendiri. Jadi ini memerlukan waktu dan dosen atau guru yang berpengalaman.

Menurut pengalaman Bapak, butuh waktu berapa lama agar bisa mahir?

Oh kalau itu harus lama. Saya harus ke Eropa beberapa semester, di Eropa lagi saya belajar bahasa Ibrani. Karena ini

bahasa Alkitab, jadi kalau sudah tahu cara membaca dan sedikit grammarnya, dia bisa belajar sendiri. Yang penting dia bisa membaca, jadi kalau sudah mengerti bisa belajar sendiri.

Apakah tidak ada sistem belajar bahasa Ibrani dengan menggunakan audio? Mendengar cara melafalkannya?

Mempelajarinya harus langsung. Sebenarnya yang penting bisa membaca. Kalau semakin biasa membaca, membuka kamuspun akan terbiasa. Kalau mempelajari bahasa Ibrani harus punya kamusnya.

Berdasarkan pengalaman Bapak mengajar mahasiswa bagaimana?

Sekarang saya sedang mengajar di Institut Teologi dan Pendidikan Pelita Bangsa. Sebenarnya saya ingin mengajar ke level yang lebih tinggi seperti tafsiran dan sebagainya. Namun, saya berpikir mereka ini ingin belajar bahasa Ibrani mengapa tidak saya ajarkan saja. Karena yang bisa mengajar bahasa Ibrani sekarang, tidak banyak di Indonesia. Tidak semua pendeta yang bisa mengajarkan bahasa Ibrani. Di Universitas HKBP Nommensen hanya saya sendiri, dan sekarang saya tidak di situ lagi. Jadi yang beruntung sekarang adalah sekolah tempat saya mengajar.

Pengajar bahasa Ibrani di Indonesia berapa banyak Pak?

Dari 1.500 pendeta yang bisa baca bahasa Ibrani paling-paling ada 100, hanya baca belum bisa mengerti. Saya harus mempelajari bahasa Ibrani karena saya bidang Perjanjian Lama. Maka harus diperdalam dengan bahasa Ibrani. Kalau saya mempelajari misalnya sistematika, dogmatik dan yang lainnya, tidak perlu belajar bahasa Ibrani.

Kenapa Bapak tidak memilih bidang yang lain?

Di dalam ilmu teologi itu ada 8 bagian yaitu: Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sejarah gereja, dogmatik, etika, ilmu agama dan seterusnya. Saya lebih suka Perjanjian Lama makanya saya disuruh ke Eropa. Pada waktu itu, kami berangkat ke Eropa tiga orang. Ada satu Perjanjian Baru, DR Sihite (ke Amerika), dan saya Perjanjian Lama, dan Dr Hutauruk, sejarah gereja.

Kesibukan Bapak sekarang apa saja?

Mengajar, hanya satu kali dalam satu minggu yaitu pada hari Senin. Pada hari Selasa kesibukan orangtua di Gereja. Saya ini orangnya tidak bisa diam.

■ BI-MLP-BHS

Memacu Revitalisasi dan Reaktivasi

Revitalisasi dan reaktivasi menjadi program pemerintah sejak awal. Potensi sekecil apapun di bidang perkeretaapian dimanfaatkan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat.

Sejauh mana kebijakan regulator untuk meningkatkan *performance* perkeretaapian, bagaimana pula munculnya wacana BLU dan aplikasi *Zero Accident*, UU 23/2007 serta tujuan Norma Standar Prosedur. Semua secara terbuka dijelaskan oleh Tundjung Inderawan, Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan kepada Samsuri dari *Berita Indonesia*. Berikut petikannya.

Pendapat Bapak tentang *zero accident* di perkeretaapian?

Roadmap to zero accident turut menjadi bagian yang melekat dalam setiap perjalanan kereta api. Sedini mungkin mengenali benih-benih potensi akan terjadinya kecelakaan dan berupaya menekan kemungkinan itu. Bibit yang awal itu perlu dicegah maka pembenahan sarana dan prasarana menjadi salah satu jalan menuju *zero accident*.

Sejauhmana *performance* perkeretaapian dewasa ini?

Berbagai kebijakan dan strategi sebagai upaya peningkatan *performance* perkeretaapian, antara lain menerbitkan Norma Standar Prosedur (NSP), *maintenance* dan *low performance* dan setiap masinis wajib memiliki sertifikat dalam menjalankan tugasnya.

Artinya?

Seumpama sebagai anak, PTKA perlu mendapat perhatian, bagaimana tumbuh berkembang, maju dan siap berkompetisi. Pada waktunya mampu mandiri dan secara perlahan dilepas. Karena dengan multi operator, maka PTKA siap bersaing dengan kompetitor lain, termasuk dengan swasta dan pemerintah daerah di bidang usaha yang sama. Demi kepentingan nasional, sebagai regulator, kita bersikap adil sesuai amanat UU 23/2007.

Apa pengertian BLU dan UPT?

Badan Layanan Umum (BLU) dan UPT (Unit Pelaksana Tugas), nama itu muncul dan sebatas wacana. Sebagai regulator, kita melihat begitu banyak dan variatif tanggung jawab PTKA, dari bisnis inti (operasional) sampai stasiun. Sebagai

Bapak, kami melihat ini sebagai beban bagi PTKA. Bagaimana meningkatkan *share* angkutan penumpang dan barang secara nasional, itu perlu mendapat perhatian utama.

Lebih fokus, maka prasarana (stasiun) perlu dikelola dalam unit tersendiri (anak perusahaan), seperti kereta Commuter Jabodetabek. **Perlain**, **Batu** lu diperbangkan **anak** sahaan, **terserah** Tidak ada



Tundjung Inderawan

kebijakan regulator untuk melemahkan. Sebaliknya, Perkeretaapian Indonesia semakin maju, itu tujuannya.

Kapan PP sebagai aplikasi UU 23/2007 terbit?

Era sudah berubah, baik yang menyangkut prasarana maupun sarana secara bertahap dikeluarkan. Perubahan yang memungkinkan *performance* Perkeretaapian Indonesia berkembang maju. Saat ini, tahap finalisasi dan sebatas koreksian, cek kata, kalimat, titik dan koma, secara substansi tidak ada masalah. Bulan ini (Juli) satu peraturan pemerintah (PP) terbit, dan satu PP lagi diharapkan selesai akhir tahun ini. Sebelumnya, terdiri dari 5 PP. Setelah digabung, menjadi 2 PP. Masalah teknis dibahas belakangan.

Sejauh ini, apa sudah ada calon investor melakukan investasi di perkeretaapian?

Secara konkret belum ada, dari perkem-

bang dan berbagai masukan, ada di antaranya menunggu peraturan pemerintah, sebagai pedoman mereka melakukan investasi. Saya optimis, peluang investasi dalam derap pembangunan perkeretaapian cukup menjanjikan.

Bisa dijelaskan, pengertian kereta khusus?

Pemahamannya, kereta yang digunakan mengangkut barang dari perusahaan yang bersangkutan. Semisal, angkutan batubara dengan kereta api dari hulu (produksi) ke hilir (pembeli) atau *point to point*, ini disebut kereta khusus. Akan tetapi di tengah perjalanan, mengangkut di luar bisnis intinya, itu kategori umum. Kereta khusus tidak perlu melalui tender, sebaliknya bila menyangkut kepentingan umum, harus tender.

Apa makna revitalisasi dan reaktivasi?

Program kita jelas ke sana, revitalisasi (menghidupkan kembali) dan reaktivasi terhadap jalur kereta yang memiliki potensi, biar sekecil apapun diharapkan akan meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti Bogor-Sukabumi dan berkembang ke arah

Sukabumi-Cianjur.

Kami mendengar kebutuhan rel 54 semakin mendesak, apa benar?

Benar, dibutuhkan sekitar 1.000 km rel (R) 54. Saat ini sedang dilakukan kerja sama untuk mendapatkan loan dari China, baik keperluan *double track* Tegal-Pekalongan, Cirebon-Kroya, Kutoarjo-Jogjakarta atau kebutuhan di tempat lain di Jawa dan di Sumatera. Sementara, pembangunan *track* di stasiun Prujakan ke arah Selatan, itu diperlukan lintas operasional.

Pandangan anda terhadap penggunaan produk dalam negeri?

Seperti penggunaan produk INKA, PT LEN, Pindat atau lainnya makin kita dorong agar berkembang maju. Bila dimungkinkan R54 mampu dibuat oleh Krakatau Steel, kita sangat mendukung itu. Penting secara teknis sesuai kebutuhan, baik keandalan maupun tingkat keselamatan terpenuhi, kita *support*.

RI

Parade Saling Serang

Saling serang antartim sukses dalam sebagian iklan dan isu kampanye termasuk masih wajar dan memang seharusnya dilakukan. Namun pernyataan Andi Mallarangeng awal Juli lalu sudah sangat berlebihan.

Saling serang antartim sukses mulai mengemuka saat SBY memilih Boediono menjadi pendampingnya untuk pemilu presiden Juni mendatang. Pilihan SBY ini membuat PAN dan PKS tidak puas karena keduanya telah memiliki cawapres untuk diajukan, yaitu Ketua MPR Hidayat Nurwahid dari PKS dan Mensesneg Hatta Rajasa dari PAN.

Kedua partai itu menilai Boediono sebagai penganut paham ekonomi neoliberal yang hanya pro kepentingan pasar bebas dan bukan rakyat. Bahkan, penolakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Amin Rais memperlihatkan sikap dengan tidak menghadiri deklarasi pencalonan cawapres meski tetap sepakat mendukung SBY sebagai presiden mendatang. Sedangkan PKS akhirnya menyetujui pencalonan Boediono sebagai cawapres.

Saling serang kian memanas saat anggota tim sukses Rizal Mallarangeng mengadakan konferensi pers di Bravo Media Center, 25 Mei lalu. Pernyataan kedua pasangan capres-cawapres lain yang dialamatkan pada Boediono membuat gerah pakar pencitra SBY ini. Ia berpendapat penyebutan ekonomi neoliberal atau kerakyatan hanya permainan istilah.

Rizal mempertanyakan klaim pro rakyat Prabowo selama ini. Padahal, semua tahu jajak karier pensiunan jenderal bintang tiga ini, yakni dipecat oleh TNI. Ia mengkritik Prabowo yang memiliki 98 ekor kuda bernilai miliaran rupiah. Karena itu ia meminta Prabowo untuk introspeksi diri dan tidak menyerang orang dengan seenaknya. "Sejarah hidup dia itu apa? Prabowo itu seorang prajurit yang dipecat dan tidak pernah membela ekonomi rakyat," ungkap Rizat, saat itu.

Selain itu, ia juga membantah tuduhan mantan menko perekonomian di era Megawati, Kwik Kian Gie yang kini mendukung JK-Win. Saat diskusi di Negarawan Center, Kwik menyebutkan Boediono itu memang penganut neoliberal dan titipan Barat. Bahkan Kwik berani menerima tantangan berdebat dengan Boediono untuk membuktikannya.

Sehari setelah pernyataan Rizal, Selasa (26/5), kubu Mega mengadakan konfe-

rensi pers di Mega-Pro, Jakarta. Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Fadli Zon mengatakan pernyataan Rizal itu tidak berdasar, tidak rasional dan kalap. Hal itu membuktikan kondisi tim sukses SBY-Boediono merasa terancam oleh pesaingnya. Fadli meluruskan bahwa Prabowo bukan dipecat dari TNI, tapi diberhentikan dengan hormat. "Itu sebuah keputusan politik karena seorang militer di jalur komando harus berani mengambil risiko. Berbeda dengan jalur staf, yang tangannya selalu bersih," katanya menyindir capres lain. Fadli mengimbau Rizal dan tim sukses SBY agar berpolitik secara santun dan seharusnya mengkritik gagasan yang ditawarkan, bukan menyerang pribadi pasangan calon.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini juga menyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan justru berupaya agar rakyat menjadi kaya. "Tidak seperti mereka yang penganut neoliberalisme," katanya menuding balik lawan politiknya.

Mengenai harta Prabowo yang berupa kuda-kuda yang super mahal, Fadli menjelaskan, kuda-kuda yang kualitasnya bagus dan mahal itu tidak semata-mata dinikmati Prabowo saja. Menurut Fadli, kuda-kuda itu diikutkan dalam Sea Games tahun 2007. Prabowo membawa tim polo Indonesia ke Thailand. Atlet-atlet polo yang dibina Prabowo bukan dari kalangan bangsawan atau aristokrat melainkan dari kalangan anak petani.

Selain itu, saat ramah tamah di rumah Megawati, 28/4 lalu, Megawati melancarkan serangan balik. Ia meminta pemerintah tidak mengklaim pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sebagai kinerja mereka sendiri. Karena awal pemancangan jembatan itu dilakukan saat ia masih menjabat sebagai presiden, yaitu 20 Agustus 2003. Mega juga mengkritik banyak menteri di kabinet dalam tim sukses SBY-Boediono dan JK-Win. Menurutnya, saat pemilu tim sukses seharusnya tidak berasal dari anggota kabinet karena akan mengurangi konsentrasi dan waktu mereka di pemerintahan. Hal ini bisa menyebabkan roda pemerintahan tidak berjalan efektif dan merugikan masyarakat.

Capres dari Partai Demokrat, Susilo

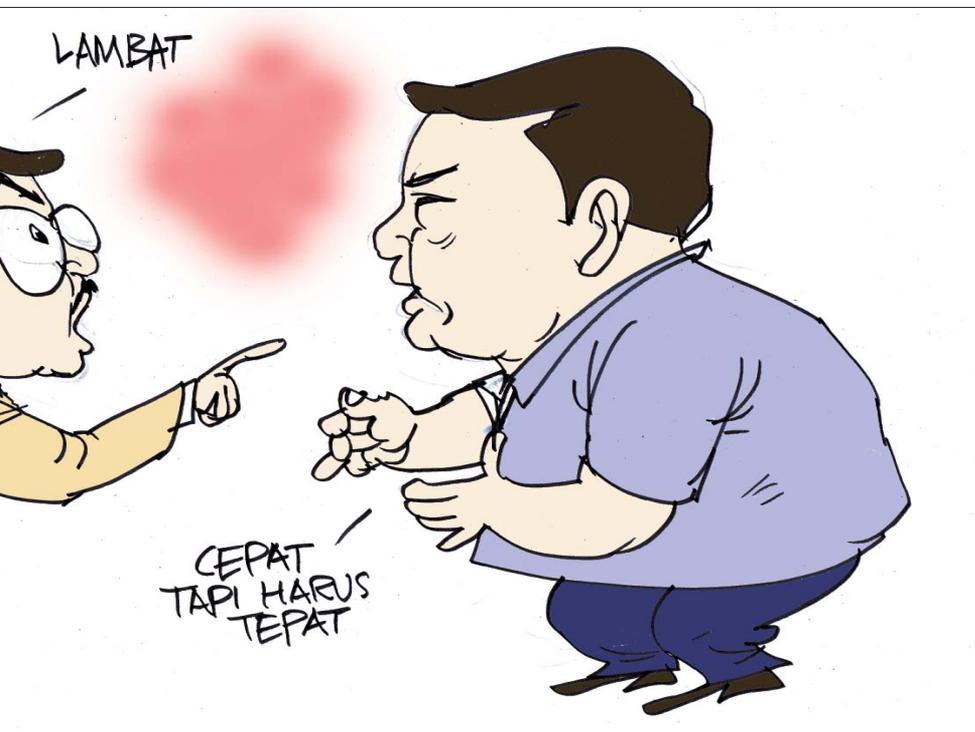


Bambang Yudhoyono juga tidak mau ketinggalan. Ia menyindir bahwa pejabat jangan merangkap sebagai pengusaha lantaran dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Capres dari Partai Golkar Jusuf Kalla menyentil balik. Sindiran SBY itu memang tampaknya ditujukan kepada JK yang memiliki latar belakang sebagai mantan saudagar. "Kalau ada yang melarang keluarga pejabat tidak boleh berdagang, itu justru diskriminasi yang luar biasa dan melanggar HAM," kata JK usai bersilaturahmi di kediaman Habib Segaf Al-Jufri di Palu, Sulteng.

Di tempat dan waktu yang berbeda, JK kembali menyindir. Dalam konteks ke-mandirian bangsa, JK mengatakan, pemimpin jangan ragu. Pemimpin yang ragu tak bisa membawa kemajuan bagi bangsa. "Kita ini bisa. Jangan ragu-ragu. Hanya peragu yang tidak bisa membawa maju," sindirnya ketika membuka Rakernas I KNPI di Palu, Sulawesi Tengah (5/6). JK menjelaskan sikap dirinya yang tanpa ragu mengambil keputusan untuk kepentingan bangsa meskipun keputusan itu mengandung risiko besar. Ia mencontohkan keputusannya yang tak mau mengeksport gas ke Jepang dan negara lain dengan maksud untuk menggunakan gas itu bagi kebutuhan industri dalam negeri.

Tak hanya itu, JK juga menyindir capres

erang



lain yang kerap berbicara soal perdamaian. Jika hanya pidato, katanya, memang banyak orang yang pandai bicara. "Tapi, begitu ada konflik, semua lari, hanya tinggal di Jakarta," kecamnya. "Cuma bisa buat darurat sipil." Beda dengan dirinya yang terbukti telah mendamaikan tiga konflik di daerah berbeda. JK memaparkan, konflik Maluku berhasil didamaikannya selama 17 hari dan Poso memakan waktu dua pekan. Sedangkan konflik di Aceh membutuhkan waktu enam bulan untuk mendamaikannya. "Karena itu, saya memaknai perdamaian dari hati, tidak hanya di mulut."

Dalam kampanye di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 13/6, JK kembali menyatakan kalau dia paling berperan dalam perdamaian di Aceh. Peran tersebut salah satunya terlihat dari kesediaannya menandatangani nota perdamaian. Klaim JK sontak mendapat respon dari kubu SBY. JK disebut tidak beretika. Tim sukses SBY-Boediono malah menegaskan bahwa keberhasilan perdamaian di Aceh terwujud di bawah komando SBY. Perdamaian di Aceh terjadi karena adanya keputusan presiden (kep-pres), bukan keputusan wakil presiden. Kubu JK kembali membalas dengan mengatakan, SBY dan tim suksesnya memang pintar mengklaim apa yang tidak

dilakukannya menjadi pekerjaan mereka.

JK juga menyentil pasangan SBY, cawapres Boediono. Dalam acara penutupan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Balikpapan, Kaltim, JK mengaku pernah sangat marah kepada menko perekonomian yang saat itu dijabat Boediono. Penyebabnya, Boediono tidak menyetujui pemberian jaminan terhadap pembangunan listrik 10.000 MW. JK mengaku marah karena negara tidak mau mengupayakan listrik untuk rakyat, sementara kepada perbankan, Boediono merengek-rengok meminta diberi jaminan 100 persen untuk mengatasi krisis.

"Itulah pandangan liberal. Tidak usah berteori soal neoliberal. Tapi lihat praktiknya, menjamin perbankan, rakyat yang menanggung. Saya hampir lempar, saya pukul meja. Walau dia bilang sudah disetujui pimpinan, saya tidak peduli," kata JK. Sentilan JK ini praktis membuat panas kuping SBY dan tim suksesnya.

Andi Mallarangeng, anggota tim sukses SBY keceplosan saat 'menyerang' balik kubu JK. Dalam kampanye cawapres Boediono di GOR Mattoangin, Makassar, Rabu (1/7), Andi menyebutkan orang Sulawesi Selatan (Sulsel) belum saatnya menjadi Presiden RI periode 2009-2014.

"Bagaimana dengan anak Sulawesi Selatan? Ada waktunya masing-masing, perjalanan masih panjang. Banyak anak Sulsel yang bisa memimpin negeri ini suatu ketika," kata Andi.

Pernyataan Andi Mallarangeng ini langsung mendapat kecaman karena dinilai rasis. Forum Rektor Indonesia Simpul Sulsel, Koalisi Rakyat Sulsel Anti Rasis, mahasiswa, sejumlah tokoh dan aliansi di luar Sulsel, menuntut Andi agar meminta maaf atas pernyataannya itu. Hingga tulisan ini diturunkan, Andi tetap bersikukuh tidak akan meminta maaf.

Tidak Bermutu

Pakar komunikasi Effendi Ghazali menilai, pencitraan melalui semua iklan dan kampanye tim sukses capres-cawapres sebetulnya tidak memiliki banyak pesan bermanfaat. Isi sebagian iklan itu sebagian didominasi oleh pujian atas masing-masing capres-cawapres untuk menggaet dukungan masyarakat. "Komunikasi politik saat ini relatif kosong. Isinya hanya 20 persen. Itu kayak iklan lotion yang bisa memutihkan kulit dalam tujuh hari, padahal tidak mungkin," katanya.

Mengenai saling serang antartim sukses dalam sebagian iklan dan isu kampanye, menurut Effendi, masih wajar dan memang seharusnya dilakukan. Dalam ilmu komunikasi politik, saling serang akan mendorong terjadinya perbandingan (*contrasting*). Masing-masing tim akan menampilkan kelebihan capres-cawapres pilihannya dan mengungkap kelemahan pesaing. Masyarakat akhirnya bisa lebih mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan semua capres-cawapres.

Selain itu, saling serang dinilai mampu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pemilih dalam pemilu. Hal itu karena masyarakat mendapat informasi cukup dan tidak menjadi apatis terhadap pemilihan capres-cawapres. Namun, saling serang seharusnya dilakukan secara positif dan tidak negatif. Saling serang menjadi negatif jika data yang digunakan keliru, diarahkan pada isu yang tidak ada kaitannya dengan kemampuan capres-cawapres dalam memimpin, dan terlalu berlebihan.

Effendi menjelaskan, saling serang itu penting jika menggunakan data yang benar sehingga mendukung proses demokratisasi dalam pemilu. Saling serang seharusnya lebih fokus pada kinerja dan gagasan. Bila saling serang dilakukan secara positif, menjadi kontribusi dalam pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Masyarakat menjadi terdorong untuk mengkritik berbagai data yang terungkap dalam kegiatan saling serang antartim sukses. ■ ROY

Komidi Putar Bernama Ambalat

Pertikaian antara Indonesia dan Malaysia soal Ambalat dipastikan masih akan terus berputar-putar. Meski pemerintah Indonesia sudah berulang kali dilecehkan, akhir cerita selalu berakhir bahagia dengan memaafkan Malaysia. Tidak ada kejelasan, siapa yang menang atau kalah.

Belum adanya tapal batas yang jelas antara wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga memberikan peluang bagi negara-negara lain untuk mengklaim sebuah wilayah yang berada di antara dua negara dengan secara sepihak. Apalagi Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia - sekitar 17.500 pulau, masih belum didukung batas-batas yang jelas dan akurat tentang keberadaan pulau tersebut. Dan masih banyak pulau-pulau yang belum memiliki nama.

Sedikitnya ada beberapa pulau yang memiliki persinggungan dengan batas-batas laut dengan 10 negara tetangga yaitu: India di ujung utara Sumatera (dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana pulau terluarnya yaitu Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Benggala, Pulau Rondo); Malaysia di sepanjang Selat Malaka (berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), dengan pulau yang merupakan titik terluar adalah Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Anambas di Provinsi Riau, Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Timur); Singapura di sepanjang Selat Philip, dimana pulau terluarnya adalah Pulau Nipa (Provinsi Riau); Thailand di bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman (pulau terluarnya adalah Pulau Rondo (Provinsi NAD).

Dengan Vietnam di daerah Laut Cina Selatan dengan pulau terluarnya ada Pulau Sekatung (Provinsi Riau Kepulauan, Kabupaten Natuna); Philipina di daerah utara Selat Makasar, dengan pulau-pulau terluarnya adalah Pulau Marore dan Miangas yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara; Republik Palau di daerah utara Laut Halmahera, dimana pulau terluarnya adalah Pulau Fani, Fanildo dan Bras (Provinsi Papua); Australia di sekitar selatan Pulau Timor dan Pulau Jawa; Timor Leste di sekitar wilayah Maluku dan NTT dengan pulau terluarnya adalah P Asutubun (Provinsi Maluku), Pulau Batek (Provinsi NTT), Pulau Wetar (Provinsi Maluku); Papua Nugini di sekitar wilayah Jayapura dan Merauke (tidak memiliki pulau terluar).

Akibat kurangnya respon pemerintah

mengatasi masalah perbatasan dan minimnya mobilitas di daerah-daerah perbatasan untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia telah mengakibatkan beberapa titik perbatasan rawan untuk dikuasai asing. Contohnya beberapa tahun yang lalu, Indonesia harus melepaskan dua buah pulau Indonesia yang berada di antara perbatasan Pulau Kalimantan dan negara Malaysia yakni Pulau Sipadan dan Ligitan (2005).

Belakangan mencuat kembali kasus Ambalat yang sudah diributkan sejak 2005. Ribut-ribut soal Ambalat ini dipicu oleh pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal-kapal perang Diraja Malaysia (KD). Terhitung sebanyak 110 kali, Malaysia melakukan pelanggaran memasuki perairan Indonesia. Di antaranya 76 kali pada tahun 2007, 23 kali pada tahun 2008 dan 11 kali pelanggaran di tahun 2009.

Pemerintah Indonesia sendiri sejak tahun 1980 telah melakukan beberapa kali protes terkait dengan pembuatan peta 1979 secara sepihak oleh Malaysia dan mengklaim blok Ambalat. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) telah menyampaikan Nota protes yang ke-36 (4/6) kepada pemerintah Malaysia atas sikap arogansi negara tersebut yang semena-mena memasuki wilayah kedaulatan Indonesia di perairan Ambalat. Seluruh nota protes pemerintah tersebut menegaskan Ambalat adalah wilayah Indonesia. Tapi, negeri jiran itu berdalih kapal perangnya tidak sengaja memasuki perairan di kawasan Kalimantan Timur tersebut.

Sebenarnya, klaim Malaysia atas Blok Ambalat telah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 1979. Malaysia mengklaim Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan itu sebagai miliknya, lalu memasukkannya ke dalam peta wilayah mereka. Namun, peta tersebut tidak diakui dunia internasional.

Indonesia sendiri mengklaim Blok Ambalat dengan melakukan perlindungan hukum terhadap nelayan dan eksplorasi minyak bumi oleh pemerintah sejak 1960-an dan patroli rutin yang dilakukan TNI-AL di wilayah tersebut.

Di samping itu, posisi Indonesia berda-



sarkan hukum sangat kuat sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) UNCLOS 1982. Sehingga Malaysia tidak bisa menerapkan UNCLOS 1982 untuk mengklaim Blok Ambalat sebagai wilayahnya, karena Malaysia bukan negara kepulauan. Walaupun penerapan hukum itu berlaku untuk semua anggota PBB, tetapi penerapan konvensi hukum laut tersebut hanya untuk negara kepulauan (archipelago state) yang tidak mengenal adanya laut bebas. Sehingga berdasar UNCLOS 1982 tersebut perairan Indonesia menjadi suatu wilayah yang utuh, dimana batas wilayahnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya.

Meski demikian, Malaysia menunggu Indonesia agar membuat kesalahan dengan melakukan provokasi memasuki wilayah perairan Indonesia. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, "Kita jangan terpancing melakukan tembakan pertama ketika kapal perang Malaysia memasuki wilayah kita. Ini akan merugikan posisi Indonesia secara hukum," katanya. Seruan Menhan ini ba-

Ambalat



nyak benarnya. Sebab, kemenangan Malaysia di Mahkamah Internasional soal pulau Sipadan dan Ligitan, menjadi modal semangat untuk memperluas wilayahnya ke Indonesia.

Malaysia yakin bila dibawa ke Mahkamah Internasional maka Ambalat akan berhasil direbutnya. Langkah awalnya dengan memancing dunia internasional bahwa di perairan itu terjadi masalah batas laut. Bila dunia internasional terpancing dengan provokasi ini maka kasus ini bisa dibawa ke Mahkamah Internasional sehingga kasus Sipadan-Ligitan bisa terulang.

Alasan lain mengapa Malaysia begitu getol berulah karena di Perairan Ambalat terdapat emas hitam atau minyak. Menurut data Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kawasan ini memang mempunyai kandungan minyak yang kaya. Di wilayah perairan timur Kalimantan itu, kandungan minyaknya diperkirakan mencapai 700 juta hingga satu miliar barel, sementara kandungan gasnya diperkirakan lebih dari 40 triliun kaki kubik.

Sengketa soal minyak ini muncul se-

telah pada tahun 2007, perusahaan minyak nasional kedua negara memberikan konsesi minyak dan gas di lepas Pantai Sebatik itu, saling tumpang tindih. Perusahaan Italia, Eni, beroperasi di blok Ambalat berdasarkan kontrak bagi hasil dengan Pertamina yang ditandatangani pada tahun 1999. Namun perusahaan minyak Malaysia, Petronas, kemudian memberikan konsesi kepada perusahaan minyak Belanda, Shell Plc, pada tahun 2005.

Pertikaian soal Ambalat ini harus dapat diselesaikan secara bilateral. Indonesia dan Malaysia yang merupakan sesama anggota ASEAN hendaknya dapat menyelesaikan persoalan ini di tingkat Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara tersebut. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Arwani Irawati MA. Ia mengatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan konflik Ambalat melalui forum diplomasi secara bilateral tapi sampai saat ini belum ada penyelesaian konkrit. Menurutnya dengan diselesaikannya konflik tersebut di tingkat ASEAN Indonesia berpotensi memenang-

kannya.

Adapun pertimbangan-pertimbangan lainnya adalah blok Ambalat yang menjadi wilayah sengketa lebih condong masuk ke perairan Indonesia dan Indonesia sudah lebih dulu menemukan sumber minyak di Blok Ambalat yang oleh Malaysia disebut Blok ND-6. Dan jika Malaysia tidak mengakuinya akan berpotensi mengundang konflik dengan beberapa negara lain anggota ASEAN karena beberapa negara anggota ASEAN lainnya akan membela Indonesia.

Di sisi lain, ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan Ambalat menjadi faktor pemicu untuk Malaysia terus memprovokasi. Menurut pengamat Bantarto Bandoro yang juga dosen Universitas Indonesia (UI) kepada Republika (8/6/2009), pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas dalam menyikapi persoalan tapal batas dengan Malaysia. Yang mengakibatkan mengambang status hukum perbatasan antara Indonesia dengan dengan Malaysia.

Oleh sebab itu, pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit berpendapat, jika Pemerintah Indonesia yakin Blok Ambalat yang menjadi lokasi konflik adalah wilayah Indonesia, maka pemerintah harus bersikap tegas dan jika perlu memberlakukan disiplin militer. Setiap pelanggaran yang kerap dilakukan kapal atau pesawat asing yang melanggar batas wilayah perairan Indonesia diterapkan aturan yang berlaku pada hukum internasional.

Menurutnya, Indonesia juga harus berani menyelesaikan konflik Ambalat di Mahkamah Internasional. Dengan mempersiapkan antisipasi kemungkinan risiko atas tindakan tegas dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang cukup yang dijadikan bukti konkret yang menyatakan Blok Ambalat adalah wilayah Indonesia. Jangan sampai blok Ambalat yang mengandung nilai ekonomis tinggi terlepas yang berdampak terhadap wibawa Indonesia di dunia internasional.

Sementara itu, pengamat pertahanan Syarwan Hamid mengatakan, keberanian kapal-kapal perang Malaysia memasuki wilayah perairan RI karena pertahanan negara lemah. Dan karakter pemimpin negara yang tidak tegas dan lemah membuat prajurit di lapangan juga kurang berani menghadapi lawan di daerah sendiri. Syarwan mensinyalir, keberanian kapal-kapal Malaysia menerobos Blok Ambalat karena yakin RI tidak akan menempuh jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. ■ HBS, LOR

Sekarang Jadi Presiden Paling

H. PROBOSUTEDJO: Sekarang jadi presiden itu paling enak, bisa bagi-bagi uang langsung tunai seenaknya dan tidak harus mempertanggungjawabkannya kepada MPR karena undang-undangnya sudah diamandemen. Lain dengan dulu, sebelum habis masa jabatannya, harus dipertanggungjawabkan kepada MPR, sekarang tidak. Jadi, salah atau tidak, begitu saja seenaknya.

Sekarang itu kita betul-betul sedang melakukan neoliberal. Jadi kalau Boediono tak senang dikatakan neoliberal, sebenarnya SBY yang sedang melakukan neoliberal. Pengusaha asing boleh masuk ke Indonesia dengan bebas. Contohnya, Carrefour di mana-mana, bangunannya yang begitu megah. Dan di sana dijual dari yang terbesar sampai yang terkecil,

Pengusaha nasional H. Probo-sutedjo mengemukakan hal itu kepada Berita Indonesia (Jumat 12/6/09) di rumah kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sekarang ini, kata Probo, seakan-akan presidennya baik sekali membagi-bagi duit yang dinamakan dengan BLT atau bantuan langsung tunai, Rp 100.000 tiap bulan kepada 19 juta kepala keluarga, dibagi-bagi uang saja.

"Uangnya pemerintah, bukan uangnya Presiden Yudhoyono sendiri. Dibagi-bagi tetapi tidak dipertanggungjawabkan kepada MPR. Uangnya dari mana tidak ditanyakan, tidak ada yang tanya, DPR-nya juga tidak bertanya, MPR juga tidak bertanya. Asalnya uang darimana koq segitu banyak dibagi-bagi saja, ternyata pinjaman. Ternyata pinjamannya juga pinjaman komersil dengan bunga yang tinggi sampai 12%. Tapi pinjaman itu siapa yang bayar? Yang bayar rakyat," kata adik kandung satu ibu Pak Harto itu.

Berikut ini petikan pandangan Probo-sutedjo tentang berbagai hal, di antaranya, tidak adanya GBHN, tidak adanya pertanggungjawaban presiden, BLT dan utang untuk makan, ekonomi kerakyatan dan neolib, serta HTI (hutan tanaman industri). Menurutnya, jika kondisi demikian terus, Indonesia bisa bangkrut.

Reformasi itu berlebihan sehingga pertanggungjawaban presiden pun tidak ada. Rencana pembangunan tidak ada, GBHN juga tidak ada. Setelah menghabiskan uang begitu banyak, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya juga tidak ada. Pada masa Megawati juga begitu.

Begitu pula dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilu langsung, dana yang dikeluarkan begitu besar, boros. Pemborosan dana sebaiknya untuk kesejahteraan rakyat.

Nah, kalau jamannya Pak Harto dulu ada pinjaman luar negeri, tapi untuk membangun infrastruktur, untuk membangun waduk, irigasi, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan UUD 1945. Di situ disebut-



PROBOSUTEDJO: Kalau bukan neolib, Carrefour harus dibatasi

kan ekonomi disusun sebagai usaha bersama. Yang paling cocok waktu dulu itu adalah koperasi dan itu tidak jalan sama sekali sekarang. Sekarang malah sudah berlaku neoliberal.

Neoliberal, pengusaha-pengusaha asing boleh masuk Indonesia, boleh bersaing dengan pengusaha-pengusaha kecil. Seperti bank-bank asing, kalau jamannya Pak Harto, tidak boleh, hanya boleh di Jakarta. Sekarang, di tiap daerah provinsi bahkan kabupaten, sudah buka City Bank dan bank-bank asing yang lain.

sampai lengkuas, serei pun ada dijual di situ. Bagaimana pengusaha kecil, pengusaha pribumi mau bersaing dengan itu, itu kan neoliberal?

Belum lagi dengan pendidikan, sekolah asing diperbolehkan buka di Indonesia. Terus biaya pendidikannya mahal. Jadi nasionalismenya itu sudah nggak ada. Itulah akibat reformasi yang bukan kebablasan tapi memang tidak punya program.

Reformasi itu dulunya tidak direncanakan. Sampai mengobrak-abrik Undang-

ng Enak

Undang Dasar. Coba, di negara berkembang program pembangunan. Di Indonesia, dulu ada GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Kalau negara maju, di situ nggak ada GBHN, Amerika barangkali nggak ada, Inggris, Eropa nggak ada. Tapi kalau negara Rusia dan China sekarang masih ada. Nah, Indonesia ini sekarang GBHN sudah tidak ada. Begitu jadi presiden, diangkat jadi presiden langsung kerja. Kerjanya, ya sesuka hati.

Pak Harto

Dulu dalam sidang kabinet Pak Harto, pernah ada yang mengusulkan dana pinjaman untuk memberi makan rakyat. Lalu bagaimana jawaban Pak Harto, "Kalau kita minjam-minjam untuk bikin tai saja akan percuma, harus digunakan untuk hal yang produktif atau infrastruktur. Sehingga nanti kita harus bisa kembalikan," kata Pak Harto.

Jadi pinjam dari luar negeri boleh, tapi harus produktif, bukan konsumtif, dan dipertanggungjawabkan. Tidak bisa asal begitu, harus dipertanggungjawabkan semua. Nah, sekarang BLT itu disuruh makan-makan saja Rp.100 ribu perbulan sama 19 juta keluarga.

Dulu ada pinjaman usaha kecil dan menengah (UKM), tetapi dipertanggungjawabkan kembali, tidak sama sekali habis begitu saja. Padahal kita diajarkan untuk memberikan kail kepada orang miskin, orang yang minta-minta itu tidak boleh, harus bekerja, kecuali fakir-miskin, cacat, tua-jompo.

Sekarang, tidak tahu siapa yang berani bisa mengembalikan kepada ekonomi kerakyatan di antara calon presiden saat ini. Kalau Yudhoyono terang nggak ada. Jadi kalau sampai presidennya Yudhoyono kembali, makin parah lagi utang Indonesia ini. Sekarang utang pemerintah sudah Rp.1.700 triliun, tiap orang Indonesia menanggung kira-kira Rp.12 juta. Utang itu pun bunga komersial sampai 12-13 persen, bukan pinjaman lunak yang bunga 6 persen.

Lalu, biarpun begitu, presiden tidak mempertanggungjawabkan itu. Itulah enak nya jadi presiden sekarang. MPR tidak tanya darimana uangnya yang dibagi-bagi itu. Sekarang DPR menerima laporan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang tidak ada undang-undangnya bahwa presiden harus mempertanggungjawabkan. Jadi seenaknya saja, DPR juga tidak mempertanggungjawabkan, tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Anggota DPR juga sia-sia, cuma



ANTRI BLT: Rakyat di berbagai tempat mengantri berdesakan untuk menerima BLT

mengontrol tapi tidak ada sanksinya. Presidennya juga begitu.

Saat ini, MPR sudah tidak mempunyai kuasa. Sudah diamandemen semua. Jadi kalau presiden sudah habis waktunya ya begitu saja. Negara ini lama kelamaan bangkrut betul. Kalau presiden yang gelagatnya seperti itu bisa bangkrut nanti. Pembangunan tidak ada. Padahal kalau bantuan liquiditas yang terakhir Rp 70 triliun, digunakan untuk membangun hutan yang rusak dan yang tidak produktif, seperti yang saya lakukan itu sampai-sampai saya dipenjara, itu paling tidak bisa membangun sepuluh juta hektar.

Satu hektar itu membutuhkan tujuh juta rupiah biayanya. Jadi bisa sampai sepuluh juta hektar tiap tahun. Dari sepuluh juta hektar yang dibuka, diratakan dengan traktor, lalu diolah, itu bisa menghasilkan apa saja. Bisa menghasilkan padi, singkong untuk tapioka, jagung, kacang, kedelai. Indonesia bisa berlebihan hasil bumi, dan bisa diekspor, jadi ada hasilnya. Tapi sekarang tidak ada pemikiran begitu. Jadi kasihan rakyat kecil, rakyat miskin.

Jadi betul-betul kalau begini caranya memerintah, seperti sekarang yang kelihatannya dianggap baik, dan dalam tempo lima tahun lagi nanti yang menggantikan begitu juga, Indonesia bisa jadi habis, bangkrut.

Jadi kalau negara ini mau berlanjut, kembali ke UUD 1945, memikirkan nasib

rakyat. Dan semuanya kerjasama, seluruh rakyat Indonesia membangun ekonomi bangsa, tidak memikirkan diri sendiri. Kalau merubah UUD 1945, diingatkannya, agar melalui referendum.

Neolib, Bukan Ekonomi Saja

Keuangan jaman sekarang ini, yang pertama yang paling untung itu adalah dari minyak. Jamannya Pak Harto, tidak mau naikkan harga minyak karena rakyat memerlukan minyak tanah untuk masak. Nah, sekarang minyak itu dinaikkan dengan harga yang tinggi, tidak peduli rakyat bisa beli atau tidak. Harganya sama dengan harga minyak di Amerika. Dulu harganya separuh dari harga minyak Amerika. Uangnya juga ke mana tidak ada pertanggungjawaban. Nggak ada keharusan untuk mempertanggungjawabkan. Presiden tidak mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya.

Padahal, dulu dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, presiden harus mempertanggungjawabkan kepada MPR. Kalau pertanggungjawaban diterima MPR, kemudian baru bisa dicalonkan lagi. Sekarang ini tidak mempertanggungjawabkan. Rakyat juga diatur masa bodoh. Oleh sebab itu, MPR perlu bersidang tiap tahun sekali untuk menilai tugas-tugas dan pekerjaan Presiden, apa yang sudah dilakukan selama setahun. Agar Presiden tidak bekerja seenaknya dan harus bertanggung jawab.

Saat ini neoliberal bukan hanya ekonomi saja, pendidikan juga termasuk neoliberal. Jadi sudah jalan. Jadi kalau orang ketakutan Boediono adalah orang neoliberalis, sebenarnya sudah jalan sekarang, pemerintah sudah menjalankan itu. Pengusaha-pengusaha asing, pengusaha besar menguasai perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Seharusnya pusat-pusat perbelanjaan seperti Carrefour tidak diperbolehkan, kalau tidak mau dikatakan neoliberal. Kalau sudah terlanjur, mereka itu (Carrefour dan sejenisnya) harus dapat menerima barang-barang bikinan rakyat dan harus dibayar kontan, jangan konsinyasi yang berarti modalnya dari rakyat. Seperti misalnya, beli cabe, sekarang umumnya konsinyasi. Konsinyasi dibayar kemudian, satu bulan. Kalau begini, rakyat yang memodali Carrefour.

Pada hal seharusnya, Carrefour memodali rakyat untuk menanam dan hasilnya harus dibeli Carrefour dengan harga pantas. Begitu pula Indofood, rakyat disuruh menanam, ada kentang dan cabe, dibiayai dan hasilnya dijual sama Indofood.

Air juga sekarang sudah dikuasai Prancis. Padahal dengan Aqua itu bisa menghasilkan uang yang luar biasa. Jadi sumber daya alam yang bisa menghidupi rakyat banyak itu mesti dikuasai oleh pemerintah untuk keperluan rakyat sebanyak-banyaknya, tapi sekarang sudah dikuasai asing. Tidak lagi sesuai dengan UUD 1945, dan tekad kemerdekaan.

Jadi kalau Indonesia ini mau bersatu terus, menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), ekonomi kerakyatan harus dijalankan. Tanpa itu, suatu

ketika, tinggal menunggu waktunya saja, bisa bangkrut.

Sekarang bagaimana mau jalankan koperasi, ada Carrefour, Giant, Hypermart dan macam-macam. Persaingannya terlalu berat. Mestinya seperti Carrefour dan Giant itu kerjasama dengan petani dan koperasi mesti diharuskan. Nah, undang-undangnya bagaimana. Jadi semuanya harus melakukan itu, baru orang miskin itu tertolong.

Kalau seperti sekarang, kemiskinan akan tidak teratasi. Apalagi dengan cara kasih BLT itu, jadi manja. BLT itu sama saja melestarikan kemiskinan. Ya, miskin terus. Ngapain kerja, nanti terima tiap bulan Rp 100.000. Dan uang seratus ribu itu memang untuk di desa-desa, besar sekali.

Hutan Tanaman Industri

Tetapi sebenarnya, Indonesia kalau mau bangkit ekonominya, harus memanfaatkan tanah-tanah yang sudah tidak produktif, luasnya 60 juta hektar. Dulu, tahun 1998, waktu Menteri Kehutanannya Jamaluddin, yang sudah tidak produktif itu sebanyak 57 juta hektar, jadi sekarang itu kira-kira paling sedikit 60 juta hektar. Itulah yang bisa segera dikerjakan.

Untuk membangun hutan yang rusak menjadi kebun kelapa sawit atau karet dan sebagainya, uang senilai BLT saja sudah cukup, lebih dari cukup. Bahkan kalau pinjam dengan dana komersil juga bisa kembali. Pinjam saja sama China. China kan uangnya sangat banyak, sekarang uangnya US\$1.7 triliun.

Nah, caranya mengolah datangkan traktor. Sekarang mau beli traktor 10.000

juga tidak sulit dari Jepang, dari Korea. Hutan yang rusak dan tidak produktif kalau diolah dengan cara menggunakan mesin-mesin modern, biayanya rendah. Nah, supaya biayanya rendah, tenaga kerjanya, selain penduduk setempat, diambil dari TNI untuk menjalankan traktor mengolah tanah ditanami padi, singkong, jagung, hasilnya banyak, kelebihan. Nah, hasilnya bisa diekspor dengan harga murah, bersaing. Sebab dengan harga murah pun sudah untung.

Langsung TNI suruh jalankan traktor, itu dwi fungsi. Jadi orang tidak iri lagi, kalau mau jalankan traktor ya silahkan. Dulu kan iri karena (TNI) ada yang jadi gubernur, bupati dan sebagainya. Tapi waktu itu menjadi gubernur, bupati memang untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyataannya bisa tertib.

Sekarang jalankan traktor saja. Nanti kalau hari minggu latihan perang di situ, bikin barak-barak di situ. Tentaranya jadi tentara modern juga, ada hasil, jadi bisa beli pesawat terbang, bisa beli macam-macam. Bisa jadi contoh, dunia nanti akan bisa melihat Indonesia itu luar biasa (dan bersatu dengan rakyat). Nanti dari pemanasan global akan terkagum sama Indonesia. Kesejahteraan prajurit naik dan negara mendapat devisa.

Indonesia mempunyai tenaga banyak, orang-orang yang kerja ke Malaysia bisa kembali semua. Tidak seperti sekarang ini, pemerintah tidak punya rasa malu sama sekali. Punya rakyat yang kerja di negara asing dan sering-sering menderita.

Untuk segera membangun hutan yang rusak dan tidak produktif diperlukan sekitar 10.000 traktor. Dibagi-bagi untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi dan lain-lain. Jadi dibagi-bagi, tiap-tiap provinsi itu seribu. Dengan cara begitu maka pengelolannya akan lancar sekali. Dan tanahnya subur, tidak usah dipupuk saja tanah Indonesia ini sudah subur. Apa saja ditanam bisa hidup. Jadi kalau mau bekerja betul-betul pasti bisa.

Sekarang ini dunia sangat kekurangan bahan baku kertas. Padahal, Indonesia sangat kaya bahan bakunya, apalagi bila hutan tanaman industri (HTI) dikembangkan. Jadi pasti bisa menghasilkan devisa yang banyak.

Tapi, malah saya dipenjara karena HTI. Sebenarnya saya tidak salah, cuma karena orang yang tidak mengerti makanya saya dipenjara. Jadi sebenarnya, HTI penghasil bahan baku kertas itu luar biasa masa depannya. HTI di Indonesia, lima tahun sudah bisa ditebang, sudah menghasilkan. Sementara kalau di China paling tidak ditanam 40 tahun baru bisa ditebang. Eropa malah 80 tahun. Demikian Probo-sutejo. ■ BI-BHS



ANTRI MINYAK TANAH: Rakyat mengantri untuk dapat minyak tanah

Andi - Rizal - Zulkarnaen Trio Mallarangeng Dukung SBY

Nama keluarga Mallarangeng nampaknya semakin akrab di telinga masyarakat. Sebab, ada tiga Mallarangeng yang menjadi salah satu motor tim sukses SBY-Boediono. Mereka adalah Andi Alfian Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, dan Zulkarnaen Mallarangeng. Ketiganya merupakan putra mantan Wali Kota Parepare, Sulsel, Andi Mallarangeng dan Andi Asni Pattopoi. Andi Mallarangeng kelahiran Makassar, 14 Maret 1963 adalah juru bicara kepresidenan sejak 20 Oktober 2004. Dia



Andi, Rizal, dan Zulkarnaen Mallarangeng

juga menjabat ketua departemen sumber daya manusia (SDM) DPP Partai Demokrat. Sedangkan Zulkarnaen atau akrab disapa Choel, adalah CEO Fox Indonesia,

yang dikontrak Partai Demokrat dan SBY sebagai konsultan politik. Terakhir, Rizal Mallarangeng atau Celi. Doktor politik lulusan Ohio University, AS, itu adalah pendiri Fox Indonesia. Dia tiba-tiba muncul beberapa jam sebelum deklarasi pasangan SBY-Boediono. Direktur Eksekutif Freedom Institute itu pada Pemilu 2004 mendukung Megawati. Dan pada Pilpres 2009 dia sempat berkampanye sebagai calon presiden alternatif dengan trademark RM09.

Prabowo Subianto Terpaksa Jadi Pengusaha

Calon wakil presiden Prabowo Subianto yang sekarang mempunyai aset lebih dari Rp 1,5 triliun mengaku menjadi pengusaha karena terpaksa. Dia mengaku terpaksa karena uang pensiunnya sebagai Letnan Jenderal pada 1998 hanya Rp 900 ribu. "Uang pensiun sebesar itu sangat menyulitkan saya. Sekarang uang pensiun naik menjadi Rp 1,4 juta," kata Prabowo pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Jakarta pertengahan Juni lalu. Prabowo mengaku beruntung setelah keluar dari TNI langsung diajak adiknya Hashim Djojohadikusumo untuk terjun ke dunia usaha. Selama 11 tahun, Prabowo banyak belajar tentang praktik dagang di Indonesia yang sarat dengan penyimpangan. "Saya akhirnya belajar banyak. Rupanya praktik dagang itu banyak tipu-tipunya," kata putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini. Dia mengaku prihatin dengan maraknya praktik bisnis semacam itu dan berusaha mengintakan pemerintah yang tengah berkuasa.



Faisal Basri Menangisi Boediono

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengaku sempat meneteskan air mata, ketika cawapres Boediono dituding dengan sebutan neoliberalis. Dosen UI yang turut melahirkan PAN -meskipun akhirnya mengundurkan diri, tidak aktif lagi - ini tidak tahan, saat sahabatnya dicerca, didemo, disudutkan dengan label neolib. Hal itu disampaikan Faisal Basri saat peluncuran buku karya Boediono yang berjudul "Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?", di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Matraman, Jak Pus, pertengahan Juni lalu. Faisal mengatakan, paham neolib ini tidak diterapkan di Indonesia, tetapi unsur-unsur neolib ada di Indonesia. "Unsur neoliberalisme memang ada tapi jangan lantas di generalisasi semua itu pada satu rezim sehingga langsung disebut rezim neoliberalisme," ujar Faisal dalam blognya. Ia meminta masyarakat tidak tumbuh dalam kecurigaan berlebihan terhadap pemerintahan hanya karena ada unsur pasar bebas di dalamnya. Menurutnya justru membawa kesejahteraan bagi masyarakat adalah tugas pasar. "Tapi, pasar itu liar. Oleh karena itu, harus dikendalikan oleh pemerintah. Makin liar pasar, maka kendali pemerintah harus makin kuat," katanya.



Harry Sasongko Titrotjondro Pimpin Indosat

Harry Sasongko Titrotjondro resmi diangkat sebagai direktur utama PT Indosat Tbk (ISAT) menggantikan Johnny Swandi Sjam. Demikian hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang digelar di Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pertengahan Juni lalu. Harry yang saat ini menjabat Country Manager GE Money Indonesia, akan

bertugas di Indosat terhitung Agustus 2009. Susunan direksi lainnya adalah Peter Kuncewicz, Steve Hobbs, Fadzri Sentosa, serta Kaizad Bomi Heerjee. Perampingan jumlah direksi Indosat dari sembilan orang menjadi enam sudah diprediksi sejumlah kalangan sebelumnya. Posisi direksi didominasi perwakilan dari Qtel selaku pemegang

saham mayoritas (65 persen). Sedangkan pemerintah Indonesia (14,2 persen saham) cuma mendapat jatah satu direksi yaitu Fadzri Sentosa dan dua komisaris, Jarman serta Rionald Silaban. Rencananya, Indosat akan memberikan deviden sebesar Rp 175,85 per lembar saham yang akan dibagikan pada 22 Juli mendatang.

Bandung Perhatikan La

Wali Kota Bandung, Dada Rosada menerima penghargaan dari Departemen Sosial (Depsos) RI dalam bidang perhatian sosial lanjut usia (lansia).

Piagam penghargaan dan plamfet diberikan langsung oleh Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah dalam acara memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2009 di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong, Tangerang, Minggu (31/5).

Di antara tamu undangan Depsos yang hadir, Dada menjadi satu-satunya Wali Kota di Indonesia yang meraih penghargaan tersebut. Juga penghargaan tersebut bagi Dada selama menjabat sebagai Wali Kota Bandung, yang menginjak periode kedua ini, merupakan penghargaan pertama dalam bidang perhatian sosial lanjut usia.

Menurut Bachtiar, penghargaan tersebut diberikan, karena pengabdian, kiprah, perhatian, dan kepedulian yang diberikan Dada sebagai Wali Kota Bandung terhadap masalah lansia dan penderita cacat di Kota Bandung, khususnya bidang kesejahteraan. Dengan sejumlah programnya selama menjadi wali kota, Dada dinilai berhasil mengurangi masalah-masalah yang dialami lansia. "Saya berikan penghargaan kepada wali Kota Bandung Dada Rosada karena perhatiannya yang luar biasa terhadap lansia," tandas Mensos.

Mensos dalam hajatan tersebut, selain menyerahkan penghargaan kepada Dada, juga memberikan penghargaan kepada sejumlah organisasi sosial (orsos) atau yayasan dari berbagai kota di Indonesia yang selama ini dinilai peduli terhadap keberadaan para lansia. Di antaranya ada sembilan provinsi yang menerima penghargaan tersebut, yakni Gorontalo, Maluku, Kalimantan Tengah, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung dan Jambi.

Bachtiar meminta kepada masyarakat yang belum menjadi lansia selalu memberikan perhatian kepada orang yang lebih tua. "Contoh di panti jompo Padang penghuninya orang Padang, padahal memiliki anak istri di Padang. Penyebabnya karena si bapak ini sering kawin sehingga anak-anaknya tak mau mengurus," ujar Bachtiar.

Upaya Bersama

Dengan rasa sumringah menanggapi penghargaan itu, Wali Kota Bandung Dada Rosada menyatakan, bahwa penghargaan yang diterimanya itu bukanlah hasil kerja dirinya semata. Pencapaian penghargaan itu merupakan hasil kerja



Dada Rosada saat menerima penghargaan Peduli Lansia

keras dan upaya bersama yang dilakukan semua unsur, termasuk Pemkot Bandung, masyarakat, dan lembaga yang melakukan upaya perhatian kepada para lansia.

"Ini merupakan penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan secara bersama-sama dari seluruh unsur di kota Bandung untuk terus memperhatikan lansia," katanya. Karena bagaimana pun, keberadaan para lansia, harus diakui dan dihargai generasi di bawahnya. "Bagaimanapun kita tidak akan ada tanpa keberadaan orang tua. Kita yang muda sudah sewajarnya menghormati dan memberikan perhatian khusus kepada orang tua, keberadaan Lansia harus dihargai dan diakui. Suatu saat, semua orang pun akan menjadi Lansia," tutur Dada mengingatkan.

Dada pun meminta kepada masyarakat agar tidak menjauhkan para lansia dari keluarga dengan cara menitipkannya ke panti-panti jompo. Karena tindakan itu salah, bahkan katanya, dalam norma agama dikategorikan perbuatan dosa. "Keluarga dan para pewaris jangan sekali-kali membentuk persepsi bahwa lanjut



Dada Rosada saat menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

nsia



nsia dari Mensos Bachtiar Chamsyah

usia adalah bencana atau masalah bagi keluarga,” katanya.

Dada berharap anak-anak bisa melihat dan menilai rekam jejak orang tua. Hal itu agar keutuhan keluarga tetap terjaga. Di samping menjadi faktor yang menentukan bagi terjaganya kualitas kesehatan serta pikiran orang tua. “Saya mengajak semua pihak untuk berpikir dan berbuat lebih konstruktif terhadap para lansia,” tambahnya.

Dada mengungkapkan, di Kota Bandung ada 360.000 lansia atau 15% dari jumlah penduduk kota Bandung yang mencapai 2,4 juta. Untuk melayani penduduk lansia ini, lanjutnya, Pemkot Bandung memiliki sejumlah program bagi para lansia. Di antaranya program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) lansia, pembinaan keluarga lansia, taman lansia, bantuan ke panti wredha, pemberdayaan lansia, pemeriksaan kesehatan, bina lingkungan dan usaha serta berbenah rumah lansia. Bahkan, kota Bandung juga memiliki day care lansia.

Dalam penanganan sosial Lansia, Dada menyebutkan, di Kota Bandung terdapat Pos Bindu Lansia sebanyak 706 tersebar

Bandung Raih *Best Effort*

Kota Bandung meraih piagam penghargaan Adipura 2009 Best Effort untuk kategori metropolitan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan tersebut diterima Walikota Bandung, H. Dada Rosada, yang diserahkan Menteri Lingkungan Hidup RI, Rachmat Witoelar pada puncak acara peringatan Hari Lingkungan Hidup 2009 Tingkat Nasional, di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (5/6/09). Bersamaan dengan itu juga, salah satu sekolah di Bandung, yakni SMP Negeri 7 Bandung meraih anugerah Adiwiyata sebagai sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup selama 3 tahun berturut-turut. Diterima Kepala SMP Negeri 7 Bandung, Nandi Supriyadi.

Meski hanya meraih piagam penghargaan, Dada merasa bersyukur dan menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, sehingga Kota Bandung memenuhi skala nilai Adipura. “Saya bersyukur

mendapatkan piagam ini. Meski belum mencapai raihan tertinggi, penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas upaya keras yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan menjadi dorongan lebih baik lagi pada kita, berupaya lebih keras lagi. Kalau bisa kita harus dapat meningkatkan pencapaiannya sehingga tahun depan dapat meraih Piala Adipura,” harap Dada.

Dada juga menyatakan kondisi lingkungan yang tertib, bersih dan indah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk itu dirinya bertekad, selain lebih memantapkan 5 gerakan lingkungan hidup, yaitu gerakan penghijauan sejuta pohon, Cikapundung bersih, sejuta bunga untuk Bandung, udara bersih dan gerakan pembibitan, pemeliharaan dan pengawasan pohon (GP4LH), ia juga akan menuntaskan persoalan sampah secara bertahap dengan mewujudkan PLTSa yang dipadukan dengan pola 3R (reduce, reuse, recycle).

di 151 kelurahan, Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 240 kelompok dan 1 Taman Lansia untuk kegiatan rekreatif. Sementara dari 360.000 lansia, sebanyak 1.870 di antaranya tergolong terlanjar. Pemkot mengupayakan bantuan yang disebut program bantuan wali kota khusus (Bawaku), yaitu bantuan bina usaha berupa modal usaha gratis, rehab rumah tidak layak huni atau rumah kumuh keluarga lansia miskin (benah imah) dan bina lingkungan tertib sehat.

“Untuk benah rumah lansia ini, sementara kita laksanakan baru di 2 Kecamatan yaitu Cibiru dan Mandalajati. Bagi lansia terlanjar dan tidak mau ditampung pada panti sosial, bantuan diberikan dalam bentuk bantuan permakanan melalui tetangga terdekatnya. Sedangkan untuk panti-panti sosial yang di Bandung jumlahnya ada 51 yayasan, sudah dua tahun ini kita berikan bantuan 15 juta rupiah perpanti pertahun, yang sebelumnya tidak ada,” tutur Dada.

Di tempat dan waktu berbeda, pada acara yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Herawan juga memberikan penghargaan kepada Wali Kota Bandung Dada Rosada, atas lembaga pemerintah yang peduli kepada lansia.

Pada Peringatan Hari Lansia Tingkat Jawa Barat yang dilangsungkan di Lapangan Parkir Barat Gedung Sate, Selasa 3/6, selain memberikan penghargaan kepada Dada, Gubernur juga memberi penghargaan kepada 34 lansia sehat, mandiri,



Dada Rosada

berprestasi dan berguna bagi masyarakat. Di antaranya mantan Gubernur Jabar dan juga sesepuh Jabar, Solihin G.P., Rektor IKOPIN Yuyun Wirasasmita dan Dadan Sukarna (mantan Ketua PMI Jabar).

Dalam acara yang diikuti sekitar 1.500 para lansia dan sesepuh Jabar, hadir pula Ketua Lembaga Lansia Indonesia (LLI) H. Nuriana (yang juga mantan Gubernur Jabar) dan Wagub Jabar Dede Yusup. ■ AW

Mengolah Minyak Sumur Tua

Pertamina mencoba teknologi baru untuk menaikkan produksi minyak di sumur-sumur tua di ladang minyak Tarakan yang sudah berusia lebih 100 tahun. Caranya dengan menggunakan *Electrical Submersible Pump (ESP)*.

Eksplorasi minyak besar-besaran di wilayah Kalimantan Timur sudah belangsung sejak ratusan tahun lalu. Ribuan juta barrel minyak disedot dari perut bumi Tarakan dan Sanga-sanga menyebabkan kandungan minyak tinggal sedikit. Itu sebab, tanpa teknologi baru, mustahil produksi minyak dari lapangan-lapangan ini dapat dioptimalkan.

Kini, PT Pertamina Unit Bisnis Eksplorasi dan Produksi (UBEP) Sanga-sanga dan Tarakan mengembangkan teknologi baru yang diharapkan bisa menaikkan produksi minyak dari sumur-sumur tua. Lapangan minyak Sanga-sanga dan Tarakan adalah ladang minyak tua yang selama ini dikelola oleh PT Medco EP Indonesia melalui *Technical Assistance Contract (TAC)* dan sejak 15 Oktober 2008 lalu kerja sama pengelolaan itu tidak diperpanjang lagi.

Produksi meningkat dari rata-rata 4.300 barrel hingga 5.200 barrel per hari setelah kedua lapangan yang selama 16 tahun dikelola Medco EP Indonesia ini kembali dikerjakan sendiri Pertamina. "Berdasarkan perhitungan kami, dengan teknologi sekarang, *Electrical Submersible Pump (ESP)*, produksi minyak dapat kita tingkatkan," papar General Manager Pertamina UBEP Sanga-sanga Tarakan, Satoto Agustono kepada S Leonard Pohan wartawan *Berita Indonesia* di Tarakan, belum lama ini.

Untuk menambang minyak, selama ini PT Medco menerapkan *pumping well* atau pompa angguk, *gaslift*, dan *flowing well*. Dari sekitar 1.500 sumur tua di Tarakan dan Sanga-sanga, hanya 103 sumur yang berproduksi, 61 sumur berada di Tarakan. "Kita akan melakukan pengelolaan sumur-sumur tua yang dalam istilah perminyakan disebut *reaktivasi*. Kalau sumur itu masih potensial, kenapa tidak," ujar Satoto Agustono menjawab *Berita Indonesia* atas banyaknya bangunan-bangunan baik milik Pemerintah maupun kepunyaan masyarakat di Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) di kedua daerah ini.

Penambangan minyak di Tarakan sendiri sudah berjalan seratus tahun lebih. Lebih seribu sumur minyak dibor di pulau dengan luas daratan sekitar 241,5 kilometer (Km²) ini. Sejak ditemukan minyak bumi di Kampung Satu tahun 1897 akhirnya sebuah perusahaan minyak Belanda *Nederlandsch Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM)* melakukan pengeboran pada koordinat X=1812,66 – Y=2974,24 dengan kedalaman 290 meter yang diberi nama sumur Pamusian 1. Pada Tahun 1906 pengelolaan tambang minyak Tarakan diserahkan kepada *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)* dengan produksi pertama 23 ton minyak.

Pada tahun 1928, BPM sudah berhasil membor 418 sumur minyak di Area Pamusian dengan produksi 22.700 barrel

per hari. Melihat produksi ini, perusahaan minyak Belanda ini memperluas wilayah pengeborannya ke Sesanip, Gunung Cangkol, Mangatal, dan Juwata. Sampai tahun 1935, BPM berhasil membor 937 lobang sumur minyak. Sebanyak 857 sumur di Pamusian, 32 sumur Sesanip, dan 68 sumur di Gunung Cangkol dan Juwata.

Pada tahun 1942, masuknya tentara Jepang ke Indonesia, khususnya Tarakan - ratusan sumur minyak produktif sengaja dirusak dan dibakar oleh BPM. Pengelolaan minyak di Tarakan diambil alih Jepang, dan pada bulan Mei 1942 melakukan pengeboran sumur pertama di Pamusian dengan nama sumur E (Enemi) 657 yang kemudian berlanjut sampai bulan Juli 1945 membor sumur E 829. Atau hanya dalam waktu 3,5 tahun, Jepang berhasil membor 174 sumur minyak di Tarakan.

Kalahnya Jepang dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka, pada Desember 1946 BPM kembali mengelola ladang minyak di Tarakan. Namun, karena sesuatu hal, BPM meninggalkan Tarakan. Dari tahun 1950 sampai tahun 1968 atau selama 18 tahun kegiatan tambang minyak di Tarakan tidak ada. Pemerintah akhirnya, atau tepatnya 15 Oktober 1968 menyerahkan pengelolannya kepada Pertamina. Namun setelah berjalan 2, 5 tahun atau pada 17 Maret 1971 Pertamina mengadakan *Technical Assistance Contract (TAC)* dengan REDCO sebuah perusahaan minyak Amerika, selanjutnya mengalihkan kepada Tesoro Petroleum Corporation, sebuah perusahaan Amerika.

Berdasarkan pengalihan tersebut, la-

Semburan liar (*blowout*) salah satu sumur di Tarakan



Rumah penduduk yang dibangun dekat sumur minyak

pangan Tarakan dikelola Joint Operation Pertamina Tesoro (JOPT) dan pada 1 Desember 1980 semua karyawan Pertamina yang diperbantukan ke Tesoro diintegrasikan ke perusahaan asing ini atau menjadi karyawan Tesoro Indonesia Petroleum Company (TIPCO). Tapi, pengelolaan lapangan minyak tetap menggunakan sistem TAC sampai kontrak berakhir pada tanggal 15 Oktober 1980 yang kemudian diperpanjang 20 tahun.

Tampaknya, Tesoro memilih jalan menjual perusahaan itu. Setelah tiga tahun berjalan, tepatnya 15 Juni 1992 TIPCO mengalihkan seluruh sahamnya kepada PT Exspan Kalimantan salah satu

anak perusahaan PT Medco Tbk. Selama 10 tahun, perusahaan minyak yang berpusat di San Antonio Amerika ini berhasil menggali 17 sumur minyak di Tarakan dengan kerja sama *Production Sharing Contract (PSC)*. Medco sendiri, selain memelihara sumur-sumur tua (TAC), berhasil menemukan 33 sumur-sumur minyak dan gas baru. ■ SLP



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BESERTA SELURUH JAJARAN**

MENGUCAPKAN :

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung, atas dukungannya terhadap berbagai program pembangunan khususnya Bidang Lingkungan Hidup sehingga KOTA BANDUNG meraih :

**PIAGAM PENGHARGAAN ADIPURA
(BEST EFFORT) KATEGORI KOTA METROPOLITAN**

Diterima oleh :

**WALI KOTA BANDUNG
H. DADA ROSADA**

dan

**PIAGAM ADIWIYATAMA
(SEKOLAH YANG PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
SELAMA 3 TAHUN BERTURUT-TURUT**

Diterima oleh :

**KEPALA SMPN 7 BANDUNG
NANDI SUPRIYADI**

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI

RACHMAT WITDELAR

pada acara Anugerah Lingkungan Hidup 2009
di Jakarta, Jumat 5 Juni 2009.

Semoga penghargaan ini menjadi dorongan lebih baik lagi bagi Pemerintah Kota Bandung, untuk mewujudkan Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat.

Bandung, 7 Juni 2009

WALI KOTA BANDUNG

Ttd

DADA ROSADA

WAKIL WALI KOTA BANDUNG

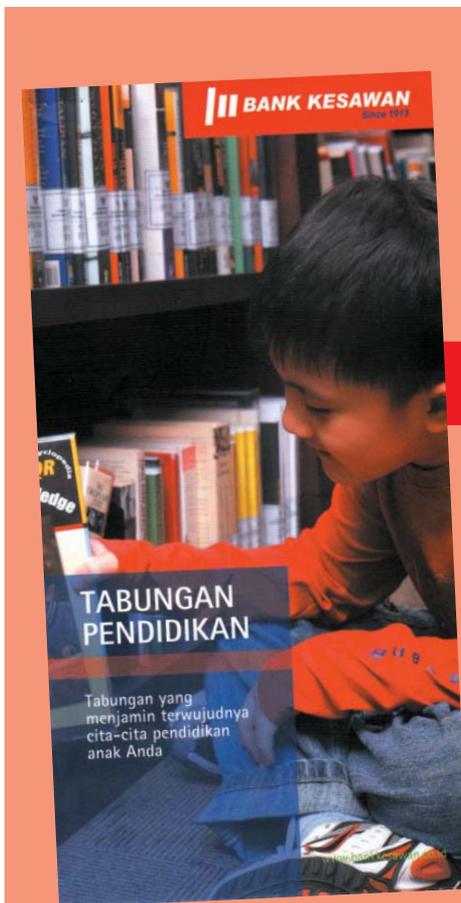
Ttd

AYI VIVANANDA

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

Dr.H. EDI SISWADI, M.SI.



Guna melengkapi kebutuhan nasabah yang kian beragam dalam perencanaan biaya pendidikan, Bank Kesawan meluncurkan produk baru Tabungan Pendidikan. Penandatanganan MOU Kerjasama antara Bank Kesawan dengan Asuransi Mega Life di Jakarta tanggal 21 Juni 2008.

Business Director Bank Kesawan - Entjik S.Djafar menjelaskan, melalui Tabungan Pendidikan diharapkan nasabah dapat **merencanakan biaya pendidikan** anak lebih baik. Jangka waktu yang diberikan sangat fleksibel yaitu mulai dari **1 tahun sampai 20 tahun** dan usia penabung pada saat jatuh tempo adalah 65 tahun, dan setoran rutin setiap bulan besarnya **mulai dari Rp. 100.000,-** atau kelipatannya dengan maksimum sampai dengan **Rp5 juta**. Mudah melakukan setoran rutin karena secara otomatis Bank Kesawan akan mendebet rekening Tabungan atau Giro setiap bulannya.

Bank Kesawan Luncurkan Tabungan Pendidikan

Selain kemudahan-kemudahan di atas, Tabungan Pendidikan Bank Kesawan juga memberikan perlindungan **asuransi jiwa**. Dalam hal ini apabila penabung meninggal dunia maka setoran rutin bulannya akan diteruskan oleh Asuransi Mega Life. Jika nasabah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan **santunan duka sebesar 250%** dari kumulatif saldo tabungan atau maksimum Rp500 juta, dan manfaat santunan rawat jalan/inap sebesar biaya rumah sakit atau maksimum 25% dari saldo Tabungan Pendidikan.

Sesuai dengan visi Bank Kesawan untuk menjadi Bank terdepan di kelasnya, kini lebih memantapkan posisi dalam kancah persaingan perbankan nasional. Hal ini didukung oleh 32 jaringan layanan yang tersebar di 10 kota di Indonesia dan ATM Kesawan yang siap untuk memberikan pelayanan selama 24 jam sehari serta **bebas biaya transaksi ATM** untuk info saldo, tarik tunai dan transfer antar rekening Bank Kesawan. Akses jaringan ATM Kesawan tersebar di lebih dari **12.000 mesin ATM** yang berlogokan ATM Bersama di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Pendidikan Bank Kesawan, dapat menghubungi Customer Service kami yang terdekat di kota Anda:

JAKARTA: 021-350.8888; MEDAN: 061-415.2929; BANDUNG: 022-422.0618; SURABAYA: 031-568.7530; DENPASAR: 0361-233.777; PEKANBARU: 0761-33308; BATAM: 0778-456.112; TANJUNG BALAI: 0623-92688 dan PEMATANG SIANTAR: 0622-29666.

Ke Mana Daops itu Men

Dana operasional (daops) untuk pondok pesantren di Kabupaten Banyuasin bermasalah. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Ponpes Banyuasin, dari sejumlah ponpes yang sudah dianggarkan, ada yang belum, bahkan tidak pernah menerima dana dimaksud. Di internal Pemkab Banyuasin sendiri sempat terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah daops yang sudah dikucurkan.

Tiga miliar enam puluh juta rupiah (Rp 3.060.000.000) dana operasional (daops) untuk pondok pesantren (ponpes) di Kabupten Banyuasin, Sumatera Selatan diduga telah diselewengkan. Dana yang dianggarkan Pemkab Banyuasin buat 46 ponpes untuk tahun anggaran 2007-2008, yakni sebesar Rp 5 juta per ponpes per bulan itu tidak jelas keberadaannya.

Dugaan penyelewengan tersebut awalnya terungkap pada rapat Pimpinan Ponpes di Banyuasin yang digelar beberapa waktu lalu di Ponpes Qudratullah Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Pada rapat yang dihadiri oleh 28 Pimpinan Ponpes tersebut, diketahuilah bahwa ternyata ada beberapa ponpes yang dikucurkan daopsnya namun tidak genap 12 bulan dan terkesan tertutup.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Ponpes Banyuasin, Buya HM Husni Thamrin Madani yang memimpin rapat tersebut mengatakan, dari 40-an Ponpes yang dianggarkan pada APBD 2007 dan 2008 Banyuasin, yang dikucurkan hanya 32 ponpes saja. Sedangkan ponpes lainnya tidak mendapatkan sama sekali daops yang telah menjadi haknya.

Karena itu, para anggota DPD Forum Ponpes Banyuasin pun mendesak Sang Ketua, Buya Husni untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Apalagi semua masyarakat tahu karena bantuan daops untuk ponpes tersebut selalu menjadi kebanggaan setiap kegiatan pemerintah yang berlangsung di wilayah maupun di luar Kabupaten Banyuasin. "Kami para pimpinan ponpes ini sudah berusaha mempertanyakan masalah ini kepada Pemkab Banyuasin dan DPRD Banyuasin. Tapi hingga saat ini tidak ada kejelasannya. Artinya, ini ada penyelewengan. Masa iya dana yang telah dianggarkan tidak ada dananya. Contohnya saja, Ponpes Qudratullah yang merupakan salah satu dari 8 ponpes yang anggarannya menyusul, belum serupiah pun menerima daops tersebut," jelas Buya Husni.

Buya Husni juga mengkritik, tidak

transparannya pengucuran daops tersebut. Masalahnya, daops dianggarkan dan di-Perdakan secara terbuka sementara pemberiannya dilakukan secara diam-diam.

Buya Husni menegaskan, pihaknya tetap berterima kasih atas kepedulian Pemkab Banyuasin terhadap dunia pendidikan agama di Banyuasin. Namun bukan berarti pihaknya akan menerima saja apa yang diperbuat dan diinginkan oleh Pemkab Banyuasin. "Kami ini lembaga pendidikan agama untuk menciptakan generasi muda Banyuasin yang bermoral dan berakhlak mulia. Kami tetap berpegang teguh dengan Agama Islam dan kami tidak akan pernah setuju atau mendukung apapun bentuknya kejahatan," ujar Buya Husni.

Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Banyuasin, Sugeng SE yang dikonfirmasi membenarkan dugaan penyelewengan tersebut. Menurutnya, anggaran daops tersebut memang telah disetujui DPRD Banyuasin dan telah di-Perdakan. Untuk pencairannya kata Sugeng, dilakukan setiap triwulan. Pada triwulan pertama tahun 2007, ponpes yang menerima daops hanya 35 ponpes. Namun ternyata masih ada 8 ponpes di Banyuasin yang belum terdata sehingga daopsnya dianggarkan DPRD Banyuasin pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2007 dan akan dianggarkan semuanya pada APBD induk di Tahun 2008. Tapi nyatanya di tahun 2007 dan 2008 tetap 35 ponpes yang mendapatkan daops tersebut. Dari anggaran 12 bulan di tahun 2007, 35 ponpes hanya menerima 9 bulan (3 triwulan). Dan di tahun 2008, 35 ponpes tersebut hanya menerima daops 3 bulan (1 triwulan). Artinya ada penyelewengan dana sebesar Rp 1.005.000.000,- di tahun 2007 dan Rp 2.055.000.000,- di tahun 2008.

"Dugaan penyelewengan itu sudah jelas karena apa yang telah dianggarkan itu sudah ada dananya, harus dikucurkan dan tidak bisa diganggu gugat. Apalagi ini terjadi selama 2 tahun. Ini sudah mengarah ke unsur pidana," ujar Sugeng.



Buya HM Husni Thamrin Madani saat memimpin rapat



Kabag Keuangan Ismed Elmondo.

Ditanya alasan persetujuan DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin untuk anggaran 2007, Sugeng berkata, "Kalau LKPJ Bupati Banyuasin 2007 tentang daops itu disetujui oleh DPRD Banyuasin, itu dikarenakan DPRD Banyuasin tidak mengetahui kasus tersebut. Jadi untuk LKPJ anggaran 2008, pada pertengahan 2009 ini tidak bisa kita setuju. Terutama untuk daops ponpes ini jelas ada penyelewengan dan apapun alasannya ini tidak bisa dibenarkan."

Saling Membantah

Siapa aktor penyimpangan daops ini, belakangan mulai terkuak. Pasalnya, Sekda Banyuasin, Ir. Parigan dan mantan Kabag Kesra dan Pemberdayaan Perempuan, HM Soleh Naim SE, mengaku tidak tahu menahu masalah tersebut. Padahal, Kabag Keuangan Ismed Elmondo mengaku bahwa ketika itu, daops 32 ponpes untuk triwulan IV Tahun 2007 telah dikucurkan Rp 480 juta melalui ben-

ngalir?



dengan seluruh Pimpinan Ponpes di Banyuwangi.



Kabag Kesra Banyuwangi, Ismiyati ST Msi.

dahara untuk dilanjutkan ke Kesra.

Sekda Banyuwangi Ir. Parigan mengatakan, daops tersebut sebenarnya merupakan bantuan yang tidak perlu dipermasalahkan. Namun sebagai Sekda Banyuwangi, dia mengaku akan menyelidiki kasus tersebut. "Masalah daops itu Sekda lama yang pegang. Tapi sebagai Sekda sekarang ini, saya akan menindaklanjuti masalah ini. Walaupun sebenarnya daops ini bersifat bantuan semata. Jadi saya akan tetap memanggil pihak terkait," ujarnya.

Mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Banyuwangi, HM Soleh Naim, juga mengaku tidak tahu menahu masalah pencairan daops triwulan IV TA 2007 tersebut. Sayangnya, Soleh enggan berkomentar banyak terkait dugaan penyimpangan kasus tersebut. "Saya tidak tahu menahu masalah pencairan daops tersebut, tanya saja sama Kabag Kesra yang baru. Jangan tanya saya," ujar Soleh.

Belakangan, kasus ini malah semakin

rumit. Sebab, pihak bendahara Pemkab Banyuwangi dan Bagian Kesra terkesan saling lempar tanggung jawab. Bahkan dari keterangan bendahara dan Kabag Kesra itu, ada perbedaan mencolok jumlah ponpes yang mendapatkan daops triwulan I tahun anggaran (TA) 2008 yang juga sangat berpengaruh pada nominal yang dikeluarkan oleh Pemkab. Dari keterangan jumlah ponpes yang berbeda tersebut, diduga 14 ponpes yang juga di SK-kan Bupati Banyuwangi untuk mendapatkan daops, dilenyapkan.

Kabag Kesra Banyuwangi, Ismiyati ST Msi, mengaku bahwa khusus daops 46 ponpes untuk triwulan I TA 2008 telah disampaikan kepada masing-masing ponpes. "Untuk triwulan I ponpes yang menerima daops itu sebanyak 46 ponpes. Dan itu sesuai dengan SK Bupati Banyuwangi. Dan itu ada bukti tanda tangan serah terima dari Pemkab Banyuwangi kepada pihak pondok pesantren. Jadi bukan hanya sekadar lisan," ujar Ismiyati.

Sementara Bendahara Bagian Keuangan Pemkab Banyuwangi, Hamzah Lubis Sip, mengaku bahwa ponpes yang mendapat daops triwulan I TA 2008 hanya 32 ponpes. Menurut Hamzah, anggaran triwulan I yang dikeluarkan Kabag Keuangan kepada dirinya sebagai bendahara hanya 32 ponpes. "Triwulan I TA 2008 itu hanya 32 ponpes yang dicairkan dan itu sesuai dengan permintaan Bupati Banyuwangi. Sebagai bendahara, saya hanya menerima dana tersebut untuk dilanjutkan kepada Kesra yang selanjutnya ke para pimpinan ponpes. Jadi kalau ada yang mengatakan 46 ponpes, itu keliru. Memang dahanya dari mana untuk 14 ponpes tambahan itu," ujar Hamzah. Hamzah juga mengakui adanya tunggakan daops 32 ponpes triwulan IV TA 2007. Tunggakan tersebut menurut Hamzah dikarenakan dananya memang baru dikucurkan di tahun 2009 ini. Tapi tunggakan itu juga menurut Hamzah sudah dibayarkan kepada 32 ponpes pada 4 Mei lalu.

Terkait dengan informasi tersebut, Ponpes Qodratullah yang diberitakan merupakan salah satu ponpes yang dianggarkan tapi tidak pernah menerima daops, ketika dikonfirmasi kepada pimpinannya, Buya KH Husni Thambrin, mengaku benar belum pernah menerima daops meskipun ponpes yang dipimpinya telah di SK-kan oleh Bupati untuk mendapatkan daops. "Jangankan tanda tangan telah menerima daops, undangan untuk menerima daops dari Pemkab Banyuwangi pun belum pernah saya dapatkan. Jadi bagaimana mungkin kami menerima daops tersebut," ujar Buya.

Batal

Terlepas dari adanya dugaan penye-

lewengan seperti disebutkan di atas, belakangan harapan 46 ponpes di Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan rapelan sebanyak 3 triwulan daops yang dianggarkan Pemkab Banyuwangi di TA 2008 kini tinggal sebatas angka. Karena berdasarkan Kepmendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 45 ayat 1 dan 2, bantuan semacam itu dibatalkan. Penjelasan mengenai hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Kesra Pemkab Banyuwangi, Ismiyati ST Msi baru-baru ini. Menurut Ismiyati, pembatalan tersebut sudah diberitahukan kepada ke 46 ponpes yang mendapatkan daops melalui surat resmi Nomor 450/6705/V/2009. Surat tersebut juga kata Ismiyati merupakan klarifikasi dari surat pernyataan bersama ponpes yang dilayangkan kepada Pemkab Banyuwangi beberapa waktu sebelumnya.

Ismiyati menjelaskan, Kepmendagri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat dan parpol diberikan secara selektif, tidak terus menerus atau tidak mengikat, serta memiliki kejelasan peruntukan kegunaannya, dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Dengan alasan Kepmendagri tersebut dan defisit anggaran di tahun 2008, maka daops 46 ponpes triwulan II, III dan IV yang telah dianggarkan oleh Pemkab Banyuwangi tidak bisa dikucurkan. "Kita sudah memberikan klarifikasi atas surat pernyataan bersama para ponpes yang mempertanyakan daops mereka. Diharapkan semua pimpinan ponpes bisa mengerti bahwa di tahun 2008 daops yang mereka terima memang hanya triwulan I, selanjutnya tidak ada lagi daops," jelas Ismiyati.

Mengenai belum dibayarnya daops 32 ponpes pada triwulan IV dan 4 triwulan untuk 14 ponpes di tahun 2007, Ismiyati mengatakan akan segera mengucurkan daops tersebut. Hanya saja yang akan mendapatkan kucuran daops triwulan IV tersebut hanya 32 ponpes yang 3 triwulan sebelumnya sudah mendapatkan daops. "Untuk tahun 2007 tidak ada satu pun ponpes tambahan yang mendapatkan daops apalagi sampai 14 ponpes tambahan. Karena yang di SK-kan oleh Bupati Banyuwangi untuk mendapatkan daops di tahun 2007 tersebut hanya 32 ponpes dan bukan 46 ponpes. Kalau di tahun 2008 memang ada 46 ponpes yang mendapatkan daops itu pun hanya pada triwulan pertama dan sudah diberikan kepada 46 ponpes tersebut pada Maret 2008 dan ada tanda terimanya. Artinya yang ada tambahan jumlah ponpes yang mendapatkan daops itu tahun 2008 bukan tahun 2007," ungkap Ismiyati.

■ SRI WINDAYANI

Korupsi Pendidikan di Purwakarta



Demo di Kejaksaan Purwakarta

Kejaksaan Agung maupun Kejati Jawa Barat diminta memberi perhatian khusus pada proses pemberantasan korupsi di Kabupaten Purwakarta.

Selama ini, penyelesaian perkara korupsi di Kabupaten Purwakarta terkesan lambat dan disinyalir ada upaya untuk meluputkan pelaku utama dari jeratan hukum. Hal itu terlihat dari potret beberapa kasus selama ini, seperti bobolnya kas daerah sesuai audit BPK Tahun 2006, hingga kini tak jelas penyelesaiannya. Proses hukum dugaan korupsi dalam proyek jalan Cilawali-Liunggunung tahun 2006 juga hingga kini masih terbengkalai.

Beberapa contoh kasus tersebut diperkirakan malah membuat pelaku lain tidak takut atau jera. Baru-baru ini misalnya, dugaan korupsi kembali terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Purwakarta.

Sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, ditemukan dana Rp 2,4 miliar yang tidak dapat diper-

tanggungjawabkan dari 11 kegiatan Dinas Pendidikan Purwakarta pada anggaran tahun 2008. Sementara menurut angka dari Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan diwajibkan mengembalikan anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2,7 miliar.

Berapa sebenarnya dana yang bobol itu tentu proses hukumlah kelak yang lebih kompeten menentukannya. Tapi terlepas dari itu, hal ini sudah jelas merupakan indikasi adanya tindak pidana korupsi di instansi tersebut.

Untuk menelusuri kasus ini, Kepala Inspektorat Purwakarta Hamim Mulyana mengaku sudah membentuk tim sejak 15 Januari 2009 lalu. Pemeriksaan terhadap bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan, Ani Iyar Winarni, sebagai orang paling bertanggung jawab atas kasus ini juga sudah dilakukan. Dinas Pendidikan juga sudah

diberi toleransi untuk mengembalikan uang itu namun tak pernah bisa diselesaikan hingga harus diproses di kejaksaan.

Untuk sementara, menurut hasil penelusuran Inspektorat ini, dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran honor guru tidak tetap, transport guru, kelebihan jam mengajar guru, dan pembangunan gedung sekolah bantuan Provinsi Jawa Barat, itu dibagi untuk pribadi pejabat, wartawan, dan jasa advokad. Sementara menurut isu, Ani Iyar menyebut bahwa uang itu dibagi ke beberapa pejabat. Seorang Kadis disebutkan kebagian Rp100 juta dan kepala bidang masing-masing Rp 20 juta. Kemudian untuk tunjangan hari raya wartawan Rp 110 juta.

Sementara itu, Panda Dinata yang merupakan KPA pengganti pada program bantuan provinsi mengaku hanya mengajukan sekitar Rp700 juta pencairan tahap akhir pada bulan September dan cair bulan Desember. Namun, uang itu pun masih di bendahara Dinas.

Sejauh ini, pihak kejaksaan dikabarkan sudah memeriksa Kadis Pendidikan Purwakarta Makbul Hidayat dan mantan Kadis Pendidikan Didin Sahidin. Namun hasilnya belum diketahui. Kepada Ani Iyar Winarni juga baru diminta sertifikat rumah senilai Rp 400 juta.

Melihat lambatnya penyelidikan itu, Forum Anti Korupsi Purwakarta (FAKTA) melalui ketua tim investigasi Sony Surya mengharapkan agar Kejari Purwakarta mengusut tuntas kasus ini dengan secepatnya. Dia juga mengatakan agar pelaku yang sebenarnya terus diburu, jangan hanya bendahara saja yang dibuat tumbang. Karena kasus ini sudah masuk ranah hukum, maka kasus ini harus tetap sampai ke pengadilan agar para pelaku dijerat hukum sesuai perbuatannya. ■ **BND**

Berkemas Menuju Kedigjayaan

Menuju 'Purwakarta Digjaya', Pemda Purwakarta terus membenahi berbagai hal, termasuk penataan dan pengelolaan administrasi. Disiplin, kreativitas dan prakarsa birokrat juga menjadi modal utama.

Setelah diberlakukannya peraturan pemerintah (PP) no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, menurut Sekda Kabupaten Purwakarta Drs Maman Rosaman KM, MM kepada *Berita Indonesia* baru-baru ini, beberapa unit kerja di Pemkab Purwakarta terpaksa dilebur atau di-merger. Tapi sebaliknya, ada juga unit kerja yang baru dibentuk. Dalam rangka penataan dan pengelolaan unit kerja itu, Pemkab Purwakarta pun kini sedang menggodok peraturan tentang rencana strategis (restra) dan memori kerja.

Mengenai rencana strategis, menurutnya, setiap unit kerja, baik yang baru maupun yang merger harus menata ulang rencana strategis jangka pendek maupun panjang yang akan menjadi *blue print* setiap unit kerja. Sedangkan mengenai memori kerja yang berkaitan dengan pergantian jabatan karena promosi, mutasi maupun purnatugas, jika selama ini sifatnya anjuran, dalam waktu dekat aturannya akan ditetapkan menjadi Perda.

Dengan penegasan memori kerja itu, nantinya, siapa dan di mana pun seorang pejabat ditempatkan, sudah mendapatkan informasi yang dituangkan dalam memori kerja. Dengan pola ini, diharapkan tidak ada stagnasi karena pergantian pejabat. Tetapi pejabat yang menduduki unit baru



Maman Rosaman

akan lebih mudah melanjutkan program.

Yang tak kalah penting menurut Maman adalah disiplin jajaran birokrasi, kreativitas, dan prakarsa dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan penataan demikian, sembilan langkah menuju Digjaya Purwakarta diharapkan akan cepat tercapai. ■



Beli Netbook Sekarang!

Buat apa membeli notebook mahal-mahal kalau cuma dipakai untuk browsing, cek e-mail, mengetik, menonton dan mendengar lagu. Beli saja netbook!

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan notebook (laptop) sangat cepat. Berbagai spesifikasi ditawarkan dengan bentuk bodi yang bermacam-macam. Berbagai varian notebook muncul dan setahun terakhir, muncul notebook mini yang lebih sering disebut netbook. Demam netbook pun terjadi di mana-mana.

Sebab netbook yang harganya yang lebih terjangkau ini mampu memberikan layanan Web, e-mail, dan aplikasi produktivitas dalam badan yang ukurannya tidak lebih dari sebuah buku agenda. Biasanya bobot perangkat kurang dari 1,5kg, dimotori prosesor hemat daya dari Intel atau VIA, punya layar 7" – 10", memori 512MB – 1GB, storage berupa harddisk atau SSD (solid state disk), lengkap dengan sistem operasi Windows atau Linux.

Namun ukurannya yang lebih kecil menyebabkan netbook tidak bekerja seperkasa saudaranya. Kita tidak akan menemukan prosesor dual-core atau fitur discrete graphics di sini. Yang kita peroleh adalah kebebasan bergerak (portabilitas)

pada harga yang tidak semahal sebuah ultraportabel.

Dari sekian banyak merek netbook itu, mana yang layak dibeli? Soalnya, perbedaan dari setiap netbook tidak terlalu terlihat. Kebanyakan menggunakan layar 10 inchi sehingga dimensinya terlihat sama. Prosesor yang digunakan pun hampir semuanya menggunakan Intel Atom N270 walau ada beberapa yang menggunakan generasi baru N280, yang kecepatannya lebih tinggi sedikit. Oleh sebab itu, sebelum membeli netbook, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan.

Pertama, perhatikan ukuran layar dan keyboard. Netbook memang berukuran kecil, jadi penting untuk memilih mesin dengan ukuran layar dan resolusi yang nyaman di mata Anda. Mesin-mesin ini menawarkan layar berukuran 7" (antara lain Asus Eee PC 4G), 8,9" (Acer Aspire One, Asus Eee PC 901, HP 2133 Mini-Note, Lenovo IdeaPad S9, MSI Wind Notebook U90), atau 10" (Asus Eee PC 1000H, Axio Pico, MSI Wind Notebook U100, Lenovo IdeaPad S10). Jadi, biarkan mata Anda yang memilih dan cobalah

melihatnya untuk beberapa saat.

Resolusi pada netbook juga vital. Sebuah netbook dengan resolusi 800×480 pixel akan menuntut Anda menggulung-gulung ke arah samping (horisontal) ketika Anda ingin melihat halaman sebuah situs Web secara utuh. Untunglah netbook yang muncul belakangan menawarkan resolusi 1024×600 pixel, sehingga menjelajah Internet cukup menyenangkan.

Yang juga perlu diperhatikan adalah lebar keyboard. Kecuali jika jari-jemari Anda memang mungil, keyboard pada kebanyakan netbook akan terasa sempit jika dibandingkan keyboard PC yang biasa

Anda pakai. Keyboard yang paling lega pada netbook mungkin adalah HP 2133 Mini Note (92%) dan MSI Wind Notebook U100 (92%), Acer Aspire One (89%).

Namun ukuran bukanlah segalanya. Peletakan tombol juga perlu diperhatikan agar mudah dijangkau, atau justru sebaliknya, tidak mudah tersentuh. Jadi cobalah mengetik untuk beberapa saat. Bila Anda merasa jaraknya tangan terlalu dekat dan membuat Anda pegal, maka lupakan netbook itu dan cari yang lain.

Kedua, perhatikan sistem operasi apa yang digunakan. Pada umumnya netbook dipasarkan dengan sistem operasi Linux atau Windows. Pilihan jatuh pada sistem operasi open source yang gratis, Linux, bila Anda menginginkan netbook yang berharga jauh lebih murah. Anda juga sudah terbiasa menggunakan Linux. Varian Linux yang digunakan bisa Linpus Linux (Acer Aspire One), atau Xandros Linux (Asus Eee PC).

Penggunaan Linux' sebenarnya menguntungkan. Selain ukurannya yang kecil, sistem operasi ini relatif lebih tangguh menghadapi serangan malware. Jangan kuarir dengan antarmukanya. Produsen netbook sudah membuat agar penggunaan antarmuka Linux bisa semudah Windows. Dan jika suka utak-atik, Anda bisa membuat antarmuka 3D yang cantik dengan bantuan desktop manager seperti Compiz Fusion.

Ganjalan terbesar saat menggunakan Linux adalah sulitnya meng-install program dan harus berkuat dengan antarmuka baris perintah (command line). Selain itu, tergantung pada versi Linux yang terpasang, mungkin ada juga software yang tidak kompatibel dengan netbook Anda.

Karena ganjalan ini, banyak orang lebih memilih netbook yang sudah terinstall Windows. XP menjadi sistem operasi Windows yang umum ditemukan pada netbook. Beberapa netbook terbaru bahkan sudah menawarkan Windows Vista, seperti pada HP 2133 Mini Note. Alasan

lain mengapa banyak orang lebih memilih Windows adalah kompatibel dengan nyaris semua program atau asesori yang tersedia di pasar saat ini. Sayangnya, karena pangsa pasarnya yang besar, mesin-mesin Windows cenderung menjadi target serangan malware, jadi paket sekuriti yang tangguh seperti Norton Internet Security 2009, ESET NOD32, perlu Anda tambahkan.

Akan lebih baik lagi kalau netbook yang Anda pilih itu sudah mempunyai system recovery yang terdapat di dalam harddisk, mengingat netbook rata-rata tidak dilengkapi dengan optical drive.

Ketiga, perhatikan jenis prosesor. Saat ini ada dua perusahaan – Intel dan VIA – yang memproduksi prosesor yang dirancang untuk mendukung kecepatan dan efisiensi batere pada netbook. Intel awalnya mendayai netbook dengan prosesor Intel Celeron M processor (900MHz). Namun kini yang banyak digunakan adalah prosesor Intel Atom yang lebih efisien daya (800MHz sampai 1,8GHz). Saat di pasaran sudah banyak dijumpai prosesor Intel Atom N270 dan yang terbaru N280.

Sedangkan prosesor VIA's C7-M (1,0GHz sampai 1,7GHz) juga digunakan di beberapa netbook (HP 2133 Mini-Note generasi pertama). Sayangnya, kecepatannya kalah dengan Intel. Selain itu netbook yang didayai oleh prosesor VIA cenderung lebih cepat terkuras baterenya. Meski VIA sudah memperkenalkan platform Nano (1,0GHz sampai 1,8GHz), yang dirancang untuk menyaingi Intel Atom dalam hal kinerja dan ketahanan batere, pamor VIA kelihatannya makin redup dibandingkan pamor Intel Atom N280.

Keempat, perhatikan jenis penyim-



Harga terjangkau dan ukuran tidak lebih dari sebuah buku agenda, mampu memberikan layanan web, e-

panan data yang digunakan. Netbook kebanyakan menggunakan harddisk sebagai tempat penyimpanan data. Belakangan, muncul netbook baru yang sudah menggunakan SSD (solid state disk). Dua jenis storage ini, masing-masing punya keunggulan dan kelemahan.

Harddisk memberikan keleluasan storage tetapi harddisk lebih rentan terhadap guncangan dan menghasilkan lebih banyak panas akibat bagian-bagiannya yang berputar. Sedangkan SSD lebih cepat,

lebih tahan terhadap guncangan dan kejutan dan juga lebih dingin. Namun karena harganya masih mahal, kapasitasnya pun masih belum terlalu besar.

Jika Anda mementingkan kapasitas storage, pilihlah netbook yang menggunakan harddisk. Namun jika Anda mengutamakan perlindungan data dari guncangan dan kejutan serta rela merogoh kocek lebih dalam, pilihlah SSD.

Kelima, perhatikan jumlah Port di tubuh netbook. Jika Anda suka meng-

ACER ASPIRE ONE D150

Daya Tahan Baterai Luar Biasa

Produk ini merupakan generasi ke-2 dari jajaran seri netbook Acer Aspire One. Selain dengan desain baru dan pilihan warna yang lebih banyak, kinerjanya pun ikut dibenahi. Netbook ini merupakan salah satu netbook yang sudah menggunakan prosesor Intel Atom terbaru, N280 sehingga kinerjanya lebih tinggi, 600 MHz lebih tinggi dari pada N270. Daya tahan baterai sanggup menghidupkan netbook ini hingga 8 jam sehingga cocok bagi mereka yang sering bepergian. Netbook ini dijual dengan harga sekitar US\$ 409.



HP MINI 1016TU

Elegan dan Berkelas

Netbook dengan layar 10 inci ini termasuk yang teringan di kelasnya. Dari segi daya hidup, netbook ini termasuk lumayan sebanding dengan daya batere yang diberikan. Tam pilannya pun terlihat mewah dan elegan, dengan finishing warna hitam mengkilat di bagian belakang layar LCD dengan motif bulatan. Siap-siaplah merogoh kocek sebesar US\$ 469.



INSPIRON MINI 10

Kesukaan Anak Muda

Netbook besutan Dell ini mempunyai lebar keyboard 92% dari ukuran penuh

dan layar 10,1 inci.

Dengan dukungan GPS internal, memori 2 GB RAM, akan banyak membantu anak, remaja, pelancong dan tweeters untuk chatting, blogging, streaming, berbagi foto, nonton film dan lainnya. Netbook ini juga pas digunakan bagi mereka yang selalu terhubung dengan facebook dan rajin mengupdate status.



LENOVO IDEAPAD S10-2

Didukung OneKey Rescue System

Lenovo menyempurnakan netbook IdeaPad S10 yang begitu populer di Tanah Air. Namanya tetap IdeaPad S10 tapi ada embel-embel '2' sehingga menjadi S10-2. Netbook ini dibekali dengan

CONTOH KASUS

Sering Bepergian

Kunto sedang mengemas barang bawaannya sebelum berlibur ke Bali. Ia ingin bepergian tanpa direpotkan dengan barang bawaan yang berat. Saat berlibur, ia ingin tetap bisa berkirim e-mail dengan teman dan keluarga, mengisi blog-nya, browsing, dan mendengar musik. Daripada membawa notebook mahal yang biasa digunakannya di rumah, sebuah netbook yang kecil dan ringan sangat cocok untuk dibawa saat ia sedang berada di pinggir pantai.



Penolong Ibu Rumah Tangga

Rina baru saja menonton tayangan memasak dengan resep yang ingin segera ia praktekkkan sendiri. Untunglah, semua resep termasuk cuplikan videonya, tersedia gratis di website sang juru masak. Saat memasak di dapur, Rina bisa menaruh netbook di sampingnya, lalu memutar kembali cuplikan video teknik memasak dengan resep itu.



e-mail.

koneksikan kamera digital, MP3 player, atau bahkan monitor eksternal, tak perlu kuatir. Rata-rata netbook terbaru sudah menghadirkan tiga port USB 2.0, port VGA-out, dan slot kartu memori.

Keenam, perhatikan kapasitas baterai. Untuk sebuah netbook yang dibawa-bawa ke mana saja, daya tahan baterai menjadi penting. Sayangnya kebanyakan netbook saat ini hanya menyediakan baterai 3-cell berkapasitas 2000mAh. Daya tahan baterai 3-cell ini umumnya di bawah 2 jam.

Karena itu akan sangat menyenangkan bila bisa mendapatkan baterai 6-cell berkapasitas tinggi (high capacity). Milik Asus Eee PC 901 yang berkapasitas 6600mAh misalnya, bisa bertahan sekitar 6 jam. Sepanjang kenyamanan tidak terganggu, baterai yang besar patut dipertimbangkan.

Ketujuh, perhatikan kualitas webcam. Kebanyakan netbook menanamkan Webcam 0,3 megapixel atau 1,3 megapixel untuk memfasilitasi Anda ngobrol sambil lihat-lihatan (video) dengan teman dan rekan kerja. Biasanya, semakin tinggi megapixel sebuah Webcam, semakin bagus/tajam gambarnya.

Kedelapan, pastikan aksesoris apa saja yang diperlukan. Touchpad dan tombol-tombol mouse yang relatif kecil adalah hal biasa pada netbook, tetapi Anda selalu bisa menambahkan sistem pengendali pribadi Anda, yakni mouse. Pilihlah yang

nirkabel dengan dongle yang mungil, seperti Kensington SlimBlade Media Mouse atau Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000. Jika Anda membutuhkan lebih banyak storage untuk menyimpan koleksi foto, musik, video dan dokumen, jangan enggan membeli hard-disk eksternal yang portabel. Agar netbook lebih awet, Anda bisa membeli dudukan yang dilengkapi kipas sehingga panas dari netbook bisa lebih dikurangi.

Terakhir, kesembilan, pastikan Anda mendapatkan garansi resmi. Barang BM (black market) sudah banyak masuk ke pasaran. Jadi pastikan netbook yang Anda beli mempunyai garansi resmi sehingga kalau ada kerusakan, Anda tidak mendapat kesulitan untuk mengurus perbaikannya. Kalau garansinya disebut garansi toko, sudah bisa dipastikan netbook yang Anda beli merupakan barang second atau BM. ■ RIE



layar 10,1 inci, didukung prosesor Intel Atom, koneksi 3G dan papan ketik berukuran 90% dari papan ketik standar. Netbook dengan berat cuma 1 kg dan ketebalan kurang dari 1 inci ini dijual Rp4,85 juta, lebih murah dari pendahulunya. Fitur OneKey Rescue System dari Lenovo memungkinkan konsumen memulihkan data mereka jika mengalami kerusakan hanya dalam beberapa langkah.

HP MINI 1000 VIVIENNE TAM Idaman Kaum Hawa

Lewat sentuhan Vivienne Tam, seorang desainer terkenal kelahiran China yang kini bermukim di New York, netbook ini

banyak terpengaruh perpaduan budaya China dan Barat. Pemilihan warna merah menyala dengan motif bunga pasti membuat kaum hawa kesemsem berat. Apalagi desain tersebut berpadu dengan desain HP mini yang tipis dan menggunakan material plastik glossy yang modern. Netbook ini didukung oleh prosesor Intel Atom N270 (1,6 GHz), memori DDR2-533 1 GB, dan sejumlah kelengkapan seperti Wifi, Bluetooth dan sebagainya. Karena didesain oleh desainer kondang, harganya pun lebih mahal dibandingkan Mini versi 'polos' yang dijual US\$ 499. Anda harus merogoh kocek sebesar US\$ 699 agar bisa memboyong netbook ini ke rumah.



MSI WIND U100 PLUS Larinya Lebih Kencang

MSI memperbaharui netbook populer Wind U100 yang ditandai dengan tambahan kata 'Plus'. Artinya, netbook ini sudah menggunakan prosesor Intel Atom N280 yang lebih kencang dan menambah dua pilihan warna "Metallic Blue" dan "Rose Champagne" dari tiga warna yang sudah ada sebelumnya. Desain MSI Wind U100 Plus sama dengan U100, beratnya 1 kg dengan layar 10 inchi resolusi 1024x600 pixel. Memori bisa sampai 2GB DDR2-533, harddisk 160 GB, WiFi, VGA out, Webcam, 3xUSB 2.0 dan 4-in-1 card reader. MSI mengklaim dengan baterai 3-cell, netbook ini bisa hidup hingga 7 jam. Harganya sekitar Rp 5 juta.



Karenina Sunny Halim Belum Fasih Bahasa Indonesia

Karenina Sunny Halim asal DKI Jakarta akhirnya menyandang mahkota Miss Indonesia 2009, menggantikan Sandra Angelia. Karenina berhasil menyisihkan 33 finalis lainnya dan menjadi pemenang pada ajang pemilihan Miss Indonesia yang digelar di Jakarta Convention Center, Jumat (5/6) malam. Sepanjang malam final itu, Nina-panggilan akrabnya- selalu menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris dengan logat Amerika yang kental. Dia mengaku tidak menyangka bisa meraih mahkota ini dan berharap dapat memberikan yang terbaik saat menyandang status Miss Indonesia. Wanita kelahiran Jakarta, 13 Juni 1986 ini memiliki enam gelar diploma yakni di bidang *public relations, sales dan marketing, primary teaching,*



economics, performing arts dan music and arts. Ibunya berasal dari Montana, AS, sedangkan ayahnya Indonesia. Adik dari model dan pesinetron, Steve Immanuel, ini aktif di NGO dan merupakan lulusan homeschooling Christian Vocational Academy. Ia pernah terlibat sebagai pengajar bagi anak-anak korban tsunami Aceh. Pada Desember 2009 mendatang, Karenina akan bersaing dengan para wanita cantik dan berbakat untuk memperebutkan mahkota Miss World 2009 yang akan

dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan. Liliana Tanoesoedibjo, pendiri Yayasan Miss Indonesia mengatakan, pihaknya berharap Miss Indonesia terpilih bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. ■

Elly Anita

Anugerah Pahlawan Antiperdagangan Manusia

Deplu Amerika Serikat memberi penghargaan kepada sembilan orang yang berjuang mengakhiri perdagangan manusia, salah satunya Elly Anita dari Indonesia. Penghargaan yang disebut "Pahlawan yang Berjasa untuk Mengakhiri Perbudakan Era Modern", diberikan Menlu AS, Hillary Clinton. Siaran pers Kedubes AS di Jakarta (18/6) menyebutkan, Elly awalnya bekerja sebagai sekretaris di Arab, tapi kariernya berujung di Kurdistan, Irak. "Agen pengerah tenaga kerja yang membawanya sering menyiksa, tidak memberi makan, dan kerap men-



dongkan senjata ke kepalanya," cerita Elly. Ia berusaha meloloskan diri dengan mengontak Kedubes Indonesia di Amman, Yordania, serta LSM yang mengurus buruh migran. Dan ia berhasil kembali ke Indonesia dibantu International Organization for Migration (IOM). Dengan bekal pengalamannya, Elly yang bekerja di lembaga Migrant Care yang menangani buruh migran sudah membantu menyelamatkan enam perempuan korban perdagangan manusia. Mereka adalah TKI asal Indonesia yang menjadi buruh paksa di Arab Saudi dan Malaysia. ■

Riana Helmi

Dokter Termuda di Indonesia

Riana Helmi menjadi wisudawati termuda pada pelantikan wisuda di Grha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada (UGM), akhir Mei lalu. Dalam usia yang belum genap 18 tahun - tepatnya 17 tahun 11 bulan - Riana berhasil lulus dari Fakultas Kedokteran UGM dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sangat memuaskan, yaitu 3,67. Ia juga tercatat sebagai pemegang rekor dokter termuda di Indonesia. Gadis kelahiran Banda Aceh, 22 Maret 1991, anak pasangan Ajun Komisaris Helmi

dan Rofiah ini, memang dikenal cerdas sejak kecil. Sejak SD sampai SMA ia lewati dengan percepatan (akselerasi). Ketika masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM, usianya baru 14 tahun 3 bulan, ia diterima melalui jalur Penelusuran Bakat Skolastik (PBS) pada September 2005. Riana tercatat sebagai mahasiswa termuda di UGM, juga di Indonesia. Walau harus bersaing dengan mahasiswa seangkatannya -yang rata-rata empat tahun lebih tua- Riana tidak mengalami kesulitan

Yuni Yunia Ismawati Terima The Goldman Environmental Prize

Prestasi membanggakan diraih Yuni Yunia Ismawati pada peringatan Hari Bumi, 20 April lalu, di San Francisco, Amerika Serikat. Bersama aktivis lingkungan dari Gabon, Amerika Serikat, Rusia, Bangladesh, dan Suriname, Yuyun mendapat penghargaan The Goldman Environmental Prize. Ia berhasil menyingkirkan 200 pesaing dari seluruh dunia.



Penghargaan yang dikenal dengan Nobel Lingkungan ini diterima Yuyun-panggilan akrabnya- sebagai buah kerja kerasnya sejak 1994 dalam menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah dan memperbaiki sanitasi. Melalui lembaga BaliFokus yang dipimpinnya, ia mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Terobosannya dalam pengelolaan sampah perhotelan terbukti mengubah paradigma peternak babi dan pengusaha hotel. Bagaimana tidak, hotel yang semula menjual sampahnya, kini harus membayar biaya pengelolaan sampah mereka. Yuyun membagi pengelolaan sampah menjadi tiga model, yaitu *private model*, komunitas, dan skala kota. Private model ditujukan pada sampah dari hotel-hotel di Bali yang diolah untuk dimanfaatkan kembali. Sedangkan skala kota ditujukan untuk pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Menurut Yuyun, model *single line management* pembuangan sampah, yaitu dari rumah ke pembuangan sementara, lalu berakhir di TPA, tidaklah efektif. Faktanya, hampir semua dinas kebersihan kota hanya mampu menangani 40-60 persen dari total keseluruhan sampah. "Harus ada perubahan paradigma pembuangan sampah, tak sekadar angkut-kumpul-buang. Tapi ada usaha meminimalkan, mendaur ulang, dan efisiensi manajemen sampah," jelasnya. ■



berarti. Bahkan, ia berhasil menyelesaikan kuliahnya dalam waktu tiga tahun enam bulan, lebih cepat dari mahasiswa kedokteran di mana pun. Gadis yang gemar membaca ini mengaku ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang tinggi dengan mengambil program spesialis kandungan. ■

Hemat Listrik saat ini untuk **Masa Depan** kami ...

“Ingatkan keluarga dan
sahabat kita untuk
menggunakan listrik
secara hemat,
... **Nyalakan seperlunya,
matikan selebihnya**”



PT PLN (Persero)

Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik



Al-Zaytun



BUDHY MUNAWAR-RACHMAN

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

ENSIKLOPEDI



Nurcholish Madjid

Disunting oleh:

BUDHY MUNAWAR RACHMAN



**Untuk Pemesanan
Hubungi:**

**Mahad Al-Zaytun
(0234) 742815**

**Majalah Berita Indonesia
(021) 8292735**